

2015 Penyusunan Materi Teknis.pdf Dec 17, 2020 52099 words / 321457 characters

Rima Elya Dasuki

2015 Penyusunan Materi Teknis.pdf

Sources Overview

24%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	1%
2	www.banksulteng.co.id INTERNET	1%
3	wiwinsadri.blogspot.com INTERNET	<1%
4	www.hukumproperti.com INTERNET	<1%
5	anzdoc.com INTERNET	<1%
6	docplayer.info INTERNET	<1%
7	qmc.binus.ac.id INTERNET	<1%
8	www.kompasiana.com INTERNET	<1%
9	www.joblokeraceh.com INTERNET	<1%
10	bappeda.kalselprov.go.id INTERNET	<1%
11	bungaprilia123.blogspot.com INTERNET	<1%
12	danarsika.blogspot.com INTERNET	<1%
13	bappeda.nttprov.go.id INTERNET	<1%
14	perumahanpurbalingga1.blogspot.com INTERNET	<1%
15	momoncomputer.blogspot.com INTERNET	<1%
16	bigstore.bisnis.com INTERNET	<1%
17	elib.unikom.ac.id INTERNET	<1%

18	adminsekolahku.blogspot.com INTERNET	<1%
19	smbc.co.id INTERNET	<1%
20	pubinfo.id INTERNET	<1%
21	inesyamaulidyap.blogspot.com INTERNET	<1%
22	dedrihellyn.blogspot.com INTERNET	<1%
23	evlinanov.blogspot.com INTERNET	<1%
24	smf-indonesia.co.id INTERNET	<1%
25	dinaspu.kalselprov.go.id INTERNET	<1%
26	tataruangpertanahan.com INTERNET	<1%
27	www.sigerproperty.com INTERNET	<1%
28	www.caritra.org INTERNET	<1%
29	vdocuments.mx INTERNET	<1%
30	aolie.blogspot.com INTERNET	<1%
31	bapertarum-pns.co.id INTERNET	<1%
32	sampuawaltosilajara.blogspot.com INTERNET	<1%
33	www.jamsosindonesia.com INTERNET	<1%
34	proffzaky.blogspot.com INTERNET	<1%
35	pengata.wordpress.com INTERNET	<1%
36	raidahkartika.wordpress.com INTERNET	<1%
37	rumahjabodetabek.com INTERNET	<1%
38	blogdopichi.blogspot.com INTERNET	<1%
39	mafiadoc.com INTERNET	<1%
40	magisterkamal.blogspot.com INTERNET	<1%
41	www.bappedasulsel.com INTERNET	<1%

42	www.manggaraikab.go.id INTERNET	<1%
43	www.beritaekspres.com INTERNET	<1%
44	reg5.perumnas.co.id INTERNET	<1%
45	id.anz.com INTERNET	<1%
46	propertykitacom.blogspot.com INTERNET	<1%
47	poemabatsoilik.blogspot.com INTERNET	<1%
48	edoc.pub INTERNET	<1%
49	madina.co.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- Submitted Works
- Publications

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Citations
- Small Matches (less than 80 words).

Excluded sources:

- www.scribd.com, internet, 4%
- 123dok.com, internet, 3%
- id.scribd.com, internet, 3%
- pt.scribd.com, internet, 3%
- www.smf-indonesia.co.id, internet, 2%
- es.scribd.com, internet, 2%
- www.bapertarum-pns.co.id, internet, 2%
- www.kemendagri.go.id, internet, 2%
- kemenkopmk.go.id, internet, 2%



Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

EKA SETIAJATNIKA RIMA ELYA DASUKI IWAN MULYANA

PENYUSUNAN MATERI TEKNIS PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA JANGKA PANJANG UNTUK PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Peneliti:

Eka Setiadjatnika Rima Elya Dasuki Iwan Mulyana

Didokumentasikan Pada Perpustakaan Ikopin sebagai Bacaan Mahasiswa Program S1 Dan S2

Kepala Perpustakaan Ikopin

Ida Ahadiah, S.Sos

NIK: 1531287

Kementerian Perumahan Rakyat
Institut Manajemen Koperasi Indonesia
2015

DAFTAR ISI

	BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1	LATAR BELAKANG	1-1
1.2	MAKSUD DAN TUJUAN	1-3
1.3	SASARAN	1-4
1.4	LINGKUP PEKERJAAN	1-4
1.5	HASIL OUTCOME	1-4
	BAB 2 PENDEKATAN TEORITIS	2-1
2.1	KONSEP SUMBER DANA JANGKA PANJANG	2-1
2.2	PEMBIAYAAN PERUMAHAN	2-6
	2.2.1. KONSEP PEMBIAYAAN PERUMAHAN	2-8
2.3	LEMBAGA PEMBIAYAAN	2-9
	2.3.1. PEMBIYAAN PERUMAHAN DI INDONESIA	2-9
	2.3.2. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	2-17
2.4	LEMBAGA PEMBIYAAN MELALUI SJSN DI INDONESIA	2-20
2.5	MEKANISME PEMBIAYAAN PERUMAHAN	2-22
2.6	BENCHMARK: PEMBIAYAAN PERUMAHAN DI SINGAPURA	2-29
	2.6.1. KEBUTUHAN AKAN PERUMAHAN LAYAK	2-29
	2.6.2. KEBIJAKAN PEMERINTAH (SINGAPURA)	2-31
	2.6.3. PERUMAHAN YANG TERJANGKAU DAN INKLUSIF	2-32
	2.6.4. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	2-35
	2.6.5. BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	2-37
2.7	PEMBIAYAAN PERUMAHAN DI NEGARA LAINNYA	2-38
	2.7.1. PEMBIAYAAN DI THAILAND	2-38
	2.7.2. PEMBIAYAAN PERUMAHAN DI KOREA	2-40
	BAB 3 METODOLOGI KAJIAN	3-1
3.1	METODE PENDEKATAN	3-1
3.2	METODE KAJIAN	3-2
	3.2.1. METODE PELAKSANAAN	3-2
	3.2.2. JENIS, SUMBER, DAN PENGUMPULAN DATA	3-14
	BAB 4 KONDISI EKSISTING DAN HASIL SURVEY	4-1
4.1	LEMBAGA PEMBIAYAAN DANA JANGKA PANJANG PERUMAHAN	4-1
	4.1.1. BPJS KETENAGAKERJAAN	4-1
	4.1.2. BAPERTARUM_PNS	4-3
	4.1.3. PT TASPEN	4-17
	4.1.4. DANA HAJI	4-22
	4.1.6. PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)	4-26

4.1	GAMBARAN UMUM DAN HASIL SURVEY WILAYAH KAJIAN	4-39
	4.1.1. WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA	4-39
	4.2.3. WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR	4-67
	4.2.4. PROVINSI KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM	4-75
	4.2.5. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (BANJARMASIN)	4-77
	4.2.6. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	4-96
	4.2.6 PROVINSI SULAWESI SELATAN	4-108
	BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	5-1
5.1	TINJAUAN YURIDIS PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG UNTUK PEMBIAYAAN	5-1
	PERUMAHAN	
5.2	POTENSI DANA JANGKA PANJANG UNTUK PEMBIAYAAN PERUMAHAN	5-15
5.3	SIMULASI PENGELOLAAN DANA JANGKA PANJANG, SERTA KAJIAN HAMBATAN	5-18
	YANG TERKAIT DENGAN DANA JANGKA PANJANG	
5.5	ALTERNATIF PEMBIYAAN PERUMAHAN	5-30
	5.5.1. BANK TABUNGAN NEGARA	5-30
	5.5.2. BRI SYARIAH	5-34
	BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	6-1
6.1	KESIMPULAN	6-1
6.2	REKOMENDASI	6-2



1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 28 H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun sebagaimana kita ketahui sampai saat ini masih jauh dari yang kita harapkan. Walaupun rumah harus kita akui mempunyai peranan sangat penting sebagai tempat tinggal yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan persemaian budaya dalam menyiapkan generasi mendatang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.

Ketimpangan penyediaan perumahan di Indonesia terjadi baik dari sisi supply maupun demand. Tingginya permintaan tidak berbanding lurus dengan ketersediaan rumah. Faktor penyebabnya juga beragam. Mulai dari keterbatasan lahan, kebijakan yang masih kurang efektif, kemampuan pelaku usaha, serta mahalnya pasokan bahan baku menjadi aspek yang menghambat penyediaan rumah. Dari sisi permintaan, faktor pembiayaan yang terbatas menjadi kendala utama. Walaupun banyak bank di

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Indonesia menawarkan produk KPR, tetapi umumnya berbiaya tinggi karena tidak didukung oleh dana jangka panjang.

Dana jangka panjang saat ini yang dapat didayagunakan untuk pembiayaan perumahan adalah Dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, Dana BPJS, Dana Bapertarum-PNS dan Dana TWP TNI/POLRI. Program dana jangka panjang juga termasuk didalam program quick wins, panjang BPJS, Tabungan Haji, Dana Pensiun, untuk pembangunan perumahan dan permukiman.

Keberhasilan Pengelolaan Dana Jangka panjang akan menentukan terwujudnya pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebutuhan tersebut di akomodir melalui dana yang tersimpan di beberapa lembaga pengelola dana antara lain BPJS, Tabungan Haji, Dana Pensiun, Bapertarum-PNS dan TNI/POLRI melalui telaahan dan kajian besaran portofolio untuk digunakan dalam pembangunan perumahan. Dalam rangka hal tersebut maka dibutuhkan suatu Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 118 Ayat (1) Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan. Pasal 123 Ayat Pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b meliputi: a. dana masyarakat; b. dana tabungan perumahan termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas; dan/atau c. dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong pemberdayaan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan. Ayat (3) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalampengerahan dan pemupukan dana tabungan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

perumahan dan dana lainnya khusus untuk perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 124 Ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan Undang-Undang. Pasal 143 Setiap orang dilarang menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan perumahan selain untukpembiayaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk keberhasilan pengelolaan Dana Jangka Panjang yang menentukan terwujudnya pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyusunan materi teknis pendayagunaan sumber dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan.

b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun materi teknis pendayagunaan sumber dana panjang melalui dana yang tersimpan di beberapa lembaga pengelola dana antara lain Dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, Dana BPJS, Dana Bapertarum-PNS dan Dana TWP TNI/POLRI.

1.3. SASARAN

Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni dan/atau memiliki rumah layak huni yang mendapat bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

1.4. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Ruang Lingkup kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Melakukan diskusi dan wawancara serta survei untuk bahan penyusunan dokumen teknis pada substansi yang terkait.
- Penyusunan Draft Materi teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan .
- Melaksanakan FGD dengan jumlah peserta minimal 27 orang di Propinsi DKI Jakarta, untuk menyusun mekanisme pengelolaan Dana Jangka Panjang yang perlu disinkronisasikan dari stakeholders dan para pakar.
- Mensimulasikan pengelolaan Dana Jangka Panjang, serta mengkaji hambatan lainnya terkait Dana Jangka Panjang.
- Finalisasi Materi teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk
 Pembiayaan Perumahan
- Menyusun laporan kegiatan.

1.5. HASIL (OUTCOME)

Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan



2.1. KONSEP SUMBER DANA JANGKA PANJANG

Penyediaan perumahan di Indonesia memiliki persoalan yang cukup pelik,berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pembangunan perumahan.

Selama ini pengelolaan perumahan rakyat terkendala struktur kelembagaan dan finansial yang terbatas. Namun untuk masalah finansial relatif terselesaikan dengan adanya alokasi anggaran dalam APBN. Sedangkan struktur kelembagaan memang selama ini bidang perumahan rakyat dikelola oleh Kementerian yaitu hanya bersifat kordinatif langsung dibawah Presiden.

Pemerintah perlu didorong untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung wewenang Kemenpera, dalam hal ini pemerintah pusat harus dapat memberi

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

dukungan kepada penyediaan sarana perumahan (papan), yang merupakan satu kebutuhan dasar utama selain pangan dan sandang.

Hal yang menarik dari perubahan UUD 1945 adalah perubahan Pasal 34 Ayat (2), yang menyatakan "Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat.....", Ini merupakan kemauan politik untuk melaksanakan sistem jaminan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan pilihan itu berarti Indonesia telah memilih jalan sebagaimana ditempuh negara-negara lain, sehingga Indonesia harus mengikuti prinsip-prinsip yang bersifat universal dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan rakyatnya

Dalam konsep manajemen keuangan sumber dana atau pendanaan jangka panjang merupakan salah satu jenis pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan alternatif jenis pendanaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan pembelanjaan perusahaan. Jenis pendanaan jangka panjang yang umum kita kenal antara lain : Kredit Investasi, Hipotek (Mortgage), Obligasi, Saham.

Kredit investasi adalah merupakan alternatif pendanaan jangka panjang yang umumnya disediakan oleh kalangan perbankan selain kredit modal kerja (pendanaan jangka pendek) yang selama ini kita kenal. Obligasi merupakan surat tanda hutang, dan umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Oleh karenanya kalau perusahaan bangkrut, pemegang obligasi akan diperlakukan sebagai kreditur umum. Saham menunjukkan bukti kepemilikan, sedangkan obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan. Para pemegang saham mempunyai hak untuk memilih direksi perusahaan yang umumnya berlaku adalah "one share one vote " artinya satu saham memiliki satu suara.

Sedangkan Hipotek (mortgage) adalah merupakan alternatif pendanaan jangka panjang dalam bentuk hutang yang biasanya harus disertai dengan agunan berupa aktiva tidak bergerak "tanah, bangunan". Dalam hal terjadinya likuidasi perusahaan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

yang mempunyai hutang, maka kewajiban kreditur harus dipenuhi terlebih dahulu dari hasil penjualan aktiva yang dijadikan sebagai agunan tersebut.

Pembiayaan sekunder perumahan atau yang juga dikenal dengan istilah Secondary Mortgage Facility (SMF) adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk membeli suatu kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank kreditur yang kemudian tagihan ini dikemas dalam suatu efek hutang yang kemudian dijual kepada investor seperti misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun atapun investor perorangan.

Pembiayaan sekunder perumahan ini dilakukan dengan menggunakan suatu perusahaan khusus yaitu suatu perseroan terbatas yang ditunjuk oleh lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan sekunder perumahan yang khusus didirikan untuk membeli aset keuangan dan sekaligus menerbitkan Efek Beragun Aset (EBA).

SMF ini dikenal dan digunakan di beberapa negara Asia dan saat ini dikawasan Asia telah terdapat 3 buah perusahaan SMF yaitu Cagamas Berhad (Malaysia), Korea Mortgage Corporation (Korea) dan Hong Kong Mortgage Corporation (Hongkong. Dimana ketiga perusahaan tersebut telah berhasil memberikan kontribusi dalam peningkatan daya beli perumahan dengan menciptakan pasar sekunder pembiayaan perumahan yang dapat memperpanjang jangka waktu kredit serta ketersediaan dana kredit.

Di Asia, Asian Development Bank telah melakukan studi guna menciptakan pasar Mortgage-backed security ini yaitu di China, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Pakistan, Filipina dan Thailand

Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) ini seringkali menjadi kendala bagi perbankan dimana KPR adalah suatu bentuk kredit jangka panjang yang masa jatuh tempo pembayarannya antara 10 tahun hingga 30 tahun sedangkan dilain sisi sumber dana yang digunakan oleh bank dalam pembiayaan KPR adalah dana jangka pendek seperti tabungan, deposito, dan giro. Akibat ketidak seimbangan struktur ini maka bank enggan membiayai KPR. SMF dapat menjadi salah satu alternatif

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

pembiayaan yaitu dengan tersedianya pasar pendanaan KPR sekunder berupa Secondary Mortgage Facility (SMF). Di beberapa negara, SMF ini telah menjadi sumber dana jangka menengah dan panjang secara konsisten. Salah satu sumber pembiayaan jangka panjang untuk perumahan adalah menggunakan dana adalah dana yang dihimpun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ BPJS.

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, diantaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:

- a. kegotong-royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharakan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila tejadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

A. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TENAGA KERJA)

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

- B. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
- C. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI); dan
- D. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES),yang sekarang menjadi BPJS Kesehatan

Jenis program jaminan sosial meliputi :

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan hari tua;
- d. jaminan pensiun; dan
- e. jaminan kematian.

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun1981 dan program Asuransi Kesehatan (ASKES) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 yang bersifat wajib bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis Kemerdekaan/Veteran dana anggota keluarganya.

Berbagai program tersebut diatas baru mencakup sebagian kecil masyarakat. Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Disamping itu, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta.

2.2. PEMBIAYAAN PERUMAHAN

1) Regulasi kebijakan pembiayaan perumahan

Regulasi kebijakan pembaiyaan perumahan antara lain :

- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman.
 (Pasal 3 Jo 33 & Penjelasannya))
- Undag Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun (Pasal 12 dan 13).
- Peraturan pemerintah No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan keempat atas
 PP NO. 12 TAHUN 2004 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena
 Pajak tertentu Yang Bersifat Strategis Di bebaskan dari pengenaan PPN
- Perpres Nomor 19 tahun 2005 tentang Pembiayan Sekunder Perumahan (Secondary Morgate Facility/SMF).
- Kepres Nomor 14 tahun 1993 tentang Tabungan perumahan PNS sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 46 tahun 1994.
- Permenpera Nomor 05/ Permen/M/2006 tentang dukungan asuransi KPR/KPRS untuk pembangunan Rumah Sederhana Sehat.
- Kepmenkeu Nomor 132/KMK.914/1998 tentang perusahaan fasilitas pembiayan perumahan
- Permenpera Nomor 16 tahun 2008 tentang standar dan procedure pelaksanaan subsidi perumahan melalui KPR sarusuna bersubsidi.
- Permenpera Nomor 18 tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan subsidi perumahan melalui KPR bersubsidi.
- Permenpera Nomor 20 tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan subsidi perumahan melalui KPR/KPRS mikro bersubsidi.

- Permenpera Nomor 28 tahun 2008 tentang perubahan permenpera no. 4 tahun 2007 tentang pengadan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi KPR syariah bersubsidi.
- Permenpra Nomor3 Tahun 2007 tentang KPR bersubsidi.
- Permenpera Nomor 4 tahun 2007 tentang KPR syariah
- Permenpera Nomor 5 tahun 2007 tentang KPR /KPRS mikro bersubsidi.
- Permenpera Nomor 6 Tahun 2007 tentang KPR/KPRS mikro syariah bersubsidi.
- 2) Regulasi Pembiayaan Perumahan yang Terkait dengan SJSN

Regulasi pembiayaan perumahan yang terkait dengan SJSN antara lain:

- UUD 1945 (Pasal 28 H ayat 1.
- UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia (Pasal 40)
- UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional
- UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- PP Nomor 44 tahun 2008 tentang sususnan organisasi dan tata kerja tata cara pengangkatan persyaratan dan pemberhentian anggota Dewan Jamina Sosial Nasional.
- Kepres Nomor 110 tahun 2008 tentang pembentukan dewan Jaminan Sosial Nasional.
- Permenkokesra Nomor 36/Permenko/Kesra/X/2008 tentang organisasi dan tata kerja secretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.

2.2.1. KONSEP PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 menyatakan bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.

Pemerintah atau pemerintah daerah dapat menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Badan hukum pembiayaan bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam hal pembangunan dan pemilikan rumah umum dan swadaya, badan hukum pembiayaan wajib menjamin:

- a. Ketersediaan dana murah jangka panjang;
- b. Kemudahan dalam mendapatkan akses kredit atau pembiayaan; dan
- c. Keterjangkauan dalam membangun, memperbaiki, atau memiliki rumah.

Penugasan dan pembentukan badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balah satu konsep pembiayaan perumahan yang telah dilakukan oleh Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) adalah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memberikan kesempatan bagi MBR untuk memperoleh rumah dengan cicilan bunga rendah. Namun, berdasarkan hasil evaluasi kinerja kemenpera akhir tahun, Desember 2011, disebutkan bahwa program subsidi rumah melalui program FLPP masih tidak berjalan sukses karena banyak nasabah yang masih belum mampu membayar uang muka (DP) yang masih tinggi dan tidak signifikan dengan kenaikan penghasilan MBR. Selain itu, program tersebut juga belum menjawab untuk persoalan bagi penduduk yang tidak memiliki

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

penghasilan tetap per bulan. Walaupun program tersebut diperkirakan telah mampu menghemat dana APBN sebesar Rp 21 triliun hingga 2014.

Sudah saatnya pemerintah dan stakeholder yang terkait dengan penyediaan perumahan menerapkan strategi pembiayaan yang pro rakyat seluruh lapisan. Konsep pembiayaan pembangunan perumahan di negara tetangga yang dinilai berhasil adalah Singapura dengan membentuk Housing Development Board (HDB) yang memiliki akses penguasaan tanah murah serta mengontrol 65 persen supply rumah pangsa pasar menengah ke bawah. Selain itu, program Central Providence Fund (CPF) yang berhasil menghimpun dana lewat pemotongan gaji demi penyediaan perumahan dan terdapat penghimpunan dana bersama bagi pengusaha dan pengembang yang dapat diterapkan untuk Indonesia demi kepentingan rakyat bersama. Fenomena yang juga sering dijumpai di kota – kota besar Indonesia yaitu lahan tidur, dengan power pemerintah mungkin dapat memberi ketegasan bagi pengembang dalam mendukung prioritas persediaan lahan perumahan rakyat.

2.3. LEMBAGA PEMBIAYAAN

2.3.1. PEMBIAYAAN PERUMAHAN DI INDONESIA

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan semakin pentingnya kebutuhan rumah dalam rangka pemenuhan sarana kehidupan bagi masyarakat di suatu daerah. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman disebutkan bahwa rumah merupakan hunian dan sarana pembinaan keluarga. Untuk mendukung fungsi tersebut, diperlukan prasarana dan sarana lingkungan di sekitar rumah, sehingga kehidupan layak bagi penghuni di dalamnya dapat tercapai.

Meskipun berbagai arahan mengenai pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana telah ditetapkan, namun persediaan perumahan bagi rakyat belum seluruhnya terpenuhi, sekitar 5,9 juta atau 10,7 persen dari 55 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah. Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

kebutuhan rumah dari keluarga baru sekitar 820 ribu unit rumah. Angka-angka tersebut belum termasuk 3,1 juta keluarga atau 12,5 juta jiwa yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi inilah yang belum dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi kekurangan penyediaan perumahan pada tahun-tahun lalu dan tambahan permintaan setiap tahunnya.

 $oldsymbol{\Psi}$ i negara-negara maju, hal utama yang menentukan apakah suatu keluarga dapat memiliki rumah atau tidak umumnya adalah kemampuan meminjam dana untuk membiayai investasi perumahan. Pembiayaan formal untuk perumahan yaitu kredit pemilikan rumah (KPR atau biasa juga disebut mortgage loans) yang disediakan melalui institusi formal, memainkan peranan yang sangat penting dalam merealisasikan potensi kebutuhan rumah. Para pemberi pinjaman umumnya bersaing untuk menawarkan produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi klien. Sementara itu, di negara-negara berkembang dimana pembiayaan formal tidak selalu memainkan peranan penting, seringkali bukan menjadi perangkat utama untuk merealisasikan kebutuhan akan rumah. Pada umumnya orang membangun rumah secara bertahap dengan menggunakan tabungan atau pinjaman jangka pendek untuk mendapatkan unit rumah dengan kualitas minimum yang dapat diterima. Tanpa akses ke pembiayaan formal, rumah tangga yang ingin membeli rumah dengan kualitas yang baik dengan status tanah bersertifikat, harus menunggu sampai tabungan mereka mencukupi atau seringkali mereka meminjam dari sanak saudara, teman atau pengembang (pembayaran dengan cicilan).

Keadaan ini kemudian menggagas mengenai pemberian bantuan dan kemudahan oleh pemerintah/pemerintah daerah kepada masyarakat dalam membangun atau memiliki rumah sendiri. Bantuan dengan dana ini memunculkan konsep pembiayaan perumahan yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah, bank, atau swasta. Kajian mengenai preferensi masyarakat terhadap produk pinjaman untuk membeli rumah menjadi informasi yang penting untuk didapatkan, karena dengan informasi ini para penyedia pinjaman atau bantuan biaya untuk membeli rumah dapat mendesain bentuk pinjaman pemilikan rumah yang paling tepat dan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

yang paling memenuhi ekspektasi serta preferensi calon pembeli rumah. Hal ini dapat menarik minat masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni dengan harga terjangkau.

Sejalan dengan berkembangnya pasar perumahan, dilakukan upaya-upaya oleh pihak terkait dalam mengatasi kendala masyarakat untuk mendapatkan hunian. Salah satu upaya tersebut adalah dalam bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan. Pola pembiayaan ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk dapat membiayai huniannya sesuai dengan kemampuan keuangannya. Beberapa model pembiayaan yang telah berkembang di Indonesia (Novi, Wahyudin, 2008) adalah sebagai berikut:

a. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen – sederhana (KPA). Di Indonesia, kredit properti yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Rendah sering disebut sebagai Kredit ke Pemilikkan Rumah (KPR) dan KPA (kredit kePemilikan Apartemen (sederhana) - yang relatif baru dirintis beberapa tahun terakhir. Adanya kredit ini merupakan bagian dari usaha perbankan dan juga program Pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Menengah dalam memperoleh rumah/rumah bersusun (rusun). Agar harga rumah/rusun dan suku bunga pinjaman cukup rendah, maka Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat tertentu yang disalurkan melalui Bank Pemberi Pinjaman dalam bentuk bunga yang rendah atau uang muka rendah), dan juga memberi sejumlah fasilitas yang Kontraktor/Perusahaan Pengembang kawasan perumahan untuk menekan biaya perolehan tanah dan biaya pembangunannya. Tingkat suku bunga yang diterapkan pada kondisi saat ini sangat bervariasi yaitu ada yang fixed untuk waktu tertentu dan ada yang floating atau kombinasi dari keduanya. KPR di Indonesia nampaknya merupakan salah satu skema pembiayaan yang paling feasible serta applicable saat ini untuk golongan masyarakat berpenghasilan tertentu. Namun, skema ini belum tentu feasible untuk

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

mereka yang berpenghasilan rendah atau yang berpenghasilan tidak tetap. Hasil perhitungan/simulasi yang dilakukan pada beberapa kajian menunjukkan bahwa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah cukup sulit untuk dapat memenuhi skema KPR ini apabila subsidi bunga dicabut atau jika harga rumah tidak diturunkan. Pembiayaan secara kredit kepemilikkan rumah/apartemen ini mengambil porsi 10-20% dari sistem pembiayaan perumahan di Indonesia.

b. Kredit Mikro Perumahan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan Formal/Perbankan dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro telah ada dan tumbuh sejak 100 tahun yang lalu dan saat ini menjadi terbesar di dunia dalam jenis dan jumlahnya. Salah satu alasan utama Lembaga Keuangan Mikro dapat diterima dengan baik adalah karena kelebihannya dalam proses yaitu, untuk mendapatkan kredit jauh lebih sederhana dan tidak berbelit-belit jika dibandingkan dengan sistem perbankan. Selain itu ditunjang pula dengan lokasi usaha yang dekat dengan "konsumen"nya yakni sektor usaha kecil, mikro dan informal. Sistem dan jasa keuangan yang ditawarkan lebih "sesuai" dengan tatanan dan karakter sosial masyarakat menjadi salah satu alasan lainnya. Dengan kondisi demikian, maka masalah jaminan dalam sistem kredit mikro dapat didefinisikan lebih "luwes" dibandingkan dengan sistem perbankan. Faktorfaktor tersebut menjadi pertimbangan utama bagi nasabah Lembaga Keuangan Mikro. Tingkat suku bunga di lembaga ini memang relatif rendah jika dibandingkan dengan bank pada umumnya. Lembaga Keuangan Mikro sendiri, pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan yang berbentuk Bank, Koperasi dan Lainnya. Lembaga keuangan mikro inilah yang sekarang telah mulai memberikan kredit mikro untuk

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

pembangunan perumahan secara bertahap (housing micro finance). Penggunaan kredit mikro dari LKM ini umumnya untuk peningkatan kualitas hunian dengan masa pinjaman dibawah 5 tahun.

c. Pembiayaan Swadaya . Pembiayaan rumah swadaya adalah rumah yang dibangun oleh pemiliknya sendiri dan bukan oleh pengembang dengan cara pembangunan bertahap melalui swadana atau pinjaman (Bank/LKM) (Kedeputian Perumahan Swadaya, 18 Nop 2005). Pembangunan perumahan melalui pembiayaan sendiri/swadaya ini masih merupakan mayoritas di Indonesia karena mencakup hampir 80% dari program pembiayaan pembangunan perumahan di Indonesia. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pembiayaan Perumahan Pada dasarnya, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah, merupakan kewajiban pemerintah. Namun, adanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah, mengharuskan pemerintah 'menggandeng' pihak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan rumah (sederhana) layak huni, aman dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi, pihak swasta tetap perlu mencari keuntungan dalam usahanya, sehingga sekecil apapun biaya produksi dalam membangun rumah, akan dibebankan kepada konsumen (end user). Sebagai fasilitator dan regulator dalam penyediaan rumah layak huni khususnya di wilayah perkotaan, pemerintah harus dapat mengambil sikap bijak untuk tetap mengutamakan keterjangkauan harga rumah sederhana layak huni, aman, dan nyaman bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, namun dengan tetap memberikan 'ruang' keuntungan yang wajar bagi swasta sehingga mereka (swasta) tertarik untuk melakukan investasi di dalam penyediaan rumah sederhana layak huni tersebut. Setiap daerah mempunyai karakter, tantangan dan kemampuan yang berbeda-beda. Fungsi dan peranan pengaturan serta pengendalian pada umumnya dilakukan oleh pemerintahan yang paling dekat dan memahami kondisi masyarakat

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 (PP 38/2007) tentang Pembagian Urusan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 (PP 38/2007) tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana urusan perumahan merupakan urusan wajib daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk meningkatkan kualitas permukiman warganya dan mengintegrasikan pembangunan permukiman dengan perkembangan sifat kekotaan secara keseluruhan. Untuk itu pemerintah daerah harus memberikan pelayanan berupa fasilitas dan prasarana kota, serta berbagai regulasi untuk menjaga keadilan serta keseimbangan pelayanan dan fasilitas tersebut. Hal ini ditujukan pula untuk mendorong partisipasi warga dalam memelihara dan mengembangkan permukiman yang mereka huni.

Mayoritas rumah baru di perkotaan di Indonesia dibangun oleh kontraktor atau dibiayai oleh pemilik rumah dari tabungan mereka. Hanya sekitar 40 persen yang menerima subsidi . Banyak pemilik rumah menggunakan pinjaman jangka pendek untuk membiayai pembangunan rumah mereka dari lembaga pemberi pinjaman mikro.

Pembangunan rumah harus terus dilakukan berkaitan dengan kebutuhan nasional untuk perumahan baru. Adanya keterbatasan dalam pembangunan perumahan sementara kebutuhan meningkat, seringkali menyebabkan kualitas pelayanan dan infrastruktur menurun.

Cara memperluas akses ke pembiayaan perumahan untuk rumah tangga dari distribusi pendapatan: 1) Dengan efisiensi upaya untuk memperbaiki dan dengan memberikan subsidi progresif untuk rumah tangga di dengan subsidi, mengakses pinjaman hipotek untuk membangun rumah baru atau merenovasi yang sudah ada.

2) Memformalkan dan memperkuat pembiayaan mikro untuk perumahan untuk membantu rumahtangga yang memiliki untuk membangun rumah mereka sendiri.

Permasalahan yang timbul dalam pembiayaan perumahan

- 1) Ada kesenjangan serius dalam mengakses pembiayaan perumahan :
 - Kurangnya akses ke hipotek untuk rumah tangga layak kredit yang belum melayani.

Hanya 30 persen penerima tidak memiliki kesulitan mengakses pinjaman hipotek. Sektor ini ditujukan untuk memberikan berpenghasilan rendah yang memiliki masalah dalam memasuki pasar hipotek karena biaya transaksi yang tinggi dan risiko kredit kepada kreditur.

Kurangnya pembiayaan untuk perumahan yang terjangkau di pasar menghambat mobilitas ke atas di pasar perumahan formal.

Untuk mengatasi hal ini diharapkan

- Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum dan Departemen keuangan mengeksplorasi cara untuk menyediakan tabungan dengan subsidi khususnya bagi peminjam yang tidak memiliki penghasilan tetap.
- Memperbesar subsidi dimuka dengan tingkat yang mendekati margin bank(untuk rumah Rp75 juta dan di bawah); jika asuransi hipotek dapat dikembangkan maka dapat memperkuat keperacayaan untuk memudahkan akses peminjam.
- Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendukung program pembiayaan perumahan.
- Melanjutkan program subsidi perumahan yang telah diberlakukan saat ini.
- 2) Kurangnya pembiayaan sekunder jangka pendek, khusus pembiayaan perumahan untuk rumah tangga yang tidak memenuhi syarat untuk atau yang tidak menginginkan hipotek., sekitar 40 persen, atau lebih dari 300.000 dari total rumah tangga baru yang dibangun setiap tahun, tidak dapat

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

memenuhi syarat untuk pinjaman karena pendapatan rendah . Beberapa bank dan perusahaan pembiayaan dan lembaga mikro-kredit bisa menargetkan pasar ini. melalui penyediaan jaminan untuk sebagian dari pinjaman. Tapi masih sulit untuk lembaga asuransi untuk menjamin riiko yang mungkin timbul.

Untuk mengatasi hal ini diharapkan dapat

- Memberikan pelatihan tentang pembiayaan mikro perumahan dan memberikan dukungan teknis kepada koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya yang secara teknis masih belum terlalu kuat. lemah.
- Memberikan dukungan likuiditas untuk penyedia keuangan mikro fungsi yang dapat dilakukan oleh
- Mencari alternatif subsidi- subsidi unrtuk jaminan risiko dan asuransi kredit
- 2) Ada kelemahan yang mendasar dalam sistem hipotek yang perlu ditangani sebelum memperluas ke pasar:
 - Risiko kredit masih relative tinggi sebagian disebabkan oleh kurangnya informasi kredit dan mekanisme manajemen risiko kredit.sehingga diharapkan
 - BI memfasilitasi pembentukan itu lembaga pemberian pinjaman yang berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah
 - Menggalakkan adanya asuransi hipotek publik / swasta.
 - Bl mengatur perlindungan konsumen dan meningkatkan pendidikan konsumen.
 - Informasi Pasar perumahan yang tidak tersosialisasi dengan baik sehingga menciptakan inefisiensi. Sehingga diharapkan

Kementerian Perumahan dan / atau SMF mendirikan data base yang terintegrasi perumahan yang mencakup harga dan penilaian informasi, informasi tentang izin bangunan yang dikeluarkan dan transaksi untuk berbagai jenis rumah, mengkonsolidasikan informasi tentang pembiayaan perumahan, dll

3) Suksesnya Sekunder Mortgage

Pasar sekunder yang diterima masyarakat memberikan harapan bahwa pasar sekunder potensial unyuk dikembangkan.

2.3.2. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN.

Pada dasarnya, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah, merupakan kewajiban pemerintah. Namun, adanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah, mengharuskan pemerintah menggandeng' pihak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan rumah (sederhana) layak huni, aman dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi, pihak swasta tetap perlu mencari keuntungan dalam usahanya, sehingga sekecil apapun biaya produksi dalam membangun rumah, akan dibebankan kepada konsumen (end user).

1) BPJS Tenaga Kerja, Salah Satu Program Kepemilikan Rumah

Salah satu bentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang ada untuk para tenaga kerja yakni BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja dinilai memberikan manfaat yang cukup besar di masa mendatang melalui program kepemilikan rumah. Diharapkan sistem jaminan sosial yang baik dan kuat dapat menjamin kebutuhan dasar tersebut.". Program BPJS Tenaga Kerja aat ini jumlahnya masih relatif kecil, dan masa kepesertaan masih relatif pendek. Mayoritas masa kepesertaan BPJS Tenaga Kerja adalah kurang dari lima tahun dengan prosentase 53 persen atau sekitar 8,7 juta jiwa.

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) merupakan program BPJS Tenaga Kerja untuk pemenuhan kebutuhan perumahan. Kriteria peserta BPJS Tenaga Kerja untuk mendapatkan PUMP adalah peserta belum memiliki rumah sendiri, telah terdaftar menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja minimal 1 tahun atau direkomendasikan oleh Manajemen Perusahaan, memiliki Kartu Peserta BPJS Tenaga Kerja (KPJ), dan mendapatkan rekomendasi dari perusahaan untuk pengajuan PUMP. Untuk tipe rumah harus sepakat dengan pengembang termasuk lokasi, harga, besarnya uang muka KPR. jangka waktu maupun suku bunga KPR nya rumah. Rumah yang akan dikreditkan harus dinyatakan lulus oleh Bank pemberi KPR melalui bukti Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K).Dana PUMP diambil dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP) sebagai penyisihan keuntungan perusahaan (PT BPJS Tenaga Kerja). Selain itu dana dapat juga diambil dari pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) peserta untuk membayar uang muka KPR bersubsidi RSh. (Indopos,2010).

2) 4iutang dalam Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan

Sekarang ini dikenal sistem pembiayaan sekunder perumahan ("Secondary Mortgage Facility") yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dana dalam rangka kredit kepemilikan rumah bagi masyarakat, yang disalurkan melalui Bank pemberi KPR. Dengan adanya fasilitas pembiayaan ini, bank memiliki diversifikasi sumber dana, dimana dana yang digunakan untuk pemberian kredit, tidak semata — mata diperoleh melalui penghimpunan dana secara konvensional seperti tabungan, giro, atau deposito, melainkan dapat diperoleh dari perusahaan asuransi, dana pensiun ataupun investor perorangan yang tidak perlu menjadi nasabah bank tersebut.

Pengaturan mengenai sistem pembiayaan sekunder perumahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.014 Tahun 1998 ("Keputusan Menteri"). Pengertian fasilitas pembiayaan sekunder

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

perumahan menurut Keputusan Menteri adalah pinjaman jangka menengah atau panjang kepada bank yang memberikan kredit pemilikan rumah dengan jaminan berupa tagihan atas kredit pemilikan rumah dari hak tanggungan atas rumah dan tanah yang bersangkutan.

Pembiayaan dalam sistem ini melibatkan beberapa pihak yaitu penerima KPR ("Debitur"), Bank pemberi KPR ("Mortgage Lenders"), Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (telah dibentuk PT Sarana Multigiya Finansial yang secara khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sekunder) dan investor.

Merujuk pada Keputusan Menteri tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan mekanisme pembiayaan sebagai berikut :

Mortgage Lenders memberikan kredit kepada Debitur dengan jaminan tanah dan bangunan Debitur yang diikat dengan hak tanggungan. Tagihan atau hutang KPR tersebut kemudian dijaminkan oleh Mortgage Lenders kepada Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan ("PPSP"). Selanjutnya PPSP menjual tagihan KPR ini kepada investor dalam bentuk saham, obligasi atau surat berharga jangka pendek.

Pengalihan tagihan dari Mortgage Lenders kepada PPSP dapat dilakukan secara cessie, subrogasi atau novasi. Namun, dibanding subrogasi dan novasi, cara cessie lebih umum digunakan dalam pengalihan piutang karena relatif lebih aman dan efisien. Melalui cessie, hak tagih terhadap Debitur beralih kepada PPSP sebagai pihak ketiga, sehingga PPSP yang menerima pengalihan piutang tidak perlu mengadakan appraisal lagi terhadap Debitur yang bersangkutan, cukup mengandalkan appraisal yang digunakan kreditur sebelumnya untuk menjamin kapabilitas Debitur dalam melunasi hutangnya.

Berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang mengatur mengenai penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, maka pengalihan piutang dari Mortgage Lenders kepada PPSP

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

dapat dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, namun harus diberitahukan kepada Debitur. Apabila tanpa pemberitahuan, maka pengalihan piutang dari Mortgage Lenders kepada PPSP, tidak dapat mengikat Debitur.

Mengingat begitu banyaknya Debitur yang harus diberitahukan atau dimintakan persetujuan tertulisnya dalam hal pengalihan hutang oleh Mortgage Lenders, maka untuk efisiensi dan pengamanan hukum, umumnya pada perjanjian kredit antara Debitur dengan Mortgage Lenders diatur bahwa Debitur menyetujui bila sewaktu — waktu bank mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga, sehingga dikemudian hari tidak diperlukan lagi pemberitahuan dari bank atau persetujuan tertulis dari Debitur. Melalui klausula ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi PPSP dan daya tarik tersendiri bagi investor karena selain mekanisme pengalihan piutang itu telah didasarkan hukum, efek ini dijamin oleh jaminan berupa tanah dan bangunan yang dilekati hak tanggungan.(Lidwina, Halim,2009).

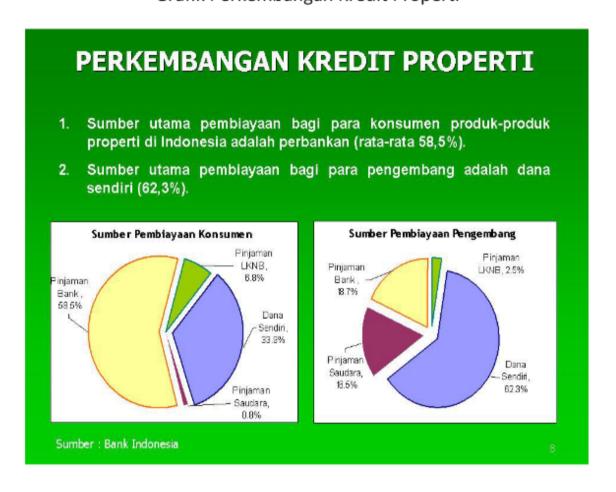
2.4. LEMBAGA PEMBIAYAAN MELALUI SJSN DI INDONESIA

Membengkaknya jumlah penduduk membuat semakin banyak masyarakat membutuhkan tempat tinggal atau rumah. Kenyatan ini mendorong pemerintah mencari berbagi terobosan guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.

Melalui program KPRS Mikro Bersubsisi yang melibatkan lembaga keuangan nonblank atau koperasi, pelayanan terhadap kelompok sasaran berhasil diperluas sehingga tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rndah di sector formal saja tetapi juga mayarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor informal yang biasanya tidak memiliki akses kredit karena berpendapatan tidak [asti, tidak mmpunyai slip gaji dan bahkan kebanyakan tidak memiliki tanah bersertifikat sehingga dipandang nonbankable.

Menpera, sejak tahun 2005 telah memberikan fasilitasi subsidi perumahan untuk kredit pembiayaan pembangunan/ perbaikan rumah secara swadaya bagi MBR melalui lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB)/ Koperasi baik yang menggunakan prinsip konvensional maupun syariah. Skim tersebut merupakan pilihan dari berbagai alternatif skim yang sudah dijalankan oleh Pemerintah khususnya untuk memfasilitasi MBR yang dianggap non-bankable oleh lembaga Keuangan Bank (LKB). Dengan demikian diharapkan akan lebih banyak lagi MBR yang dapat difasilitasi oleh subsidi perumahan, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya penyaluran subsidi perumahan dilakukan melalui lembaga Keuangan Bank (LKB).

Gambar 2.1.
Grafik Perkembangan Kredit Properti



Fasilitas subsidi perumahan tersebut bertujuan untuk membantu MBR atas sebagian biaya membangun/memperbaiki Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang pokok pembiayaannya disediakan oleh LKNB/Koperasi. Subsidi tersebut diberikan kepada MBR melalui LKB/LKNB/Koperasi yang telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan

Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Disamping itu, Menpera juga menghimbau kepada setiap kabupaten/ kota agar memiliki dinas atau kantor perumahan.

2.5. MEKANISME PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Strategi yang dapat digunakan untuk memahami kompleksitas masalah perumahan

adalah dengan beberapa pendekatan,antara lain:

a. Mengurangi biaya pengembangan real estat/perumahan

Pengurangan biaya konstruksi ,biaya, bunga, dll. Ketika investasi awal dapat

dikurangi maka akan berdampak pada pengurangan biaya yang ditanggung

konsumen. Metode yang paling efektif untuk mengurangi biaya adalah dengan

membangun atau merenovasi rumah sederhana dengan skala ekonomi

tertentu.,

b. Mengurangi biaya operasi rutin.

Dapat dilakukan dengan melakukan tawar-menawar tarif asuransi , ketetapan

pajak serta menekan biaya staf serendah mungkin,pengurangan konsumsi

energi dan biaya pemeliharaan.

c. Memberikan subsidi langsung untuk sewa atau biaya operasi

Ini dapat dilakukan untuk perumahan baru, renovasi atau perumahan yang

sudah ada. Didanai oleh pemerintah. Subsidi operasi perumahan rakyat

membantu rumah tangga penyewa berpenghasilan rendah

d. Menyediakan pembiayaan langsung untuk real estate/perumahan

Dalam rangka untuk memperoleh perumahan yang terjangkau, misalnya

pinjaman investasi dan hibah.

e. Memberikan insentif untuk pembiayaan.

BAB 2 - 22

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Ini termasuk asuransi publik atau hipotek, jaminan pinjaman, ketentuan pinjaman bebas pajak, subsidi bunga dan sejumlah perangkat lain yang dirancang untuk membuat pembiayaan lebih mudah atau lebih murah.

Mekanisme Keterjangkauan Pembiayaan Perumahan

Berikut ini adalah mekanisme pendanaan yang dapat digunakan untuk membiayai perumahan sederhana:

- a. On-Going Housing Subsidies:
 - Subsidi Sewa
 - Subsidi Operasional
- b. Project Financing Mechanism/Mekanisme Pembiayaan Proyek:
 - Market rate loans
 - · Below market rate loans
 - Project based grant
 - Deferred payment loans
 - Owner equity and equity syndication proceeds
 - · Lease purchase loans
- c. Inducement to Project Financing/ Mekanisme insentif Pembiayaan Poyek
 - Loan guarantees
 - Mortgage insurance
 - Interest subsidies
 - Tax Credit

Mekanisme pembiayaan proyek dapat dilakukan dalam empat cara:

a. Pre-development financing/pembiayaan pra-pengembangan

Pembiayaan awal biasanya dilakukan dengan perolehan hibah dan pinjaman murah, sementara biaya berisiko tinggi dibiayai oleh modal ventura.

b. Contruction Financing/pembiayaan konstruksi - kredit konstruksi dengan biaya

rendah dapat mengurangi biaya bunga

c. Permanen Financing/ pembiayaan permanen - Semua mekanisme pembiayaan

dilakukan, kecuali subsidi sewa dan subsidi operasi, yang hanya memiliki efek

tidak langsung pada pembiayaan permanen. Pembiayaan permanen non-

konvensional umumnya memiliki efek mengurangi utang pada proyek.

d. Rent subsidies and operating subsidies/subsidi Sewa dan subsidi operasional

Mekanisme ini meningkatkan aliran pendapatan proyek, atau memungkinkan

penghuni untuk tinggal dengan biaya yang lebih terjangkau.

Pada setiap tahap pengembangan proyek perumahan sederhana sering kali

digunakan kombinasi dari pendekatan mekanisme pembiayaan tersebut.

Peran "Inducements"

Mekanisme pembiayaan langsung seperti hibah, pinjaman bunga rendah dan

investasi ekuitas adalah salah satu alat paling penting yang tersedia untuk membuat

perumahan yang terjangkau. Namun tetap ada hambatan untuk pembiayaan

perumahan tersebut,

Sebagai contoh:

Seorang pengembang mungkin telah merencanakan proyek pembangunan

apartemen yang sangat baik, tapi pinjamannya masih ditolak karena

lingkungan di sekitar perumaham dianggap sebagai daerah dengan

kejahatan tinggi yang mungkin tidak menarik penyewa. Beberapa insentif

tambahan mungkin diperlukan untuk mendapatkan investasi ekuitas dan

pinjaman konvensional.

Jika uang muka yang ditetapkan relative tinggi dan sulit terjangkau oleh

masyarakat berpenghasilan rendah

BAB 2 - 24

Rent Subsidies/Subsidi Sewa

Dalam program subsidi sewa didanai pemerintah, penyewa hanya membayar 30 persen dari pendapatan mereka untuk sewa dan utilitas, sementara sisanya

disubsidi

Ada dua jenis subsidi sewa:

Tenant-based assistance/ bantuan berbasis Tenant,

Hal ini menggambarkan dimana subsidi tergantung kepada kondisi penyewa

yang fluktuatif pada akhir setiap periode sewa satu tahun.

Project – based assistance/Bantuan berbasis Proyek-

Bantuan proyek perumahan yang terjangkau khusus untuk periode 10 sampai 20

tahun. Subsidi digunakan untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan

berdampak pada meningkatnya rent project.

Subsidi sewa berdasarkan proyek-terbukti efektif tapi mahal untuk konstruksi atau

pemeliharaan perumahan yang terjangkau.

Operating Subsidies/Subsidi operasi

Subsidi operasi untuk perumahan rakyat adalah salah satu pengeluaran yang besar

pada perumahan sederhana yang dibayar untuk mendukung operasi, perbaikan,

program sosial, dll

Market Rate Loan/Pasar-Rate Pinjaman

Merupakan pinjaman yang ditawarkan oleh bank, lembaga keuangan dan

perusahaan hipotek untuk pembeli rumah dan investor di properti sewa.

Perusahaan asuransi dan dana pensiun publik juga dapat memberi pinjaman ke real

estate, tapi jarang untuk proyek-proyek perumahan sederhana, karena transaksi ini

biasanya terlalu kecil keuntungannya.

BAB 2 - 25

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Below Market Rate Loans

Kondisi ini dapat didefinisikan sebagai setiap pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari harga pasar yang berlaku, dengan mempertimbangkan faktor pasar dapat menjelaskan manfaat dan risiko transaksi yang bersangkutan.

Sumber dari pinjaman dana tersebut dapat diperoleh antara lain dari :

- Pinjaman langsung dengan bunga rendah dari instansi pemerintah –
- Pinjaman menggunakan sumber pemerintah melalui lembaga tertentu yang digunakan untuk membuat pinjaman bunga rendah.
- Hasil penjualan obligasi bebas pajak
- Kredit dengan jaminan pihak ke tiga
- Cadangan lembaga keuangan perumahan

Project Based Grant

Hibah berbasis proyek-digunakan untuk akuisisi, konstruksi atau renovasi perumahan sederhana.

Hibah berbasis proyek dari sumber pemerintah dan swasta digunakan untuk beberapa tujuan dalam industri perumahan sederhana. Contoh signifikan antara lain:

- Hibah kepada otoritas perumahan untuk membangun perumahan rakyat sewa rendah.
- Hibah untuk sebuah organisasi nirlaba untuk membangun:
 - tempat penampungan tunawisma.
 - apartemen untuk orang tua.
 - perumahan bagi penyandang cacat.

- Hibah untuk keluarga berpenghasilan rendah untuk merenovasi rumah mereka
- Hibah untuk berpenghasilan rendah rumah pembeli untuk bantuan uang muka

Deferred Payment Loan/Pinjaman Pembayaran yang ditangguhkan

Pinjaman konvensional, pinjaman pembayaran pokok sering ditangguhkan selama fase pengembangan proyek sekitar satu atau dua tahun sampai proyek dapat menghasilkan arus kas.

Dalam industri perumahan sederhana, berarti bahwa semua pembayaran pokok dan bunga ditangguhkan sampai penjualan kembali properti atau konversi ke penggunaan lain.

Pinjaman pembayaran ditangguhkan umumnya digunakan dalam tiga cara:

- Bantuan pembayaran uang muka untuk pembeli rumah berpenghasilan rendah
- Subsidi pembiayaan untuk sewa bagi pengembang proyek atau pembeli rumah
- Pinjaman renovasi untuk pemilik rumah berpenghasilan rendah

Owner Equity and Equity Syndication Proceeds

Equity dapat didefinisikan sebagai uang tunai atau sesuatu yang bernilai yang diberikan oleh pemilik untuk transaksi real estate yang melibatkan akuisisi, konstruksi atau refinancing. Misalnya, uang muka pembelian rumah, kesepakatan investor untuk membayar,nilai pasar tanah atau bangunan yang disediakan untuk kesepakatan adalah ekuitas.

Dalam industri real estate, semua pembiayaan dikelompokkan ke dalam dua kategori umum: utang dan ekuitas. Formula berikut ini menggambarkan bahwa equitas merupakan, selisih antara total biaya proyek dan pinjaman:

- Equity + debt= total financing
- Total Financing = Total Development Cost

Lease Purchase Loans/Pinjaman Sewa-Beli

Dalam program ini, sebuah badan pemerintah mengatur pembiayaan untuk rumah - apakah rumah yang akan dibangun, akan direnovasi atau hanya membeli untuk investasi.

Loans Guarantees/Jaminan Pinjaman

Merupakan janji seseorang atau badan untuk mengembalikan pinjaman . Penjamin mungkin

Mortgage Insurance

Dari titik pandang pemberi pinjaman, asuransi hipotek sangat mirip dengan jaminan pinjaman. Dengan asuransi hipotek, lembaga swasta atau publik bersedia sebagai penjamin.

Beberapa perbedaan dari jaminan pinjaman: (1) asuransi hipotek hampir tidak pernah dirancang secara individual, (2) risiko untuk penjamin yang lebih terbatas, dan (3) merupakan bisnis yang menghasilkan uang .

Interest Subsidies /Subsidi bunga

Subsidi bunga adalah pembayaran tunai untuk pemberi pinjaman dalam pemberian tingkat bunga yang lebih rendah.

subsidi tersebut, pada dasarnya, bunga prabayar dibayar pada saat pinjaman dilakukan an bulanan. Dalam industri perumahan sedrhana, subsidi bunga biasanya melibatkan pihak ketiga - biasanya sebuah badan pemerintah untuk membantu pemilik rumah berpenghasilan rendah.

Tax Credit.

Berdasarkan kebijakan tertentu , tersedia kredit pajak untuk investor yang bergerak pada sektor perumahan sedehana. Kredit pajak ini meningkatkan return

on equity bagi investor.

2.6. BENCHMARK : PEMBIAYAAN PERUMAHAN DI SINGAPURA

2.6.1. KEBUTUHAN AKAN PERUMAHAN LAYAK

Asia seperti juga Amerika latin dan Afrika adalh termasuk tempat konsentrasi penduduk miskin terbesar di dunia(Chapman et al 1999,Montgomery et al 2001),sekitar seperempat dari seluruh penduduk perkotaan hidup di bawah garis kemiskinan .Kurangnya akses perumahan merupakan salah satu konsekwensi paling serius dari masalah kemiskinan ini,padahal perumahan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas hidup .Hal ini seringkali tidak diperhatikan secara layak oleh pembuat keputusan. Masalah perumahan yang dapat diakses dengan mudah memerlukan kebijakan dari pihak pemerintah

Dewan Pengembangan Perumahan (HDB) didirikan pada tahun 1960 dan bertugas menyediakan Singapura dengan kualitas yang baik, perumahan yang terjangkau (HDB (2006)). HDB adalah hukum papan bawah Departemen Pembangunan Nasional dan sepenuhnya milik pemerintah dan memiliki jaminan pemerintah formal (Undang-Undang Perumahan dan Pembangunan). The HDB menyediakan pembiayaan perumahan untuk rendah dan rumah tangga berpendapatan menengah dengan tingkat bunga konsesi. Sebelum tahun 2003, itu juga memberikan pembiayaan perumahan dengan harga pasar untuk keluarga berpenghasilan tinggi. Dana lembaga pembiayaan perumahan pinjamannya dengan meminjam dari Singapura pemerintah dan dari bank, dan dengan menerbitkan obligasi

Berdasarkan penelitian Belinda Yuen (2008), kebijakan negara Singapura merupakan contoh sukses dalam mengatasi perumaham yang terjangkau oleh

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

masyarakatnya dan mengarah pada kesejahteraan masyarakat seperti hak atas perumahan yang layak 85% dari populasi penduduk Singapura tinggal di perumahan umun dan lebih dari 850.000 unit rumah di 23 kota kota baru telah dibangun,sementara masyarakat miskin di tempat tunawisma ,20%nya mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya perumahan

Singapura dengan tanah seluas 690 Km2 dan PDB per kapita USD 20.767 menduduki peringkat 25 di PBB untuk ideks pembangunan manusia dan hampir tidak ada penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun demikian dengan adanya masalah krisis global maka tetap ada sejumlah penduduk yang relatif miskin Sejumlah penduduk miskin meningkat di Singapura dengan penurunan ekonomi saat ini:. Skema bantuan umum yang dikelola oleh departemen pengembangan masyarakat Singapura, pemuda dan olahraga mengumumkan sekitar 170-300 orang di Singapura membuat rumah mereka di jalan-jalan setiap tahun. Sebanyak (50%) sudah tua (diatas 60 tahun) dan tidak punya keluarga, pekerjaan atau keterampilan. Yang lain ditinggalkan oleh keluarga mereka sendiri. Dalam satu laporan, departemen statistik Singapura telah merilis sebuah angka sekitar 4 persen dari populasi penduduk Singapura (atau 120.000) yang hidup pada atau mendekati garis kemiskinan

Definisi kemiskinan nasional tidak resmi yang diambil dari pendapatan kualifikasi kriteria dalam berbagai skema bantuan publik tampaknya untuk menutupi mereka yang hidup dengan kurang dari s \$ 10 per orang per hari.

Kemiskinan Singapura muncul sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Data kemiskinan dalam penilaian kemiskinan baru-baru ini (oleh headcounts kemiskinan perkotaan) untuk asia timur, misalnya, menunjukkan bahwa 16 persen di indonesia, 12 persen di filipina dan 9 persen pada penduduk perkotaan vietnam hidup dalam kemiskinan .

Data dari otoritas perumahan publik, Singapura dan pengembangan perumahan board (HDB), menunjukkan bahwa per des 2004, 37.823 rumah tangga tidak mampu membeli flat atau sewa rumah mereka sendiri di pasar terbuka dan diduduki

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

disubsidi 1 - dan 2 - sewa kamar flat publik di bawah skema sewa publik. Melalui hdb didirikan pada tahun 1960, perumahan disediakan di bawah perlindungan pemerintah untuk kebijakan semua. Seiring waktu, perumahan penuh sesak miskin kualitas dan massa perumahan swadaya sementara di permukiman liar unimproved telah semakin dibersihkan dan digantikan oleh akomodasi bertingkat tinggi dan fasilitas ditingkatkan di perumahan umum dan kota-kota baru. Dalam proses ini, sektor perumahan publik telah tumbuh menjadi sektor perumahan utama dan stok perumahan yang terjangkau di Singapura. Hal ini mendorong perumusan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi biaya perumahan dan mengurangi akses ke pemilik pendudukan di perumahan umum, bahkan bagi penduduk berpenghasilan rendah. Proporsi penduduk yang hidup di perumahan pemerintah telah meningkat menjadi 85% (sejak 1985), dengan sebagian besar (95%, atau hampir 3 juta orang) yang memiliki flat yang ditempatinya.Banyak keluarga miskin 10 persen dari rumah tangga di Singapura memiliki kekayaan yang signifikan dalam bentuk flat mereka dan membandingkannya dengan di negara-negara lain.

2.6.2. KEBIJAKAN PEMERINTAH (SINGAPURA)

Komitmen pemerintah untuk mensubsidi tiga layanan dasar perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan untuk membuat mereka terjangkau adalah landasan utama dari intervensi perumahan Singapura. Untuk memahami perumahan Singapura untuk semua pengembangan kebijakan, perlu meninjau secara singkat konteks pembangunan sosial dan perkotaan yang memberikan dorongan untuk kebijakan tersebut. Seperti banyak kota-kota lain, sebagai kota Singapura tumbuh dalam populasi, tekanan pada perumahan yang meningkat.

Dari 14.000 rumah baru per tahun, sektor swasta memiliki kapasitas untuk menyediakan beberapa 2.500 baru rumah setahun. Banyak dari tempat tinggal mereka akan tetapi pada tingkat harga diluar jangkauan keluarga berpenghasilan rendah. Dengan tidak adanya alternatif, beban persyaratan perumahan yang tersisa termasuk penampungan bagi masyarakat miskin harus jatuh pada pemerintah.

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Tantangannya adalah diambil oleh pemerintah yang baru terpilih, yang telah memenangkan pemilihan pada manifesto menyediakan lapangan kerja dan perumahan (dan telah terpilih kembali berkuasa sejak).

Tidak seperti banyak lainnya pemerintah dunia ketiga, yang cenderung bertin-dak atas perumahan sebagai masalah sosial dapat diatasi setelah pencapaian ke-majuan ekonomi, Singapura menganggap dua-duanya sama dan pentingnya sim-biosis. Dua lembaga hukum, dewan pengembangan ekonomi (edb) dan hdb segera didirikan dengan kerangka reformasi keuangan, hukum, dan institusi untuk mempro-mosikan penyediaan lapangan kerja pertumbuhan ekonomi dan perumahan masing-masing pada awal pemerintahan sendiri. Komplementer antara pekerjaan dan peru-mahan telah banyak tempat lain dikatakan menjadi faktor penting dalam kinerja lan-jutan politik pemerintah dan legitimasi Tujuan inti dari inisiatif sektor perumahan pu-blik adalah untuk membuat perumahan yang terjangkau dan dapat diakses untuk keluarga berpenghasilan rendah, yang sampai saat menderita dari tindakan diskriminatif. Sebagaimana diuraikan oleh menteri pembangunan nasional tahun 1959, Sebagian besar rumah akan menampung orang-orang dalam kelompok berpenghasilan rendah, yang tidak pernah dipedulikan di masa lalu. Pemerintah sebelumnya hanya peduli untuk kelompok kelas menengah, yang mampu membayar uang untuk mendapatkan flat. (the straits times, 19 sep 1959)

2.6.3. PERUMAHAN YANG TERJANGKAU DAN INKLUSIF

Penyediaan tempat hunian publik adalah tujuan pro-masyarakat miskin untuk memaksimalkan pilihan perumahan penduduk Singapura miskin sementara penjagaan terhadap pengecualian, eksploitasi, dan kondisi hidup sehat. Penting adalah kristalisasi dua fungsi dasar hdb yang telah menetapkan konteks untuk pengiriman perumahan yang layak dan perubahan dalam kondisi perumahan bagi masyarakat miskin:

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

- Menyediakan perumahan dengan konstruksi yang sehat dan desain yang baik untuk kelompok berpenghasilan rendah pada harga sewa yang mereka mampu.
- Mendorong demokrasi-memiliki properti di Singapura dan untuk memungkinkan warga Singapura dalam kelompok menengah penghasilan rendah untuk memiliki rumah mereka sendiri (hdb laporan tahunan 1964).

Yang pertama mengikuti filosofi tradisional: negara sebagai penyedia perumahan. Kedua memperkuat kepemilikan rumah dan membuka kemungkinan bagi negara untuk berperan sebagai fasilitator dan insinyur sosial. Berikut ini menggambarkan bagaimana fungsi-fungsi ini telah didukung oleh berbagai kebijakan perumahan dan intervensi yang berbeda untuk memungkinkan masyarakat miskin untuk memilih jenis perumahan dan dukungan yang paling tepat untuk mereka. Masyarakat miskin perkotaan berbeda latar belakang dan kebutuhan. Dengan demikian, kelompok yang berbeda dengan beberapa kebutuhan menurun dalam kategori pendapatan Berdasarkan komitmen pemerintah untuk mencapai tempat penampungan yang memadai untuk semua yang tidak mampu, kebijakan perumahan yang baik termasuk intervensi bersama dua dimensi yang luas: 1) fisik, dalam hal hunian dan persyaratan minimum fisik untuk unit perumahan untuk memperbaiki keadaan hidup dalam pembangunan kota secara keseluruhan negara dan 2) keuangan, untuk mengaktifkan akses perumahan dan keterjangkau.

Fundamental untuk perbaikan perumahan dan upgrade adalah penyediaan quality self yang terkandung dalam fungsional dan lingkungan perumahan yang indah. Titik pusat kebijakan adalah beberapa intervensi untuk perumahan direncanakan secara komprehensif dan, sejak tahun 1965, kota-kota baru dengan perbaikan layanan dan fasilitas. Untuk masing-masing fasilitas, standar perencanaan telah dikembangkan untuk memastikan bahwa lingkungan pelayanan yang berkualitas adalah dicapai dalam framework umum dari pertumbuhan dan modernisasi. Tren ini penahanan diri terhadap kota perumahan rakyat di mana anggota rumah tangga - terutama

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

berpenghasilan rendah - dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan dasar mereka di dalam kota baru: kerja, toko, sekolah, hiburan, olahraga dan rekreasi lainnya. Pembangunan di utama didasarkan pada kelengkapan dalam perumahan.

Pendekatan komprehensif. Sebagai otoritas perumahan nasional, HDB me-ngadopsi pendekatan yang komprehensif untuk mengamankan pembangunan peru-mahan sectorwide publik dalam kerangka pembangunan ekonomi dan perkotaan di negara itu. Dalam memperkuat efektifitas, rencana master HDB, mengembangkan dan mengelola (yang terakhir sampai pembentukan dewan kota pada tahun 1989) proses produksi-konsumsi seluruh kota perumahan rakyat dan semua tempat tinggal mereka unit dan infrastruktur. Pembangunan perumahan dan prasarana dikontrak untuk sektor swasta. Dengan memusatkan usaha perumahan umum di bawah otori-tas tunggal, Singapura telah dielakkan masalah umum duplikasi dan fragmentasi tugas, dan persaingan birokrasi yang terkait dengan implementasi multi-agen. Meskipun semakin dianjurkan oleh beberapa pakar perumahan), keleng-kapan terpusat memiliki tantangan.

Sebagai contoh, di bidang suplai perumahan, untuk membangun dengan mu-rah dan cepat, strategi standardisasi dengan membangun prototipe dan blok flat diadopsi. Selain itu, hdb menggunakan kontrak pasokan jangka panjang dan strategi pembelian massal untuk menjamin kelangsungan penyediaan bahan bangunan penting dengan harga stabil. Meskipun intervensi pembangunan pragmatis mungkin telah memfasilitasi pembangunan yang cepat dari unit hunian dan kota, standardisasi blok bangunan telah menyebabkan kritik cookie-cutter, townscapes monoton dari banyak pembangunan perumahan kota awal Buruk dan cacat pengerjaan bangunan itu masalah pada beberapa proyek cepat-dibangun awal yang menarik banyak keluhan, bahkan perdebatan di parlemen (misalnya retak di dinding dan langit-langit, fiting rendah, kerusakan lift sering). Belajar, memodifikasi dan inovasi, masalah dengan cepat diperbaiki dan reformasi diperkenalkan ke dalam siklus berikutnya perbaikan konstruksi. Kualitas pertimbangan diberikan lebih menekankan dengan penu-runan kekurangan perumahan.

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Melalui dewan-dewan kota, warga dapat terlibat dalam pengelolaan kota-kota mereka. Pengalaman hingga saat ini telah menunjukkan bahwa reformasi yang komprehensif terpusat perumahan sederhana adalah sesuatu regularized dan statis. Hal itu memerlukan kapasitas pemecahan masalah yang dinamis, suatu proses terus-menerus belajar dan memperbaiki kebijakan perumahan, dan beragam intervensi untuk mempengaruhi secara signifikan keluarga sasaran.

2.6.4. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Dalam upaya untuk menyediakan perumahan bukan hanya perumahan tetapi kondisi kehidupan yang baik dengan pelayanan yang lengkap, kota-kota Singapura yang baru telah mengambil bentuk pembangunan bertingkat tinggi, kepadatan tinggi. Menempati lahan perkiraan 650 ha, sebuah kota baru biasanya mengakomodasi populasi 250.000. Kepadatan kota yang dihasilkan baru (bruto) adalah unit hunian 92 per hektar di mana sekitar setengah dari tanah tersebut untuk pembangunan perumahan dan sisanya untuk fasilitas untuk mendukung sebuah lingkungan perumahan ditingkatkan.

Capstone dalam menyediaan infrastruktur dan perumahan adalah kebijakan negara akuisisi tanah wajib. Pentingnya kebijakan seperti tanah tidak bisa terlalu ditekankan. Di negara-negara berkembang, pelaksanaan perumahan negara sering terhambat oleh kekurangan atau tidak tersedianya tanah. Tanpa tanah, tidak akan ada perumahan. Tugas perakitan tanah dan izin dalam pembangunan perumahan jelas berat bahkan untuk ukuran Singapura. Untuk menggambarkan, pada tahun 1960, hanya 44 persen dari tanah di Singapura dimiliki oleh pemerintah sementara lebih dari 35 persen penduduk saat itu tinggal di pemukiman liar. Undang-undang yang efektif diterapkan untuk menjamin ketersediaan lahan tidak terbebani untuk menambah stok tanah negara.

Pada tahun 1966, undang-undang kolonial pada pembebasan tanah itu dicabut dan sebagai gantinya yang lebih luas perolehan tanah undang-undang disahkan.

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan undang-undang perolehan tanah direformasi, pemerintah dapat memperoleh apapun paksa tanah penggunaan pribadi dan komersial untuk kepentingan umum. Undang-undang menyediakan untuk pembayaran kompensasi, yang ditentukan oleh negara. Dalam menentukan tingkat pembayaran, tidak ada rekening diambil dari setiap nilai potensial untuk keperluan yang lebih intensif, hanya menggunakan yang sudah ada atau menggunakan dikategorikan dianggap, mana yang lebih rendah. Harga yang dibayar oleh hdb untuk tanah yang diakuisisi oleh karena itu biasanya jauh lebih rendah dari harga pasar. Pendekatan ini, digambarkan sebagai keras oleh beberapa sarjana perumahan (misalnya, chua, 1997), telah membantu pemerintah untuk menurunkan biaya penyediaan perumahan dan telah sangat membantu dalam tahap awal pengiriman perumahan. Hal ini juga furthered posisi dominan negara dalam pembangunan perkotaan Singapura - 85 persen tanah sekarang dalam kepemilikan negara (motha dan yuen, 1999) - dengan kontribusi ke 'tawanan' pasar perumahan publik ditawarkan sebagai manfaat pemukiman kembali.

Dalam menyediakan lingkungan perumahan yang lebih baik dari itu dari mana warga datang, kebijakan ini membantu meningkatkan daya tarik relokasi ke perumahan umum. Seperti yang ditanggung oleh survei penduduk awal pada kondisi sekarang dan masa lalu penyewa perumahan rakyat 'yang hidup dan statistik yang lebih baru di Singapura perumahan mobilitas masyarakat perumahan, ada tingkat tinggi secara konsisten penduduk kepuasan dengan hidup perumahan rakyat: 82,5 persen dari seluruh rumah tangga yang tinggal di perumahan umum telah mengindikasikan bahwa mereka akan puas untuk selalu hidup dalam flat (dewan perumahan dan pembangunan,

Dari awal, perumahan rakyat dipandang sebagai cara untuk menyediakan lingkungan hidup yang baik untuk kelompok pendapatan yang tidak mampu membayar biaya sewa atau membeli rumah pribadi. Pendekatan inklusif menempatkan kebutuhan, harapan dan gaya hidup penduduk yang di pusat pasokan perumahan dan diperlukan penyediaan perumahan yang lebih baik

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi perubahan preferensi konsumen. Pada hari ke-hari, hdb berkaitan dengan pengelolaan lahan dan perawatan untuk memastikan bahwa unit perumahan rakyat dan kota tidak berubah menjadi kumuh dari waktu ke waktu.

Untuk meningkatkan keterjangkauan, warga perumahan rakyat hanya membayar sebagian kecil dari biaya upgrade dan kadang-kadang tidak sama sekali, tergantung pada skema mereka terpilih. Rata-rata, sekitar 10-13 persen dari pengeluaran operasi hdb tahunan dihabiskan untuk upgrade dan perbaikan. 13 persen (\$ 565.000.000) dihabiskan di upgrade dan perbaikan karya Selain mempertahankan kualitas hidup, perbaikan rumah tua juga menawarkan alternatif untuk pembongkaran bangunan yang berkelanjutan yang memungkinkan warga untuk tetap tinggal di kota asing dan membangun masyarakat. Semua ini merupakan faktor penting dalam skor penduduk tinggi secara konsisten kepuasan publik-perumahan. Ada sejumlah studi menyimpulkan bahwa perbaikan perumahan rakyat Singapura telah selama bertahun-tahun menjadi dibandingkan dengan perumahan kelas menengah dan memperoleh penghargaan perumahan internasional, termasuk pbb world habitat award untuk 'inovatif dan sukses pemukiman manusia.

2.6.5. BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Perbaikan perumahan hanya relevan kepada orang miskin jika terjangkau Perumahan yang terjangkau tidak dapat diproduksi tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari daya penghasilan rumah tangga. Respon Singapura adalah sistem delivery perumahan inklusif yang mengakui berbagai kebutuhan sesuai pendapatan dan ukuran keluarga. Dari awal program ini, penekanannya pada ekspansi dalam memilih : bukan hanya satu tapi berbagai jenis dalam proporsi 30 per cent 1-room units, 40 per cent 2-room units and 30 per cent 3-room units yang ditawarkan. Perawatan diambil bahwa pelaksanaan pilihan perumahan tidak mengecualikan keluarga berpenghasilan rendah. Pertimbangan ini merupakan pusat keberhasilan sistem. Hal ini telah menghasilkan strategi pragmatis yang inklusif. Di

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

bidang perumahan yang terjangkau, strategi, adalah, sebagai kepala arsitek HDB, menjelaskan, pembangunan flat kecil untuk membiarkan di sewa rendah, meskipun umumnya dianggap bahwa suatu flat dua kamar harus menjadi standar minimum yang ideal untuk perumahan rakyat, karena realitas ekonomi kelas keluarga yang berpenghasilan rendah tidak mampu membeli flat dua kamar yang biaya sewa \$ 40 per bulan, ruang satu flat \$ 20 per sewa bulan diperkenalkan sebagai standar minimum perumahan rakyat untuk kelompok penghasilan terendah di Singapura. Diharapkan bahwa ketika posisi ekonomi masyarakat membaik, para penghuni rusun ini dinilai satu ruangan akhirnya dapat pindah ke dua atau tiga kamar flat sebuah survei mengungkapkan bahwa sewa rendah adalah kebijakan yang disengaja suatu 'pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat'

2.7. PEMBIAYAAN PERUMAHAN DI NEGARA LAINNYA

2.7.1. PEMBIAYAAN DI THAILAND

UN-HABITAT melakukan studi untuk mengevaluasi mekanisme pembiayaan Perumahan dalam sistem pembiayaan perumahan berpenghasilan rendah di Thailand.

Thailand memiliki populasi kumuh total 1.763.872, yang merupakan 3% dari total populasi.. Dari populasi kumuh total, mayoritas (62%) terkonsentrasi di Bangkok saja.

Kebijakan pembiayaan perumahan adalah diinisiasi awal tahun 1953 dengan mendirikan Bank Perumahan Pemerintah. Pada tahun 1972, National Housing Authority (NHA) didirikan. Sejak itu Bank tersebut telah menjadi bank perumahan . Sejak pertengahan 1980-an, Bank Perumahan Pemerintah telahmenjadi lembaga pembiyaan yang utama di di Thailand.

Lembaga keuangan Thailand dapat dibagi menjadi dua kategori: yaitu, lembaga perbankan dan non-perbankan lembaga, termasuk bank komersial, 18 cabang bank asing serta lima bank khusus (Bank Perumahan Pemerintah, Tabungan Pemerintah

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Bank (GSB) dan sejenisnya. Lembaga keuangan non perbankan terdiri perusahaan pembiayaan, penyalur kredit, perusahaan asuransi, perusahaan manajemen reksa dana dan sebagainya Namun, lembaga-lembaga keuangan besar yang menawarkan kredit untuk kredit perumahan, terdiri dari semua bank umum dan dua bank khusus:. yaitu, Bank Perumahan Pemerintah dan Bank Tabungan Pemerintah.

Government Housing Bank adalah bank pembiayaan perumahan primer di Thailand yang memiliki 107 kantor cabang utama, 29 kantor cabang di Bangkok dan provinsi yang berdekatan dan 78 cabang di wilayah provinsi. Ia juga memiliki 38 sub-cabang dan 10 counter layanan keuangan di seluruh Thailand. GHB enawarkan pinjaman hipotek perumahan serta pinjaman untuk pembangunan perumahan, renovasi rumah. Government Housing Bank dan Government Saving Bank adalah perusahaan publik yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah Thailand. Namun demikian ada pula lembaga pembiayaan dari bank komersial, yang memiliki layanan skala penuh untuk pembiayaan perumahan Secara keseluruhan, bank-bank komersial hanya memberikan sekitar 10,3% untuk kredit perumahan. Sementara bank asing hanya menyalurkan sekitar 0,2% kredit perumahan hal ini juga terkait dengan adnya pembatasan peran bank asing di Thailand.

SMC merupakan pasar pembiayaan sekunder didirikan pada tahun 1998 dan itu merupakan pembiayaan sekunder perumahan tunggal di Thailand. Namun pembiayaan sekunder ini belum berhasil seperti yang diharapkan. Pasar pembiayaan sekunder perumahan di Thailand melalui SMC, saat ini masih menghadapi kendala. Pemerintah menggunakan Government Housing Bank dan Government Saving Bank sebagai lembaga utama dalam penyediaan pembiayaan perumahan kepada masyarakat.

Pada kasus pembiayaan perumahan di Thailand,ada beberapa cara di mana untuk membangun sistem pembiayaan perumahan yang efektif yaitu:

 Subsidi Langsung: yang dapat membantu kelompok berpenghasilan rendah membeli rumah murah.

- Subsidi melalui sistem keuangan: Pemerintah menetapkan dana atau bank pemerintah yang menawarkan pinjaman pada tingkat bunga rendah.
- Subsidi pajak; Sistem ini berlaku untuk diskon atau pembebasan pajak.
- Tabungan dan Bonus: Untuk mendorong orang untuk menyimpan uang dengan pandangan untuk membeli rumah, pemerintah menetapkan program tersebut untuk mendorong menabung untuk uang muka.
- Memanfaatkan kawasan kumuh: Sebagian kawasan kumuh di Bangkok terletak di wilayah dalam kota. Banyak dari mereka berada di Central Business District (CBD). Tanah di kawasan tersebut bernilai relative tinggi yang dapat digunakan kegiatan komersial, sementara penghuni kawasan kumuh direlokasi di tempat yang lebih cocok.

2.7.2. PEMBIAYAN PERUMAHAN DI KOREA

Korea telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir. Setelah Krisis Keuangan, Korea mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara Asia Timur. Reformasi menurut para ekonom telah menstrukturisasi ekonomi, meningkatkan transparansi dan efisiensi . Sebagian besar pasar keuangan, telah diliberalisasi,banyak peraturan yang menghambat telah dihapus. restrukturisasi dibuat sedemikian rupa agar tidak mengurangi memberi dampak negatif.

Harga rumah ditentukan oleh dua kekuatan: penawaran dan permintaan. Pasokan perumahan tidak elastis dalam jangka pendek.. Permintaan perumahan telah meningkat dengan meningkatnya pendapatan dan pertumbuhan penduduk di Korea. Pada tahap awal pembangunan ekonomi sumber daya ekonomi yang tidak cukup dialokasikan untuk sektor perumahan.

Sistem pembiayaan perumahan secara efektif berfungsi dapat berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan perumahan. Malpezzi (1999, b) memberikan bukti dari

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

penelitian sebelumnya, yang menunjukkan manfaat dari sistem pembiayaan perumahan yang efektif. Doms dan Krainer (2007) memberikan bukti empiris barubaru ini bahwa inovasi di pasar hipotek membantu, khususnya, muda dan dibatasi finansial rumah tangga untuk meningkatkan pengeluaran perumahan mereka. Chiquier et al. (2004) berpendapat juga bahwa keterjangkauan perumahan dapat ditingkatkan dengan pengenalan sekuritas hipotek. Chung (2004) menemukan bukti empiris ini di Korea.

Pasar hipotek memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar (Kim & Kim, 2002). Rasio utang hipotek terhadap Produk Domestik Bruto di Korea masih kecil itu di banyak negara lain . Rasio di Korea adalah 26,6 persen dan rasio rata-rata di 43 negara yang dipilih adalah 32,8 persen. Rasio di Amerika Serikat adalah 75,0 persen dan Jepang adalah 43,7 persen. Selain itu, menurut Almeida et al (2006: 330), Korea memiliki loan value ratio terendah.

Rata-rata rasio Loan Value Ratio untuk hipotik berasal oleh bank adalah 47,9 persen. (Kim& Kim, 2002). Hanya dan Ebner (2006) menemukan bahwa rata-rata rasio Loan Value Ratio untuk delapan negara Eropa yang dipilih adalah 80 persen.

Asuransi hipotek diperkenalkan pada tahun 2007 dengan dikelola oleh Corporation Housing Finance of Korean. Komisi Pengawas Keuangan dan lembaga keuangan menerbitkan buku pegangan hipotek, yang beredar di cabang lembaga keuangan atau di World Wide Web. Ini berisi daftar untuk peminjam dan fakta-fakta kunci dan ditulis dalam bahasa yang sederhana. Isi utama adalah sebagai berikut:

- Pendapatan dan jumlah pinjaman
- Metode memilih produk KPR yang optimal
- · Pertimbangan utama dalam negosiasi pinjaman
- Pilihan rencana tingkat bunga (adjustable-rate, suku bunga tetap, campuran-rate)
- Deskripsi produk KPR

- Memilih produk hipotek menggunakan Handbook of Mortgages
- Keuntungan dan kerugian dari pinjaman diamortisasi dan pinjaman peluru
- Menentukan pembayaran hipotek
- Biaya hipotek dan denda
- Produk hipotek terkait dengan asuransi
- Mengelola risiko tak terduga dari pengangguran atau tingkat bunga yang tinggi.

Dana Perumahan Nasional harus memperkuat peran di pasar pembiayaan perumahann (Yoon, 2005). Misalnya, National Budget Office Majelis (2006) menunjukkan peran aktif di pasar untuk rumah tangga yang tidak mampu pinjaman rumah. Kim dan Kim (2002) menekankan dukungan langsung dari Dana Perumahan Nasional bagi subsidi sewa dan pembangunan rumah sewa. Kim (2005) menunjukkan bahwa Dana Perumahan Nasional fokus pada pasokan perumahan sewa (bukan untuk dijual perumahan) untuk kelompok berpenghasilan rendah dan mengusulkan untuk warga senior. pendekatan semacam itu telah menuai kritik, seperti Dana-Perumahan Nasional operasi yang sangat bergantung pada ekonomi nasional-yang sangat sering digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan ekonomi (Yoon, 2005).

Korea Perumahan Finance Corporation adalah 100 persen dibiayai oleh masyarakat dan secara eksplisit didukung oleh pemerintah. Pemerintah mengakui peran terbatas dimainkan oleh apa yang sebelumnya badan swasta. Meskipun demikian, volume bisnis yang dilakukan oleh Korea Perumahan Finance Corporation jauh lebih rendah daripada yang diantisipasi. Tantangan yang paling signifikan tampaknya bahwa lembaga keuangan seperti bank komersial bersaing di pasar hipotek. Meskipun demikian, pembentukan Korea Financing Finance Corporation dapat menghasilkan efek positif. Misalnya, spread lebih rendah dari kompetisi dapat diterjemahkan ke dalam manfaat tidak langsung bagi peminjam. Di pasar obligasi,

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Korea Perumahan Finance Corporation menerbitkan obligasi pertama jatuh tempo 20 tahun. The Housing Financing Credit Guarantee merupakan dana Jaminan yang dioperasikan dan dikelola oleh Korean Housing Finance Corporation.

Perkembangan pasar pembiayaan proyek harus meningkatkan arus masuk modal ke proyek-proyek konstruksi (Lee & Jung, 2004). Pinjaman untuk proyek-proyek real estate merupakan aset yang mendasari sangat populer di pasar Beragun Aset Keamanan. Saham mereka dari pasar Beragun Aset Keamanan yang 17,0 persen dan 25,4 persen, masing-masing. Pemain di pasar perumahan akan mendapat manfaat dari modal baru datang dari pasar keuangan. Peningkatan keterampilan manajemen risiko yang tetap diperlukan.

Perkembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan akan menguntungkan peminjam hipotek. Perkembangan manfaat pasar sekunder . Chiquier et al. (2004) menunjukkan bahwa, di negara berkembang, pemberi pinjaman dapat dibatasi dalam hal keuangan dan likuiditas. Tanpa kemampuan dan pasar modal yang matang, pengembangan pasar sekunder akan sangat terbatas.



3.1. METODE PENDEKATAN

Pendekatan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang Untuk Pembiayaan Perumahan dalam upaya mencapai kesempurnaan hasil kajian yang berhasil guna dan berdaya guna sehingga dapat menjadi bahan perimbangan dan acuan bagi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka di dalam pelaksanaannya dilakukan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- Pendekatan instansional yang dilakukan untuk memperoleh data-data dan informasi sekunder yang dilanjutkan dengan koordinasi dan konsultasi serta pembahasan Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang Untuk Pembiayaan Perumahan.
- 2) Pendekatan kepustakaan yang dilakukan melalui kajian literatur (desk study) yang memuat ketentuan baik yang bersifat peraturan dan perundang-undangan, kebijaksanaan, hasil studi penelitian, dan pemikiran/konsep lain yang terkait.

3.2. METODOLOGI KAJIAN

3.2.1. METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipergunakan dalam studi ini adalah Metode Deskriptif Komparatif dan Verifikatif. Teknik studi menggunakan 3 pendekatan, yaitu:

1) Studi pustaka (Desk Study)

Desk study dilakukan dengan studi literatur untuk menghimpun seluruh data sekunder yang dibutuhkan sebagai data dan informasi dasar yang komprehensif untuk menyusun rencana strategis yang dapat diandalkan

2) Meta Analysis

Trend terkini dari penelitian sintesis adalah melakukan analisis terhadap sebuah analisis yang telah ada sebelumnya, yaitu penelitian-penelitian terdahulu. Metode ini disebut meta analysis

Meta-analysis lebih tidak bersifat subjektif dibandingkan dengan metode tinjauan lain. Meta analysis tidak fokus pada kesimpulan yang didapat pada berbagai studi, melainkan fokus pada data, seperti melakukan operasi pada variabel- variabel, besarnya ukuran efek, dan ukuran sampel. Untuk mensintesis literatur riset, meta-analysis statistikal menggunakan hasil akhir dari studi-studi yang serupa seperti ukuran efek, atau besarnya efek. Fokus pada ukuran efek dari penemuan empiris ini merupakan keunggulan meta-analysis dibandingkan dengan metode tinjauan literatur lain.

Meta-analysis memungkinkan adanya pengkombinasian hasil-hasil yang beragam dan memperhatikan ukuran sampel relatif dan ukuran efek. Hasil dari tinjauan ini akurat mengingat jangkauan analisis ini yang sangat luas dan analisis yang terpusat. Meta-analysis juga menyediakan jawaban terhadap masalah yang diperdebatkan karena adanya konflik dalam penemuan-penemuan beragam studi serupa.

Beberapa pengertian Meta Analysis yang dikemukakan oleh ahli:

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Meta analisis merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak serta menerapkan metode statistik dengan mempraktekkannya dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lainnya (Glass, 1981). Dengan kata lain, meta analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik dari beberapa hasil penelitian untuk angka-angka dan metode mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data yang diperoleh, sehingga mendekati kekomprehensifan dengan maksudmaksudlainnya.Salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan meta analisis adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis.

Meta analisis adalah suatu analisis integratif sekunder dengan menerapkan prosedur statistik terhadap hasil-hasil pengujian hipotesis penelitian. Menurut Glass (1981), analisis sekunder itu merupakan analisis ulang (reanalysis) terhadap data untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian dengan teknik-teknik statistik yang lebih baik atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baru dengan data lama yang dimiliki. Analisis sekunder merupakan suatu ciri-ciri penting terhadap riset dan kegiatan evaluasi.Soekamto (1988) mengatakan bahwa sifat meta analisis antara lain kuantitatif, dan memakai analisis statistik untuk memperoleh seri informasi yang berasal dari sejumlah data dari penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut Borg (1983) bahwa, meta analisis merupakan teknik pengembangan paling baru untuk menolong peneliti menemukan kekonsistenan atau ketidakkonsistenan dalam pengkajian hasil silang dari hasil penelitian.

Meta-analisis merupakan studi dengan cara menganalisis data yang berasal dari studi primer. Hasil analisis studi primer dipakai sebagai dasar untuk menerima atau mendukung hipotesis, menolak/menggugurkan hipotesis yang diajukan oleh beberapa peneliti(Sugiyanto,2004). Lebih lanjut dikatakan oleh Sutjipto (1995) bahwa meta-analisis adalah salah satu upaya untuk merangkum berbagai hasil penelitian secara kuantitatif. Dengan kata lain, meta-analisis sebagai suatu teknik ditujukan untuk menganalisis kembali hasil-hasil penelitian yang diolah secara

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

statistik berdasarkan pengumpulan data primer. Hal ini dilakukan untuk mengkaji keajegan atau ketidakjegan hasil penelitian yang disebabkan semakin banyaknya replikasi atau verifikasi penelitian, yang sering kali justru memperbesar terjadinya variasi hasil penelitian.

Dalam meta analisis semua kajian dengan bukti yang tersedia dihubungkan dengan pertanyaan penyelidikan yang dilibatkan, tanpa memperhatikan kualitas (ini merupakan salah satu kelemahan meta analisis). Glass mempertimbangkan pendekatan tersebut dengan menjelaskan bahwa secara metodologi, kajian tersebut seringkali melaporkan hasil-hasil yang sama untuk menemukannya di dalam kajian-kajian yang lebih tegas, dengan mengkombinasikan seluruh hasil kajian, yakni hasil yang dapat diterima dan yang lebih dapat dipercaya.

Kelebihan meta analysis

- Lebih sedikit subjektivitas dan judgement
- Aarena merupakan pendekatan kuantitatif, maka banyak mengambil sampel,sehingga hasil bisa lebih representatif. Hasil akhirnya dinamakan "effect size".
- Meta-analysis memungkinkan mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.
- Metode ini fokus pada pengakumulasian impact dari hasil-hasil yang tidak signifikan sehingga bisa menghasilkan suatu hasil yang signifikan.
- Metode ini juga dapat menjwab pertanyaan seputar kesenjangan hasil yang terjadi dari studi yang bermacam-macam.
- Pada penelitian bidang bisnis, Meta-analysis membuat organizational behaviour yang baik.

Kekurangan meta analysis

- Karena banyaknya sampel yang diambil, maka kemungkinan akan terjadi/memiliki sampel –sampel yang bias serta data-data yang tidak perlu (sampah).
- Meta-analysis seringkali membuat hasil yang dipublikasikan hanya yang signifikan saja,sedangkan yang tidak signifikan tidak dipublikasikan.
- Metode bersifat meng-aggregat-kan serta merata-ratakan sesuatu. Jadi sesuatu yang berbeda bisa jadi dipandang sama oleh metode ini.
- Metode ini tidak cocok diterapkan bila sampel datanya kecil.
- Bisa saja terjadi metodological error.

Penelitian meta analisis ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder berupa data-data dari hasil penelitian sebelumnya Dengan demikian penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian yang bersifat ex post facto yang berbentuk survey dan analisis kepustakaan terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

3) Pendekatan Focus Group Discussion (FGD)

Istilah kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai Focus Group Discussion (FGD) saat ini sangat populer dan banyak digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian sosial. Pengambilan data kualitatif melalui FGD dikenal luas karena kelebihannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh responden/pesertanya.

Focus group discussion yang lebih terkenal dengan singkatannya FGD merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain teknik wawancara. FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8-12 orang, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator.

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Irwanto (2006:1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

Sebagai sebuah metode penelitian, maka FGD adalah sebuah upaya yang sistematis dalam pengumpulan data dan informasi. Sebagaimana makna dari Focused Group Discussion, maka terdapat 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- Diskusi bukan wawancara atau obrolan
- Kelompok bukan individual
- Terfokus bukan bebas

Dengan demikian, FGD berarti suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

Dalam pelaksanaan FGD dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para nara sumber di suatu tempat dan dibantu dengan seseorang yang memfasilitatorkan pembahasan mengenai suatu masalah dalam diskusi tersebut. Orang tersebut disebut dengan moderator.

Permasalahan yang dibahas dalam FGD sangat spesifik karena untuk memenuhi tujuan yang sudah jelas. Oleh karena itu, pertanyaan yang disusun dan diajukan kepada para peserta FGD jelas dan spesifik.Banyak orang berpendapat bahwa FGD dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Artinya, diskusi yang dilakukan ditujukan untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu mengenai suatu permasalahan yang dihadapi oleh para peserta. Hasil FGD tidak bisa dipakai untuk melakukan generalisasi karena FGD memang tidak bertujuan menggambarkan (representasi) suara masyarakat. Meski demikian, arti penting FGD bukan terletak pada hasil representasi populasi, tetapi pada kedalaman informasinya. Lewat FGD, peneliti bisa mengetahui alasan, motivasi, argumentasi atau dasar dari pendapat

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

seseorang atau kelompok. Dengan kata lain bahwa hasil FGD tidak bisa dijadikan patokan dalam mengambil kesimpulan dari hasil penelitian. Hal ini harus ditambahkan dengan data pendukung lain atau melakukan suvei lanjutan (kuantitaif)

Persiapan dan Desain Rancangan FGD

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para peserta FGD, diperlukan persiapan dan desain rancangan FGD yang baik sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan serta permasalahan yang telah disepakati bersama. Adapun persiapan tersebut sebagai berikut:

Membentuk Tim

Tim FGD umumnya mencakup: Moderator, Asisten Moderator/co-Pencatat Proses/Notulen, Penghubung Peserta, Penyedia Logistik, Dokumentasi, Lain-lain jika diperlukan (tentatif)

- b. Memilih dan mengatur tempat
- c. Menyiapkan Logistik



Jumlah Peserta

Dalam FGD, jumlah perserta menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Menurut beberapa literatur tentang FGD (lihat misalnya Sawson, Manderson & Tallo, 1993; Irwanto, 2006; dan Morgan D.L, 1998) jumlah yang ideal adalah 7 -11 orang, namun ada juga yang menyarankan jumlah peserta FGD lebih kecil, yaitu 4-7 orang (Koentjoro, 2005: 7) atau 6-8 orang (Krueger & Casey, 2000: 4). Terlalu sedikit tidak memberikan variasi yang menarik, dan terlalu banyak akan mengurangi kesempatan masingmasing peserta untuk memberikan sumbangan pikiran yang mendalam. Jumlah peserta dapat dikurangi atau ditambah tergantung dari tujuan penelitian dan fasilitas yang ada.

e. Rekruitment Peserta: Homogen atau Heterogen

- f. Tekait dengan homogenitas atau heterogenitas peserta FGD
- Menyusun Pertanyaan FGD g.
- Pelaksanaan FGD

Pedoman FGD "Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang"

Dalam rangka kegiatan pengkajian Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , diperlukan kegiatan konsultasi dengan stakeholders dan oara pakar certempat di DKi Jakarta. Kegiatan konsultasi akan dilakukan dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion).

Tujuan utama dari FGD ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang situasi dan kondisi existing mekanisme pendanaan jangka panjang yang ada saat ini. Secara khusus, FGD ini ditujukan untuk mengetahui :

- Menemu-kenali secara tepat dan akurat pengelolaan dana jangka Panjang untuk pembiayaan perumahan.
- Memperoleh kondisi eksisting mekanisme pendanaan jangka panjang untuk pembiayaan perumahan,
- Melakukan singkronisasi dengan stakeholders dan para pakar mengenai mekanisme pendanaan jangka panjang untuk perumahan
- Memperoleh mapping potensi dan hambatan lainnya yang terkait dengan Dana Jangka Panjang untuk pembiayaan perumahan.
- Memperoleh data kondisi exsisting mengenai kebijakan pemerintah dalam sektor perumahan di Indonesia.
- Memperoleh data Model dan mekanisme pembiayaan jangka panjang untuk pembiayaan perumahan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan FGD ini adalah:

- Adanya informasi pengelolaan dana jangka Panjang untuk pembiayaan perumahan.
- Adanya informasi kondisi exsisting mengenai kebijakan pemerintah dalam sektor perumahan di Indonesia
- Adanya informasi tentang mapping potensi dan hambatan lainnya yang terkait dengan Dana Jangka Panjang untuk pembiayaan perumahan
- Adanya informasi kondisi eksisting mekanisme pendanaan jangka panjang untuk pembiayaan perumahan.
- Adanya masukan dan saran dari hasil singkronisasi dengan stakeholders dan para pakar mengenai mekanisme pendanaan jangka panjang untuk perumahan.
- Adanya informasi, tentang usulan Model dan mekanisme pembiayaan jangka panjang untuk pembiayaan perumahan.

Proses FGD difasilitasi oleh seorang tenaga ahli dan Tim perwakilan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah ditunjuk yang memiliki pengalaman sejenis dan terkait dengan Program. Tenaga ahli dan perwakilan setempat mempunyai tugas utama untuk memandu kelompok diskusi agar proses FGD berjalan dengan baik.

Dalam konteks kegiatan ini, fasilitator harus sabar dan piawai dalam memandu peserta FGD agar tetap fokus dalam pembahasan yang sesuai tema yang ditentukan, yaitu mencari informasi, pendapat dan masukan dari pemangku kepentingan yang mengerti permasalahan dan alternatif solusi dalam menunjang tujuan dari kegiatan ini, yaitu dalam kegiatan Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang.

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Pengorganisasian pelaksanaan FGD

Pelaksanan FGD dilakukan oleh Tenaga akhli bersama perwakilan dari pihak pemberi pekerjaan. Adapun peserta FGD adalah:

- Tim Teknis dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian
 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Perwakilan Dinas terkait Bidang perumahan di daerah
- Perwakilan dari lembaga Keuangan Bank
- Perwakilan dari Bapetarum
- Perwakilan dari BPJS
- Pakar Pembiayaan Perumahan
- Asosiasi Pengembang Perumahan

FGD diusahakan dapat dilakukan dengan waktu maksimum 2 (dua) jam. Secara umum, susunan acara FGD seperti tampak pada tabel berikut, namun bisa dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di lapangan, terutama mengenai pilihan waktu. Contoh susunan acaranya sebagai berikut:

Waktu	Acara	Petugas/Pemandu	Durasi
08.00 - 08.30	Cheking Peserta	Koordinator Survey	30'
08.30 - 08.35	Pengantar Kegiatan FGD	Koordinator Survey/Tenaga Ahli	5'
08.35 – 08.40	Pembukaan	Setelah dihantarkan Tim, sebaiknya yang memberi sambutan dari Pihak Pemberi Kerja	5'
08.40 - 10.40	Proses Diskusi (FGD)	Tenaga Ahli sebagai pemandu FGD	120'
10.40 - 10.45	Penutup	Koordinator Survey/Tenaga Ahli	5'

Langkah-langkah pelaksanaan FGD

a. Persiapan FGD

Fasilitator melakukan koordinasi dengan Tim Teknis/Pemberi Kerja dengan agenda:

- (a) Menjelaskan maksud tujuan rencana FGD
- (b) Menjelaskan kriteria dan jumlah peserta FGD
- (c) Menyepakati waktu dan tempat FGD; tempat FGD bisa di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau tempat lain yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ruangan yang dimaksud diupayakan yang nyaman.
- (d) Menyepakati pengelolaan FGD termasuk perlengkapan dan konsumsi.
- (e) Mengkonfirmasi kepastian peserta
- (f) Melakukan koordinasi dengan pihak Tim Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyiapkan ruangan tempat FGD dengan posisi tempat duduk berbentuk letter U, O, atau segi empat.
- (g) Pembagian tugas dengan tim, ada yang pemandu, mencatat proses, merekam audio video, membuat dokumentasi foto serta membantu peralatan dan bahan.

- (h) Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, antara lain:
 - Kertas plano / karton manila (4 lembar)
 - Lakban (1 strip)
 - Spidol (2 buah)
 - Alat rekam (tape recorder) jika ada
 - Pengeras suara (jika ada dan dipandang perlu)
 - Instrumen / Manual Panduan FGD
 - Kamera (dokumentasi)
 - Kertas dan Pulpen untuk notulen
 - Daftar hadir peserta

b. Pelaksanaan FGD

- (a) Tim menyiapkan tata tertib pelaksanaan FGD
- (b) Tim harus datang lebih awal (1 jam) sebelum waktu pelaksanaan FGD.
- (c) Tim menyambut kedatangan para peserta dengan senyum dan menyalami mereka.
- (d) Tim mempersilahkan peserta untuk mengisi daftar hadir terlampir.
- (e) Tim hendaknya tidak memulai pembicaraan tentang tema FGD kepada peserta sebelum pembukaan resmi FGD dimulai.
- (f) Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan atau aparat yang mewakili membuka secara resmi acara FGD dan meyerahkan pelaksanaan FGD pada panitia
- (g) Tim menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan FGD kepada para peserta
- (h) Tim menjelaskan teknis pelaksanaan FGD, setelah peserta FGD paham latar belakang, maksud dan tujuan FGD, sebagai berikut:

- Tim menyiapkan lembar kertas plano yang bisa di tempel pada papan tulis yang telah disiapkan. Jika tidak ada papan tulis, tempat duduk peserta FGD bisa diatur berbentuk U menghadap tembok atau papan yang datar yang bisa digunakan untuk menempel kertas plano.
- Jika ada kertas metaplan (bisa dibuat dari kertas manila dipotong ukuran 10 x 20 cm), peserta FGD diminta menuliskan gagasan untuk setiap topik yang didiskusikan, sesuai dengan permintaan pemandu FGD. Lalu hasil tulisan mereka ditempel pada kertas plano dengan double tip atau selotip kertas yang digulung kecil-kecil seperti kertas undian, yang berguna sebagai lem, namun mudah dicopot-copot untuk dipindahkan, jika ada koreksi.
- Jika tidak ada kertas meta plan peserta diminta pendapatnya lantas fasilitator menuliskan pendapat peserta FGD.

Panduan Pertanyaan FGD

Sebelum FGD, Tenaga ahli sebagai fasilitator harus mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan issue-issue yang akan digali. Sumber data dan informasi adalah hasil konsultasi dengan tim teknis dan data sekunder dari lapangan.

Survey (wawancara dan observasi).

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan berbagai tahap, mulai dari tahap penyusunan desain studi, pengumpulan data lapangan, tabulasi data, pemilihan dan pemilahan data, analisis data, dan intrepretasi data serta penyusunan rekomendasi dan penyusunan laporan.

3.2.2. JENIS, SUMBER, DAN PENGUMPULAN DATA

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis terdiri atas data Primer dan data Skunder. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden dan melakukan observasi. Sumber data Skunder diperoleh dari hasil studi pustaka, Review dokumenter, dan data-data dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, serta pihak-pihak yang terkait dengan studi ini.

Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan tiga cara yaitu melalui pendekatan FGD (Focus Group Discussion) dengan pemangku kepentingan, survey yaitu melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner, serta pengamatan langsung (observasi).

2) Data Sekunder

Data skunder yang akan dikumpulkan melalui studi pustaka, Review Dokumenter dan hasil-hasil kajian sebelumnya.

3.2.3 ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA

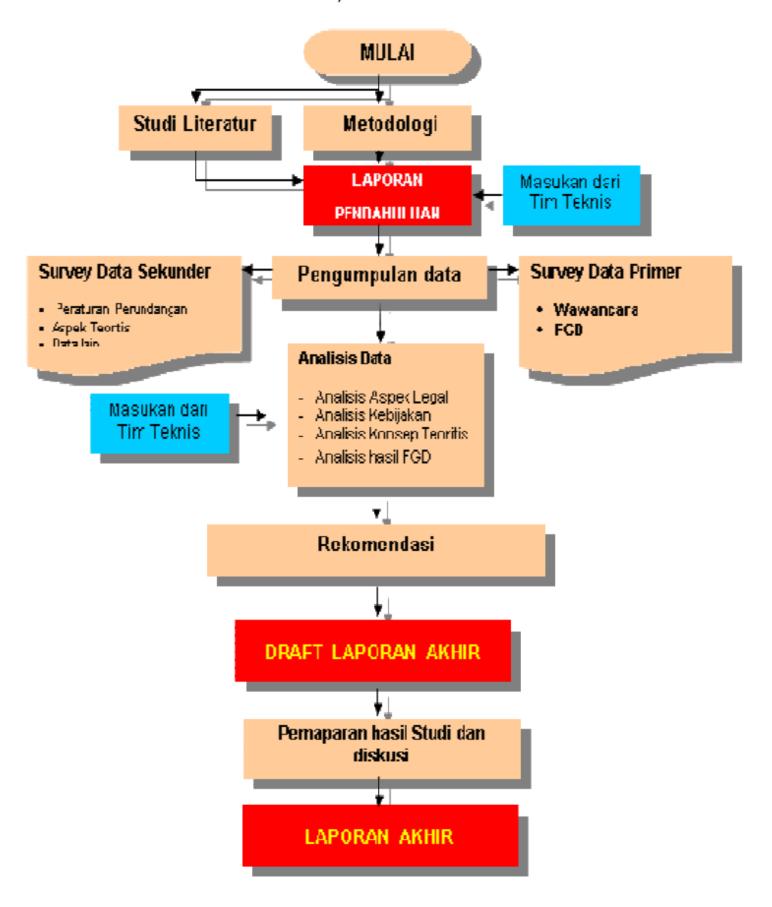
Data yang diperoleh dari hasil studi wawancara (data primer) maupun studi pustaka (data sekunder) tersebut kemudian dilakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, sehingga diharapkan akan mengungkap berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut secara mendasar. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar dalam Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang Untuk Pembiayaan Perumahan.

3.3. DESAIN DAN KERANGKA PIKIR PEKERJAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, kajian pusataka dan metologi pelaksanaan pekerjaan, maka desain dan kerangka piker Pekerjaan Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang Untuk Pembiayaan Perumahan seperti tertera pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1.

Metode Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang Untuk
Pembiayaan Perumahan





4.1. LEMBAGA PEMBIAYAAN DANA JANGKA PANJANG PERUMAHAN

4.1.1. BPJS KETENAGAKERJAAN

PROFIL³PJS KETENAGAKERJAAN

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ok.

4.1.2. BAPERTARUM_PNS



Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, disamping sandang dan pangan, merupakan harapan setiap manusia untuk dapat memenuhinya. Dari tiga kebutuhan dasar tersebut, pemenuhan kebutuhan akan rumah merupakan hal yang paling sulit dijangkau oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada khususnya.

Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya hampir mencapai 3,9 juta orang dan tersebar diseluruh Indonesia tersebut terdiri dari berbagai golongan yaitu mulai dari golongan I sampai dengan IV, yang berarti juga terdapat perbedaan penghasilan, yang berpengaruh kepada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama rumah.

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

BAPERTARUM-PNS didirikan berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994.

Yang melatarbelakangi didirikannya BAPERTARUM-PNS, antara lain:

- Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk memiliki rumah yang layak.
- 2) Terbatasnya kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk membayar uangmuka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR
- 3) Tabungan perumahan PNS dapat membentuk dana untuk mengatasi kendala tersebut yang merupakan kegotong-royongan diantara Pegawai Negeri Sipil dalam upaya peningkatan kesejahteraan antara Pegawai Negeri Sipil.

Sejak didirikan tahun 1993 BAPERTARUM-PNS telah melakukan beberapa kebijakan dan upaya yang bertujuan untuk semakin meningkatkan pelayanannya kepada PNS.

VISI DAN MISI BAPERTARUM-PNS

Visi

Menjadi pengelola Taperum-PNS yang bereputasi baik dan dipercaya serta handal dalam pemupukan dan pengelolaan dana perumahan

Misi

Memberikan kemampuan kepada PNS dan kepada masyarakatyang berpenghasilan tetap dalam pemilikan rumah yang layak melalui bantuan pembiayaan dari dana tabungan perumahan PNS dan dana perumahan lain dari masyarakat non PNS, serta bantuan pemerintah dan bantuan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, serta bantuan fasilitas teknis dengan bekerjasama secara kemitraan strategis dengan pihak terkait dalam pengadaan rumah

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

2) Memberikan pelayanan yang terintegrasi dan memuaskan dengan pengelolaan serta pemupukan dana untuk pembiayaan perumahan yang bernilai bagi PNS dan masyarakat berpenghasilan tetap, sehingga berkontribusi dalam mendukung pemerintah memenuhi kebutuhan rumah untuk masyarakat

DASAR HUKUM BAPERTARUM_PNS

- Peraturan Menteri PUPR No.22 Th.2015 tentang Tentang Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Menteri PUPR No.289 Th.2015 Tentang Besaran Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2014 tentang TBUM Bagi PNS Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2014 tentang TBUM Bagi PNS
- Permenpera Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tambahan Bantuan Uang Muka dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun
- Kepmenpera Nomor 1-KPTS-1995 Tentang Perubahan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi PNS
- Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Tentang Taperum-PNS
- Permenpera No. 15 Th. 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Perumahan dengan Dukungan Bantuan FLPP
- Permenpera No. 14 Th. 2010 Tentang Pengadaan Perumahan dengan Dukungan Bantuan FLPP
- Permenpera No. 03 Th. 2009 Tentang Pemberhentian Bantuan Kepada Gol IVa dan IVb
- Permenpera No. 12 Th 2011 Tentang Tambahan BUM dan BM bagi PNS
- Keppres Nomor 46 Th. 1994 Tentang Perubahan Keppres Nomor 14 Th. 1993 ttg TAPERUM-PNS

Permenkeu No. 31 Th. 2011 Tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 36
 Th. 2007 ttg Batasan RS, RSS, dst.

LAYANAN BAPERTARUM PNS



Bantuan Uang Muka

Bantuan Uang Muka KPR adalah manfaat yang diberikan dalam rangka memenuhi sebagian uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui KPR. Besarnya manfaat yang diberikan dibedakan berdasarkan golongan PNS

Rp. 1,2 juta untuk golongan I

Rp. 1,5 juta untuk golongan II

Rp. 1,8 juta untuk golongan III

Persyaratan Pengajuan

- PNS aktif dan belum memanfaatkan layanan Tabungan Perumahan.
- PNS yang telah memiliki masa menabung Tabungan Perumahan minimal 5 tahun.
- PNS yang belum memiliki rumah.
- PNS aktif golongan I,II, dan III dengan akad KPR yang berlaku sejak 1 Januari 2006.
- Tidak dalam Masa Persiapan Pensiun atau 1 tahun sebelum batas usia pensiun.

Dokumen Persyaratan

- Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan terakhir.
- Fotocopy (lampirkan salah satu dari) :
 - o Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (dilegalisir penerbit).
 - Surat Alih Debitur (dilegalisir penerbit).

- Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara.(dilegalisir penerbit)
- Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon.
- Surat Kuasa Pencairan (Standing Instruction) bagi pengembang yang mengurus Bantuan Uang Muka KPR.

Prosedur Pengajuan

- Mengisi formulir permohonan (dapat di download dari web Bapertarum-PNS).
- Formulir yang telah diisi, dilampiri dengan dokumen persyaratan.
- Berkas lengkap dikirim langsung atau melalui pos ke alamat : Wisma Iskandarsyah Blok B2 – B3, Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12160.

Bantuan Tabungan Perumahan (BTP)

Bantuan Tabungan Perumahan adalah bantuan dana dari hasil pemupukan yang tidak harus dikembalikan untuk digunakan oleh PNS dalam memenuhi kebutuhan uang muka pembelian rumah sejahtera melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah atau kredit/ pembiayaan membangun rumah diatas tanah sendiri, termasuk untuk biaya-biaya terkait kredit/pembiayaan rumah atau yang dipersyaratkan oleh bank.

Besarnya manfaat Bantuan Tabungan Perumahan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)

Persyaratan Umum

- PNS aktif golongan I, II, III, dan IV.
- Memiliki masa kerja minimal 5 tahun.
- Belum memiliki rumah.
- Akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di atas tanggal 25 Mei 2015
- Belum memanfaatkan bantuan dari BAPERTARUM-PNS.
- Bukan PNS dilingkungan TNI/POLRI/Kemhan

PNS Golongan I,II, dan III harus mengajukan bersamaan dengan produk Bantuan Uang Muka (BUM)

Dokumen Persyaratan

- Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan terakhir.
- Fotocopy Perjanjian KPR(dilegalisir penerbit).
- Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon.
- Surat Kuasa Pencairan (Standing Instruction) bagi pengembang yang mengurus Bantuan Tabungan Perumahan.

Prosedur Pengajuan di Bank Pelaksana

- Mengisi formulir permohonan, melampirkan Fotocopy Karpeg, dan SK Kepangkatan terakhir.
- Dokumen diajukan ke Bank Pelaksana bersamaan dengan pengajuan KPR.
- Bank Pelaksana memproses pengajuan Bantuan BAPERTARUM-PNS dan KPR
- Bank Pelaksana meminta rekomendasi ke BAPERTARUM-PNS
- BAPERTARUM-PNS melakukan verifikasi.
- Akad KPR di Bank Pelaksana.
- Realisasi di Bank Pelaksana.

Prosedur Pengajuan non Bank Pelaksana

- Mengisi formulir permohonan, melampirkan Fotocopy Karpeg, SK Kepangkatan terakhir, Foto copy Surat Perjanjian KPR dilegalisir oleh Bank Penerbit, dan Fotocopy Buku Tabungan
- Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan terakhir.
- Fotocopy Perjanjian KPR(dilegalisir penerbit).
- Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon.

Surat Kuasa Pencairan (Standing Instruction) bagi pengembang yang mengurus Bantuan Tabungan Perumahan.

Prosedur Pengajuan di Bank Pelaksana

- Mengisi formulir permohonan, ¹⁸melampirkan Fotocopy Karpeg, dan SK Kepangkatan terakhir.
- Dokumen diajukan ke Bank Pelaksana bersamaan dengan pengajuan KPR.
- Bank Pelaksana memproses pengajuan Bantuan BAPERTARUM-PNS dan KPR
- Bank Pelaksana meminta rekomendasi ke BAPERTARUM-PNS
- BAPERTARUM-PNS melakukan verifikasi.
- Akad KPR di Bank Pelaksana.
- Realisasi di Bank Pelaksana.

Prosedur Pengajuan non Bank Pelaksana

- Mengisi formulir permohonan, melampirkan Fotocopy Karpeg, SK Kepangkatan terakhir, Foto copy Surat Perjanjian KPR dilegalisir oleh Bank Penerbit, dan Fotocopy Buku Tabungan
- Berkas lengkap dikirim langsung atau melalui pos ke alamat : BAPERTARUM-PNS Wisma Iskandarsyah Blok B2 B3, Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

3) Bantuan Sebagian Biaya Membangun Rumah

Sebagian Biaya Membangun Rumah diatas Tanah Sendiri bagi PNS yang memiliki tanah atas nama yang bersangkutan/pasangan serta belum ada bangunannya dan akan dibangun rumah.

Besarnya Biaya Membangun yang diberikan untuk masing-masing golongan yaitu:

- Rp 1.200.000,- untuk PNS golongan I
- Rp 1.500.000,- untuk PNS golongan II

Rp 1.800.000,- untuk PNS golongan III

Persyaratan Umum

- PNS aktif golongan I,II, dan III
- Memiliki masa kerja paling singkat 5 tahun
- Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan TAPERUM-PNS
- Belum memiliki rumah

Dokumen Persyaratan Pengajuan BM

- Mengisi formulir permohonan.
- Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan Terakhir.
- Fotocopy Perjanjian Kredit Membangun Rumah dan dilegalisir Bank Penerbit.
- Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon.

4) ³¹ambahan Bantuan Membangun (TBM)

Tambahan Bantuan Membangun (TBM) adalah bantuan dana dari BAPERTARUM-PNS berupa pinjaman lunak yang harus dikembalikan, untuk membantu memenuhi sebagian biaya membangun rumah dengan fasilitas Kredit Membangun Rumah (KMR).

Pesyaratan Umum

- PNS aktif golongan I, II, III, dan IV.
- Memiliki masa kerja minimal 5 tahun.
- Belum memiliki rumah.
- Belum memanfaatkan bantuan dai BAPERTARUM-PNS.

Ketentuan Umum

PNS berhak memanfaatkan program dengan rincian sebagai berikut :

- Program TBM bersamaan dengan Program Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM)
- Program TBM saja.
- Program BM saja.
- Jangka waktu TBM paling lama 15 tahun.
- Dilakukan melalui bank pelaksana yang telah bekerjasama dengan BAPERTARUM-PNS.
- Program layanan TBM dapat digunakan untuk pembangunan rumah baru, melalui program Fasilitas Kredit Membangun Rumah di Bank Pelaksana.
- Proses pelaksanaan TBM dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan Fasilitas Pembiayaan Pembangunan Rumah.
- Rumah harus dibangun diatas lahan milik PNS dan harus terkait dengan Fasilitas Kredit Membangun Rumah (KMR) di Bank Pelaksana.

Plafond TBM

- Tambahan Biaya Membangun Rp 20 Juta
- Suku Bunga Pengembalian :
- Golongan : I. 3,25%, II. 6%, III. 6%, IV. 7%

Bank Pelaksana

- Bank Tabungan Negara (Bank BTN)
- Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB)

5) Pengembalian Tabungan

Pengembalian Tabungan merupakan pengembalian seluruh iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, kepada PNS yang berhenti bekerja karena pensiun, Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

meninggal dunia atau berhenti bekerja karena sebab-sebab lain, dimana selama dinas aktif nya belum pernah memanfaatkan bantuan.

Persyaratan

- Mengisi formulir yang kemudian dimintakan rekomendasi oleh pejabat kepegawaian serta distempel instansi.
- Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) atau Kartu Identitas Pensiun (KARIP)
- Fotocopy Surat Keputusan Golongan dimulai 1 (satu) tingkat dibawah tahun
 1993, SK Perubahan Golongan, dan SK Pensiun.

Tambahan Persyaratan

- Bagi yang pengurusannya diwakilkan : Membawa Surat Kuasa (Asli)
 bermaterai dari yang berhak kepada yang diberi hak.
- Bagi yang pensiun sebelum 1 Juli 2003 : Membawa voucher asli pembayaran pensiun tipe 310 dari PT Taspen yang memperlihatkan perincian pembayaran Taperum, berikut fotocopynya.
- Bagi yang meninggal dunia :
 - Fotocopy KTP ahli waris
 - Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penghentian
 Pembayaran gaji (SKPP).
 - Surat Keterangan Kematian dari Camat setempat.
 - Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat setempat.
- Bagi pengajuan di PT.TASPEN : KARPEG, SK Pensiun, Formulir JHT dari Taspen.

Prosedur Pencairan

PNS yang pensiun atau ahli waris atau yang diberi kuasa, mengambil formulir
 Pengembalian Tabungan dikantor Bank BRI atau BKD atau Bagian

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Kepegawaian di Instansi masing-masing atau download di website

Bapertarum-PNS.

Mengisi formulir Pengembalian Tabungan dan kemudian meminta

rekomendasi serta stempel dari pejabat kepegawaian.

Formulir Pengembalian Tabungan yang sudah diisi lengkap beserta berkas

kelengkapannya dibawa ke kantor Cabang Bank BRI terdekat.

Pencairan dana tabungan perumahan PNS dilakukan di kantor Bank BRI.

Pencairan dana tabungan bagi pensiunan TMT 1 Juni 2015 dapat dilakukan di

PT.TASPEN

Perhitungan Dan Besaran luran

Perhitungan Pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran

tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan

golongan, yaitu:

Golongan I: Rp 3.000,-

Golongan II: Rp 5.000,-

Golongan III: Rp 7.000,-

Golongan IV: Rp10.000,-

Perhitungan tersebut dilakukan sejak 1 Januari 1993 sampai dengan yang

bersangkutan berhenti bekerja, yang disebabkan pensiun, meninggal dunia,

atau sebab-sebab lain.

Laporan Keuangan Bapertarum-PNS

Tanggal 31 (Dalam			
	Catatan	JULI	AGUSTUS
KTIVA			
Kas dan Setara Kas	A.1	2,792,711,803,739	2,836,699,199,666
Uang Muka	A.2	216,639,000	151,693,500
Piutang Bunga Deposito & Surat Berharga	A.3	49,971,767,491	49,556,690,066
Plutang Lain-Lain	A.4	257,136,289	246,342,671
Aktiva Tetap	A.5	11,585,478,679	11,668,628,679
Akumulasi Penyusutan	A.5	(8,383,648,203)	(8,465,252,765
Nilai Tercatat		3,201,830,478	3,203,375,914
Investasi Jangka Panjang			
Surat Berharga	A.6	99,723,490,442	90,155,754,815
Realisasi Pinjaman Uang Muka	A.6	39,861,543,901	39,944,829,656
Realisasi Pinjaman Biaya Membangun	A.6	79,771,740	F - CO - C
Realisasi Pinjaman Rusunami	A.6		79,890,650
Realisasi Kredit Konstruksi		15,471,513	15,524,804
	A.6	72/2010/05/05	
Realisasi Tambahan Bantuan Uang Muka/Biaya Membangun	A.6	6,594,547,189	6,637,458,400
Sub Total Investasi Jangka Panjang	_	146,274,824,785	136,833,458,325
Dana Terikat Permanen	A.7	5.886,352,024,576	5,945,122,929,928
Aktiva Tidak Berwujud	AB	4,077,557,370	4,077,557,370
Akumulasi Penyusutan	A.B	(3,804,820,487)	
Nilai Tercatat	n.o	272,736,883	3,844,951,557 232,605,813
Aktiva Lain-Lain	A.9	3,577,493,831	3,577,493,831
TOTAL AKTIVA		8,882,836,257,070	8,975,623,789,714
EWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH	_		
KEWAJIBAN:			
LT CAST CONTRACT CONT	932	52020	
Hutang Pajak	A.10	174,894,498	87,942,714
Utang Lainnya	A.10	141,370,000	200,170,000
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	A.10	4,950,727,488	4,950,727,488
luran Taperum PNS	A.10	6,455,721,324,359	6,480,416,756,328
Realisasi Bantuan Uang Muka KPR	A.10	(860,049,427,130)	(860,275,327,130
Restisasi Bantuan Birrya Membangun	A.10	(820,296,347,080)	(820,296,347,080
Realisesi Pengembelian Tabungan	A.10	(1,230,525,098,130)	(1,236,658,362,130
Subtotal Realisasi Bantuan & Pengembalian Tabungan	A.10	(2.910,870,872,340)	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
Nilai Tercatal	7.10	3,544,850,452,019	(2,917,230,038,340 3,563,188,719,968
SUBTOTAL KEWAJIBAN	-	3,550,117,444,005	3,568,425,560,190
AKTIVA BERSIH		S. C.	
Aktiva Bersih Tidak Terikat		Å.	
Saldo Aktiva Bersih Tidak Terikat		1,701,206,366,754	1 700 001 101 101
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Tidak Terikat	B.1		1,725,521,421,743
Aktiva Bersih Terikat Temporer	B.1	24,315,054,989	24,761,358,927
Saldo Aktiva Bersih Terikat Temporer		257,558,688,024	257,704,865,949
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Temporer Aktiva Bersih Terikat Permanen	B.2	148,197,926	148,554,921
Saldo Aktiva Bersih Terikat Permanen		3 300 039 801 554	2 240 400 505 070
Kenaikar (Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Permanan	B.3	3,300,938,891,554 48,553,633,820	3,349,492,525,373 49,569,504,610
SUBTOTAL AKTIVA BERSIH		5,332,718,813,065	5,407,198,229,524

Sumber : Bapertarum-PNS

LAPORAN AKTIVITAS Tanggal 31 Agustus 2014 (Dalam Rupiah)

	Catatan	JULI	AGUSTUS
PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT			
Pendapatan			
Jasa Giro	B.1	29,648,557	44 204 204
Bunga Deposito ≤ 3 Bulan	B.1	25,076,058,981	41,204,26
Buga Pinjaman Perumnas	B.1	750,000,000	25,371,284,22
Bunga Surat Berharga	B.1	678,673,755	020 040 22
Pendapatan Lain-lain	B.1	14,000,000	839,040,22
Jumlah Pendapatan	0.1	26.548.381.293	26,251,528,72
		20,010,001,200	20,207,020,722
Beban Manajemen			
Beban Manajemen dan Umum	B.1	2,009,094,731	1,201,639,639
Beban Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi	B.1	125,170,184	121,735,632
Beban Lain-lain	B.1	99,061,389	166,796,524
Jumlah Beban Manajemen		2,233,326,304	1,490,171,795
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Tidak Terikat	_	24,315,054,989	24,761,356,927
PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT TEMPORER			
Pendapatan			
Jasa Giro Pinjaman Uang Muka	B.2	132,605,874	132,970,494
Jasa Giro Pinjaman Biaya Membangun	B.2	118,910	118,910
Jasa Giro Rusunami	B.2	53,108	53,291
Jasa Giro Tambahan BUM/BM	B.2	15,420,034	15,412,227
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Temporer		148,197,926	148,554,921
PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT PERMANEN	_		
Pendapatan			
Jasa Giro	D 0	4 000 700	
Bunga Deposito	B.3	1,802,798	4,358,933
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Permanen	B.3 _	48,551,831,022	49,565,145,677
Normalian (Fernanda) Aktiva bersin renkat Permanen	_	48,553,633,820	49,569,504,610
TOTAL KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH		73,016,886,734	74,479,416,459
AKTIVA BERSIH AWAL BULAN		5,259,701,926,331	5,332,718,813,065
AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN	100000000000000000000000000000000000000	5,332,718,813,065	5,407,198,229,524

Sumber : Bapertarum-PNS

LAPORAN ARUS KAS Tanggal 31 Agustus 2014 (Dalam Rupiah)

	JULI	AGUSTUS
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Sumber Dana Utama		
luran Taperum-PNS	19,044,730,427	14,815,969,78
Iuran PNS di Angkasa Pura & Perum Bulog	2.415.000	2,149.00
Jumlah Sumber Dana Utama	19,047,145,427	14,818,118,78
Penggunaan Dana Utama	10,041,140,421	14,010,110,70
Penyaluran Bantuan		
Bantuan Uang Muka	213,300,000	225,900,000
Biaya Membangun	3,600,000	880,000,000
Pengembalian Tabungan	6,673,696,800	6,133,264,000
Pinjaman Uang Muka	(180.699,183)	(49,684,739
Tambahan Bantuan Uang Muka/Biaya Membangun	(18,272,022)	27,498,985
Biaya Administrasi Penyaluran & Adm. Dan Jasa Pelayanan	354,500,697	83,320,182
Jumlah Penggunaan Dana Utama	7,046,126,292	6,420,298,420
Sumber Dana Tambahan	1,070,120,202	0,420,230,420
Jasa Giro Menpera	29.648,557	41,204,269
Bunga Deposito Menpera	24,128,408,219	25,071,380,275
Bunga Pinjaman	750,000,000	20,071,000,211
Bunga Efek Beragun Aset	-	2,229,928,049
Pendapatan Lain-lain	14,000,000	2,220,020,040
Jumlah Sumber Dana Tambahan	24,922,056,776	27,342,512,593
Penggunaan Dana Tambahan	Z-ipadioseirio	at local oral one
Beban Manajemen dan Umum	1,838,194,334	1,053,373,957
Beban Lain-lain	99,055,389	166,790,524
Jumlah Penggunaan Dana Tambahan	1,937,249,723	1,220,164,481
Kenalkan (Penurunan) Aliran Kas Dana dari Aktivitas Operasional :	34,985,826,188	34,520,168,465
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penggunaan Dana		51
Pembelian Aktiva Tetap dan Ak. Tidak Berwujud	4,750,000	83,150,000
Amortisasi Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02	1,100,000	(9,567,735,627)
Jumlah Penggunaan Dana	4,750,000	(9,484,585,627)
Kenaikan (Penurunan) Aliran Kas dari Aktivitas Investasi :	(4,750,000)	9,484,585,627
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Sumber Dana		
Utang Lainnya	64,950,000	58,800,000
Jumlah Sumber Dana	64,950,000	58,800,000
Penggunaan Dana	0.11000,000	30,000,000
Pinjaman ke pihak lain	(129,179,160)	76,158,166
Jumlah Penggunaan Dana	(129,179,160)	76,158,166
Kenaikan (Penurunan) Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan :	194,129,160	(17,358,166)
Kenaikan (Penurunan) bersih dalam Kas dan Setara Kas ;	35,175,205,348	43,987,395,926
Kas dan Setara Kas pada Awal Bulan :	2,757,536,598,391	2,792,711,803,739
Kas dan Setara Kas pada Akhir Bulan :	2,792,711,803,739	2,836,699,199,666

Sumber : Bapertarum-PNS

4.1.3. PT TASPEN

Profil PT TASPEN

 9 abungan dengan jaminan keuangan di masa pensiun dengan nyaman, sejahtera, untuk menikmati hari-hari yang indah. TUJUAN Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) dan keluarganya dengan memberikan jaminan keuangan pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya (suami/isteri/anak/orang tua) pada waktu peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun. PESERTA PNS (tidak termasuk PNS di lingkungan Departemen Hankam) Pejabat Negara Pegawai BUMN / BUMD yang terdaftar MASA KEPESERTAAN Sejak diangkat sebagai calon pegawai/pegawai tetap/pejabat Negara. Bagi PNS yang diangkat sebelum 1 Juli 1961 dihitung sejak 1 Juli 1961. Bagi PNS daerah Propinsi Irian Jaya yang diangkat sebelum 1 Januari 1971, dihitung sejak Januari 1971. Bagi Eks PNS Propinsi Timor Timur yang diangkat sebelum 1 April 1979, dihitung sejak April 1979. Bagi pegawai BUMN/BUMD/BHMN sesuai dengan perjanjian kerja sama masing-masing. KEWAJIBAN PESERTA Membayar iuran 3,25% dari penghasilan sebulan (gaji pokok + tunjangan anak) setiap bulan berdasarkan Kepres No.8 tahun 1977. Memberi keterangan data diri pribadi dan keluarganya. Melaporkan perubahan data penghasilan, kenaikan pangkat/golongan dan perubahan gaji pokok. PROGRAM DAN PRODUK Mengacu pada ruang lingkup usahanya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 25/1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor:26/1981 yaitu sebagi penyelenggara Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan UMN/BUMD , program dan produk PT Taspen (Persero) sebagai berikut : Program Pensiun Adalah suatu program yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil ketika memasuki usia pensiun sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya kepada Negara seperti ditetapkan dalam Undang-undang Nomor:11 Tahun 1969 tentang pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil. PT Taspen (Persero) menyelenggarakan Program Pembayaran Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak Tahun 1987, dimulai dari Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), April 1989, wilayah pembayaran pensiun diperluas ke

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Propinsi Sumatera dan pada 1 Januari 1990 cakupan tersebut mencapai wilayah Jawa Madura. Selanjutnya terhitung mulai April 1990 PT Taspen(Persero) menyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil(PNS) di seluruh Indonesa. Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) ,PT Taspen (Persero) juga melakukan pembayaran pensiun bagi : a. Penerima Pensiun Pejabat Negara b. Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan c. Penerima Tunjangan Veteran d. Penerima Pensiun Anggota TNI/POLRI yang diberhentikan karena pensiun sebelum 1 April 1989 Hak-hak pensiun diberikan kepada a. Pensiun Sendiri b. Pensiun Janda/Duda c. Pensiun Yatim Piatu d. Pensiun Orang Tua e. Uang Duka Wafat Kewajiban Peserta Program Pensiun a. Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan sebulan yang terdiri dari gaji+tunjangan istri+tunjangan anak kepada PT Taspen(Persero) sewaktu masih aktif bekerja. b. Menyampaikan laporan perubahan data peserta dan keluarga Program Tabungan Hari Tua dalah suatu program asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta,berupa pembayaran sekaligus kepada peserta pada waktu mencapai usia pensiun atau kepada ahli warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun atau bukan karena meninggal dunia , akan memperoleh pembayaran sekaligus dalam bentuk Nilai Tunai. Disamping itu peserta Program Asuransi Dwiguna juga akan memperoleh Asuransi Kematian tanpa harus menambah iuran. Program Asuransi Kematian adalah asuransi seumur hidup bagi peserta dan istri/suami, serta meruapakan asuransi berjangka bagi anak peserta yang belum mencapai usia 21 s.d 25 tahun bagi yang belum menikah dan masih sekolah/kuliah. Peserta Program Tabungan Hari Tua a. Pegawai Negeri Sipil kecuali Pegawai Negeri Sipil Departemen HANKAM b. Pejabat Negara c. Pegawai BUMN/BUMD Hak-hak Peserta Program THT: 1. Manfaat THT dibayarkan apabila peserta berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil karena pensiun atau meninggal dunia 2. Manfaat Nilai Tunai dibayarkan apabila peserta berhenti/keluar bukan karena pensiun atau meninggal dunia. Manfaat Asuransi Kematian dibayarkan apabila peserta, suami/istri dan anak peserta meninggal dunia. Kewajiban Peserta Program THT a. Membayar iuran sebesar 3,25% dari penghasilan sebulan yang terdiri dari gaji+tunjangan istri+tunjangan anak kepada PT Taspen (Persero) sewaktu masih aktif bekerja. b. Menyampaikan laporan perubahan data

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

penghasilan atau perubahan data diri dan keluarga. Asuransi Multiguna Sejahtera Merupakan pengembangan dari Asuransi Dwiguna dengan penambahan manfaat bagi peserta berupa Manfaat Berkala, disamping Manfaat THT dan Manfaat Nila Tunai. Adapun besaran Manfaat Berkala disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta. Program ini diikuti oleh pegawai dari beberapa BUMN/BUMD. Asuransi Ekaguna Sejahtera Merupakan asuransi yang menawarkan Manfaat THT saja kepada peserta yang ingin membatasi kewajiban iurannya, program ini juga diikuti oleh pegawai dari beberapa BUMN/BUMD. Pabungan dengan jaminan keuangan di masa pensiun dengan nyaman, sejahtera, untuk menikmati hari-hari yang indah. TUJUAN Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) dan keluarganya dengan memberikan jaminan keuangan pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya (suami/isteri/anak/orang tua) pada waktu peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun. PESERTA PNS (tidak termasuk PNS di lingkungan Departemen Hankam) Pejabat Negara Pegawai BUMN / BUMD yang terdaftar MASA KEPESERTAAN Sejak diangkat sebagai calon pegawai/pegawai tetap/pejabat Negara. Bagi PNS yang diangkat sebelum 1 Juli 1961 dihitung sejak 1 Juli 1961. Bagi PNS daerah Propinsi Irian Jaya yang diangkat sebelum 1 Januari 1971, dihitung sejak Januari 1971. Bagi Eks PNS Propinsi Timor Timur yang diangkat sebelum 1 April 1979, dihitung sejak April 1979. Bagi pegawai BUMN/BUMD/BHMN sesuai dengan perjanjian kerja sama masing-masing. KEWAJIBAN PESERTA Membayar iuran 3,25% dari penghasilan sebulan (gaji pokok + tunjangan anak) setiap bulan berdasarkan Kepres No.8 tahun 1977. Memberi keterangan data diri pribadi dan keluarganya. Melaporkan perubahan data penghasilan, kenaikan pangkat/golongan dan perubahan gaji pokok.

Visi Dan Misi

isi: Menjadi pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Makna Visi

"Menjadi pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial lainnya..."

Ruang lingkup usaha Taspen adalah menyelenggarakan program Tabungan Hari Tua (termasuk asuransi kematian), Dana Pensiun (termasuk Uang Duka Wafat), program kesejahteraan PNS serta program jaminan sosial lainnya.

"Terpercaya..."

Taspen menjadi pilihan peserta dan stakeholder lainnya dengan kinerja yang bersih dan sehat.

'Bersih'

Taspen beroperasi dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

'Sehat'

Adanya peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada bidang keuangan maupun non keuangan.

Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara Profesional dan Akuntabel, berlandaskan Integritas dan Etika yang tinggi.

Makna Misi

"Manfaat dan pelayanan yang semakin baik.."

Untuk memenuhi harapan peserta yang semakin tinggi, Taspen berupaya meningkatkan nilai manfaat dan pelayanan secara optimal

"Profesional"

Taspen bekerja dengan terampil dan mampu memberikan solusi dengan 5 Tepat (tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi) didukung dengan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi

"Akuntabel"

Taspen dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan sistem dan prosedur kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Integritas"

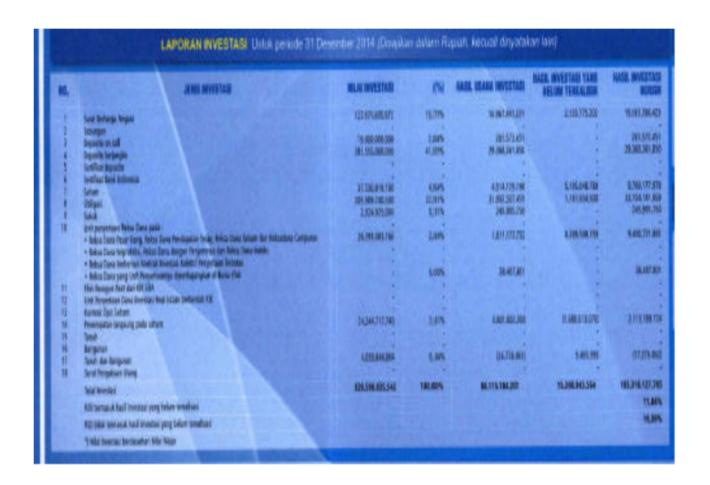
Taspen senantiasa konsisten dalam memegang amanah, jujur dan melaksanakan janji sesuai visi dan misi perusahaan.

"Etika"

Taspen melayani peserta dan keluarganya dengan ramah, rendah hati, santun, sabar dan manusiawi.

Laporan Keuangan Taspen





4.1.4. DANA HAJI

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji disampaikan kepada Presiden dan DPR paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai. Menteri sebagai Pengguna Anggaran yang bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1433H/2012M berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Laporan Keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1433H/2012M ini disusun berdasarkan hasil konsolidasi dari laporan yang disusun oleh masing-masing satuan kerja, yaitu: Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia, Kantor Teknis Urusan Haji Konjen RI Jeddah, dan Direktorat-Direktorat serta Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

1) NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan BPIH mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012. Jumlah Aset per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp55.001.230.179.955,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp513.672.993.480,-, Aset yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp53.426.000.882.444,-, Aset Tetap Rp1.018.829.551.391,-; dan Aset lainnya Rp42.726.752.640,-. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp53.711.680.045.330,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp251.869.226.218,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp53.459.810.819.112, Sementara Itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2012 adalah sebesar terdiri Ekuitas Tidak Terikat Rp1.279.851.691.958,dari sebesar Rp296.302.226.013,- dan Ekuitas Terikat temporer sebesar Rp983.549.465.945,-. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 sebagai berikut:

Tabel
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012

0.3	31 Desember 2012	31 Desember 2011	Naik/Turun		
Uraian	(Audited)	(Audited)	Rp	%	
Aset					
Aset Lancar	513.672.993.480	780.586.195.867	(266.913.202.387)	(34,19)	
Aset Dibatasi Penggunaannya	53.426.000.882.444	38.449.338.265.446	14.976.662.616.998	38,95	
Aset Tetap	1.018.829.551.391	991.010.229.926	27.819.321.465	2,81	
Aset Lainnya	42.726.752.640	45.863.483.132	(3.136.730.492)	(6,84)	
Jumlah Aset	55.001.230.179.955	40.266.798.174.371	14.724.733.562.917	36,59	
Kewajiban					
Kewajiban Jangka Pendek	261.567.668.885	639.252.788.287	(377.685.119.402)	(59,08)	
Kewajiban Jangka Panjang	53.459.810.819.112	38.449.338.265.446	15.010.472.553.666	39,04	
Jumlah Kewajiban	53.721.378.487.997	39.088.591.053.733	14.632.787.434.264	37,43	
Ekuitas					
Ekuitas Tidak Terikat	296.302.226.013	194.657.654.693	101.644.571.320	8,63	
Ekuitas Terikat Temporer	983.549.465.945	983.549.465.945	Ψ.	0,00	
Ekuitas Terikat Permanen	-				
Jumlah Ekuitas	1.279.851.691.958	1.178.207.120.638	101.644.571.320	8,63	
Jumlah Ekuitas & Kewajiban	55.001.230.179.955	40.266.798.174.371	14.734.432.005.584	36,59	

Sumber: Dana Haji

2) LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan realisasinya mencakup unsurunsur pendapatan dan beban, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012

Realisasi pendapatan musim haji 1433H/2012M adalah sebesar Rp8.651.775.256.209, Sementara itu, realisasi beban musim haji 1433H/2012M adalah sebesar Rp8.529.296.518.678,- sehingga pada musim haji 1433H/2012M terjadi surplus sebesar Rp122.478.737.531,-. Ringkasan Laporan Operasional Musim Haji Tahun 1433H/2012M dan 1432H/2011M dapat disajikan sebagai berikut:

Table.
Rngkasan Laporan Operasional Musim Haji Tahun 1433H/2012M dan 1432H/2011M

Uraian	1433H/2012M (Audited)	1433H/2012M (Audited) 1432H/2011M (Audited) Naik/Turun		
Uldidil			Rp	%
Pendapatan	8.651.775.256.209	7.789.111.357.356	862.663.898.853	11,08
Beban	8.529.296.518.678	7.618.588.676.473	910.707.842.205	11,95
Surplus	122.478.737.531	170.522.680.883	(48.043.943.352)	(28,17)

Sumber: Dana Haji

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang posisi keluar masuk arus kas yang berasal dari pendapatan dan kas yang dibayarkan untuk beban. Jumlah arus bersih kas dari aktivitas operasi adalah sebesar (Rp234.148.509.716,-), arus bersih kas dari aktivitas investasi sebesar (Rp25.837.325.571,-) sehingga terdapat kenaikan bersih dalam Kas dan setara kas sebesar (Rp259.985.835.287,-). Ringkasan Laporan Arus Kas Musim Haji Tahun 1433H/2012M dan Tahun 1432H/2011M dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel .. Ringkasan Laporan Arus Kas Musim Haji Tahun 1433H/2012M dan Tahun 1432H/2011M

Urajan	1433H/2012M	1432H/2011M	Naik/Turun		
Oraidii	(Audited)	(Audited)	Rp	%	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	8.778.332.685.226	7.941.620.392.138	836.712.293.088	10,54	
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	9.012.481.194.942	7.598.730.427.295	1.413.750.767.647	18,61	
Arus Bersih Kas dari Aktivitas Operasi	(234.148.509.716)	342.889.964.843	(577.038.474.559)	(168,29)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	4.305.161.626	1-01	4.305.161.626	100,00	
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	30.142.487.197	14.089.316.601	16.053.170.596	113,94	
Arus Bersih Kas dari Aktivitas Investasi	(25.837.325.571)	(14.089.316.601)	(11.748.008.970)	83,38	
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(259.985.835.287)	328.800.648.242	(588.786.483.529)	179,07	
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	765.064.818.323	436.264.170.081	328.800.648.242	75,37	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	505.078.983.036	765.064.818.323	(259.985.835.287)	(33,98)	

Sumber: Dana Haji

4) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Agama menguraikan dasar hukum, profil, kebijakan teknis, pendekatan penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Di samping itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Sesuai dengan Pedoman Akuntansi BPIH, dalam penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya pendapatan dan dikeluarkannya beban, serta timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran BPIH.

4.1.6. PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Latar Belakang

Membeli rumah akan melibatkan jumlah uang yang tidak sedikit, oleh karenanya diperlukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan masa angsuran yang cukup panjang. Bagi perbankan, sumber dana yang tersedia untuk membiayai KPR umumnya berjangka pendek (tabungan, giro, deposito, dan sebagian dari obligasi), sehingga menimbulkan maturity mismatch (kesenjangan jangka waktu).

Masalah maturity mismatch ini, dialami hampir oleh semua negara berkembang dan masingmasing mencari solusi yang cocok dengan kondisi negaranya.

Sejak tahun 1983, proses diskusi intensif tentang pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan telah dilaksanakan diantara para pemangku kepentingan industri pembiayaan perumahan. Kemudian, dilanjutkan dengan serangkaian studi kelayakan yang dipelopori oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, antara tahun 1993 hingga semester pertama tahun 2005.

Melalui suatu rangkaian studi yang dilakukan sejak tahun 1993 oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Departemen Keuangan dan dibantu oleh konsultan asing yang dibiayai oleh USAID melalui Municipal Finance Project, maka pada tahun 1998, terbit Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 132/KMK.014/1998, yang membuka peluang berdirinya lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Lembaga ini belum sempat berdiri karena pada saat itu belum ada investor yang berminat. Pemerintah tetap memberikan komitmennya terhadap pembentukan lembaga tersebut dengan membentuk kelompok kerja baru. Akhirnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5/2005, tanggal 7 Februari 2005, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia serta Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19/2005, tanggal 7 Februari 2005, tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, akte Notaris Imas Fatimah, SH, No. 59 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30 Agustus 2005 No. 69 Tambahan No. 9263 maka didirikanlah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) pada 22 Juli 2005. Penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan pada 13 Agustus 2008 dengan akte No. 114 Notaris Sutjipto, SH, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 5 Desember 2008 No. AHU-94053.AH.01.02 Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3 Juli 2009 No. 53 Tambahan No. 17294.

Pada 26 Januari 2008, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 19/2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Kegiatan Usaha

Membeli rumah akan melibatkan jumlah uang yang tidak sedikit, oleh karenanya diperlukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan masa angsuran yang cukup panjang. Bagi perbankan, sumber dana yang tersedia untuk membiayai KPR umumnya berjangka pendek (tabungan, giro, deposito, dan sebagian dari obligasi), sehingga menimbulkan maturity mismatch (kesenjangan jangka waktu).

Masalah maturity mismatch ini, dialami hampir oleh semua negara berkembang dan masingmasing mencari solusi yang cocok dengan kondisi negaranya.

Sejak tahun 1983, proses diskusi intensif tentang pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan telah dilaksanakan diantara para pemangku kepentingan industri pembiayaan perumahan. Kemudian, dilanjutkan dengan serangkaian studi kelayakan yang dipelopori oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, antara tahun 1993 hingga semester pertama tahun 2005.

Melalui suatu rangkaian studi yang dilakukan sejak tahun 1993 oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Departemen Keuangan dan dibantu oleh konsultan asing yang dibiayai oleh USAID melalui Municipal Finance Project, maka pada tahun 1998, terbit Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 132/KMK.014/1998, yang membuka peluang berdirinya lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Lembaga ini belum sempat berdiri karena pada saat itu belum ada investor yang berminat. Pemerintah tetap memberikan komitmennya terhadap pembentukan lembaga tersebut dengan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

membentuk kelompok kerja baru. Akhirnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5/2005, tanggal 7 Februari 2005, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia serta Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19/2005, tanggal 7 Februari 2005, tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, akte Notaris Imas Fatimah, SH, No. 59 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30 Agustus 2005 No. 69 Tambahan No. 9263 maka didirikanlah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) pada 22 Juli 2005. Penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan pada 13 Agustus 2008 dengan akte No. 114 Notaris Sutjipto, SH, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 5 Desember 2008 No. AHU-94053.AH.01.02 Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3 Juli 2009 No. 53 Tambahan No. 17294.

Pada 26 Januari 2008, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 19/2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Visi dan Misi

Visi : Menjadi entitas mandiri yang mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.

Misi

Membangun & mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan, yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah / panjang untuk sektor perumahan, yang memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.

Falsafah Perseroan

Bersih

Manajemen dan karyawan bekerja dengan akal sehat dan itikad baik dalam kerangka kerja yang digariskan oleh Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan dari pemerintah dan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

petunjuk pemegang saham, satunya kata dengan perbuatan dan tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan.

Transparan

Tidak ada rahasia dalam kebijakan, anggaran dan rencana kerja Perseroan, dan tidak ada dusta di antara pemegang saham, direksi, komisaris, dan pegawai.

Sehat

Perseroan akan memelihara dengan baik dan benar tanpa ada rekayasa rasio-rasio keuangan yang telah ditetapkan.

Etos Kerja

Komitmen Manajemen dan Karyawan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) adalah:

Menjaga nama baik Perseroan;

Menjaga kerahasiaan Perseroan;

Menjaga dan menggunakan harta/kekayaan Perseroan dengan baik dan benar;

Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan data perusahaan serta penyusunan Laporan Keuangan dengan baik dan benar;

Menghindarkan diri dari konflik kepentingan pribadi dengan Perseroan;

Tidak menyalahgunakan posisi/kedudukan di Perseroan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;

Tidak (akan) meminta atau memberikan isyarat untuk meminta dan/atau menerima suap, imbalan dan cindera mata;

Tidak menggunakan dan/atau membawa dan menyimpan obat terlarang atau sesuatu yang memabukkan ke dalam Perseroan;

Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan pencemaran nama baik Perseroan dan atau merugikan keuangan Perseroan termasuk melakukan tindakan di luar wewenang; Menyatakan bahwa selama bekerja di dalam gedung Perseroan, adalah sepenuhnya untuk keperluan Perseroan dalam melaksanakan tugas/bekerja sesuai Anggaran Dasar RKAP dan peraturan yang berlaku.

Layanan Dan Produk

1) Sekuritas

Bagi penyalur KPR yang memiliki keinginan untuk memperbaiki struktur modalnya, sekuritisasi merupakan model transaksi yang sangat tepat. Transaksi sekuritisasi dilakukan dengan mentransformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset.

Dengan melakukan transaksi sekuritisasi, maka penyalur KPR bisa memperoleh likiwiditasnya kembali tanpa harus menunggu sampai KPRnya dilunasi oleh konsumen KPR.

Manfaat Transaksi Sekuritisasi

Bagi penyalur KPR:

- Mitigasi maturity mismatch antara sumber pendanaan jangka pendek dengan KPR berjangka panjang
- Diversifikasi sumber pendanaan dengan sumber jangka panjang yang berkesinambungan
- Meningkatkan kemampuan kemampuan/kapasitas penyalur KPR
- Pengelolaan asset dan liabilities
- Meningkatkan keuntungan melalui fee based income, bukan lagi interest margin.

Bagi Investor antara lain:

Alternatif produk investasi dengan tingkat risiko yang lebih baik karena berbasis portfolio asset

- Produk investasi Kelas A dengan rating idAAA dari Pefindo
- Underlying aset portfolio yang kuat sesuai kriteria sehat dari SMF
- Struktur transaksi yang solid dengan adanya Dukungan Kredit dan Subordinasi

Bagi pasar modal:

- Pengembangan produk investasi di pasar modal yang berbasis portfolio asset
- Ketersediaan produk investasi bagi Investor yang menginginkan produk jenis ini

EFEK YANG DITERBITKAN

Berbagai jenis efek dapat diterbitkan sebagai hasil transaksi sekuritisasi, bisa berbentuk KIK-EBA atau bisa juga berbentuk EBA atau surat utang

2) Pembiayaan

Syarat penting untuk berdirinya Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan Perumahan adalah adanya Pasar Primer yang efisien dan kuat. Untuk mendorong terbentuknya volume KPR yang berkualitas serta mendorong terbentuknya pasar primer yang kuat, SMF diperbolehkan untuk menyalurkan pinjaman dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil penerbitan surat utang. Tujuannya adalah untuk memperbesar volume KPR yang berkualitas sehingga selambat-lambatnya pada tahun 2018 telah terbentuk volume yang cukup untuk menjamin bergulirnya transaksi sekuritisasi. Transaksi sekuritisasi yang berlangsung berkesinambungan akan membentuk mekanisme pasar yang dapat mendorong turunnya tingkat bunga KPR.

Pinjaman - Refinancing

Pada awal masa pendirian, SMF menawarkan fasilitasi likuiditas dalam bentuk pinjaman yang disalurkan kepada lembaga penyalur KPR dengan cara me-refinancing

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

(membiayai kembali) portofolio KPR yang sudah dimiliki oleh penyalur KPR. Atas pembiayaan yang disalurkan tersebut SMF memperoleh jaminan tagihan KPR, termasuk hak agunan yang melekat padanya, dengan syarat recourse. Artinya apabila terdapat KPR yang tidak memenuhi syarat, termasuk yang kurang lancar, maka penyalur KPR mengganti dengan KPR yang lancar.

Pinjaman – Repo KPR Atau Term Purchase

Sejak tahun 2010, SMF memperkenalkan program baru yaitu pembelian bersyarat atau REPO KPR sebagai pengganti refinancing model seperti tersebut di atas. Disebut pembelian bersyarat karena pembelian hanya untuk waktu tertentu dan ada syarat recourse, artinya jika ada tagihan KPR yang tidak memenuhi syarat, maka harus diganti dengan tagihan yang memenuhi syarat. Produk baru ini secara akuntansi dicatat sebagai pinjaman karena 'bersyarat' sehingga tidak memenuhi syarat 'true sale' akan tetapi secara hukum tergolong sebagai penjualan karena dokumen transaksinya adalah akta cessie.

Dengan adanya program baru ini maka SMF menawarkan 2 program untuk mendorong para pihak bertransaksi yaitu Purchase without recourse yaitu sekuritisasi dan Repo KPR

3) Surat Utang

Sumber dana yang digunakan untuk penyaluran pinjaman adalah dari hasil penerbitan surat utang termasuk Obligasi dan atau MTN (Medium Term Note) atau surat utang lainnya. Dengan cara demikian diharapkan penyalur KPR secara bertahap akan menggunakan dana jangka menengah/ panjang dari pasar modal sehingga dapat menawarkan KPR dengan bunga fixed untuk jangka panjang.

Surat Utang yang diterbitkan dikembangkan secara bertahap dimulai dari uncollateralized sebagai Corporate Bonds biasa hingga collateralized Bonds dengan underlying portfolio KPR, dengan mempertimbangkan aspek Legal dan Akuntansi Keuangannya.

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Perkembangan perdagangan surat utang/obligasi yang telah diterbitkan SMF dapat dilihat pada kolom Produk Investasi.

4) Standar Dokumen

Standar dokumen KPR diperlukan untuk mendukung tumbuhnya pasar primer yang lebih cepat, sehat dan efisien. Standar ini dibuat berdasarkan studi atas praktek-praktek bisnis dan penyaluran KPR yang baik dari berbagai negara yang dapat diterapkan sesuai kerangka hukum di Indonesia.

Standar dokumen terdiri dari Pedoman penyaluran KPR dari mulai originasi, underwriting, servicing sampai kepada standar akta perjanjian, formulir aplikasi KPR dan standar penilaian/apprasial.

Standar dibuat dalam bentuk buku pedoman, akan tetapi yang penting untuk diadopsi adalah kriteria yang tertera didalam standar itu seperti rasio LTV, rasio DTI dan syarat rumah siap huni, harus dinilai/ appraisal sebelum akad kredit dan lain-lain. Penyalur KPR dapat menggunakan standar ini sebagai rujukan, bahwa kriteria yang disyaratkan merupakan standar KPR yang sehat.

KPR yang memenuhi kriteria ketika akad kredit, dalam perjalanannya bisa saja menurun kualitasnya karena hal-hal yang tidak dapat diprediksi seperti konsumen kehilangan pekerjaan atau pengelolaannya/administrasi kredit yang kurang memadai. Untuk itu, kemampuan melakukan analisis/underwriting dan adminsitrasi/servicing menjadi hal penting disamping seleksi awal sebelum akad kredit.

5) Pelatihan

Pasar pembiayaan perumahan atau pasar primer yang kuat dan efisien merupakan syarat utama untuk membangun Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan yang merupakan tugas SMF sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2008 juncto 19/2005. Hal ini mutlak sebagai landasan agar Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan tidak rentan terhadap gejolak ekonomi dan keuangan.

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Dengan dasar ini salah satu Program Kerja SMF adalah mendorong terciptanya pasar primer yang kuat dengan melakukan pembinaan terhadap lembaga Penyalur KPR secara teratur dalam bentuk antara lain program pelatihan untuk karyawan lembaga Penyalur KPR.

Tujuannya adalah:

- Lembaga penyalur KPR mampu mengadopsi standar dokumen KPR
- Meningkatkan kemampuan karyawan lembaga penyalur KPR dalam memproduksi KPR yang berkualitas,
- Menghasilkan kader Ahli-ahli KPR untuk mendukung industri KPR di Indonesia yang nantinya dapat mendidik dan menyebarluaskan tata cara penyaluran KPR yang baik dan benar.

PRODUK INVESTASI SMF

1) Efek Beragun Aset (EBA)

Sesuai dengan tujuan pendiriannya, pada tahun 2009 PT SMF Persero telah berhasil melakukan sekuritisasi KPR milik BTN. Berdasarkan Perpres No 1 tahun 2008 jo 19 tahun 2005, PT SMF Persero dapat bertindak sebagai penerbit Efek Beragun Aset. Namun dikarenakan petunjuk pelaksanaan yang tersedia di Bapepam sebagai otoritas Pasar Modal untuk transaksi sekuritisasi menggunakan mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK), maka proses sekuritisasi akhirnya dilaksanakan melalui KIK yang dibentuk oleh Manager Investasi dan Kustodian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

EFEK BERAGUN ASET YANG DITERBITKAN

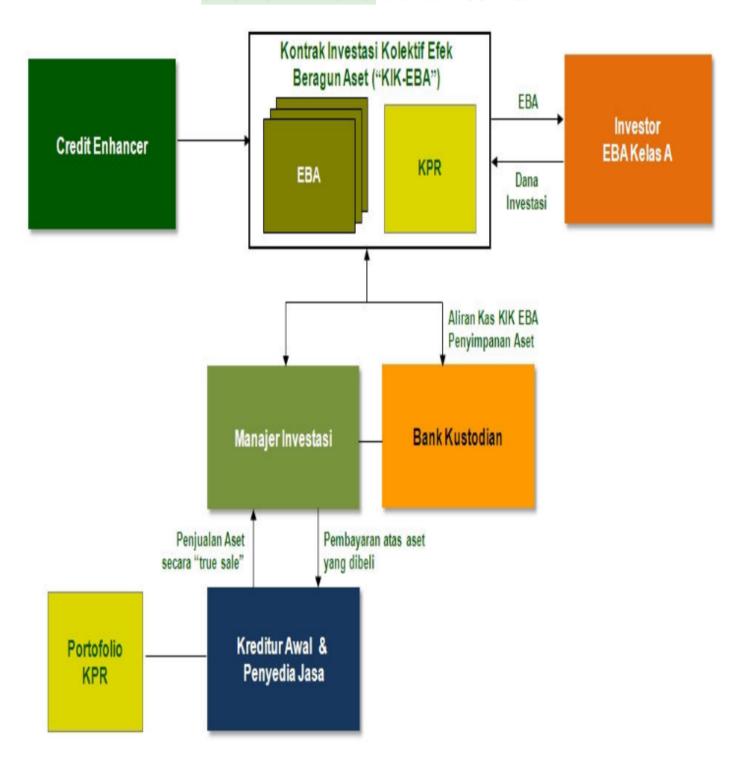
Sekuritisasi	Tahun Penerbitan	Rata-rata Sisa Umur KPR	Tranches Nominal (Rp Milyar)			Peringkat		Tenor EBA (tahun)
		(Tahun)			Awal	Saat Ini		
DSMF 01	11 Feb '09	F 2	Kelas-A	100	Aaa.id	IdAAA	13%	5,00
D2IVIF 01	11 Feb 09	5,3	Kelas-B	11	Unrated	Unrated		
DCM5 03	10 N= (00	5.63	Kelas-A	360	IdAAA	IdAAA	11%	5,00
DSMF 02	F 02 10 Nov '09	5,63	Kelas-B	31	Unrated	Unrated		
DRTN 04	DBTN 01 27 Des '10	.0 5,35	Kelas-A	688,5	IdAAA	IdAAA	0.350/	5,00
DRINGI			Kelas-B	61,5	Unrated	Unrated	9,25%	
DDTN 03	47.01(44	5.04	Kelas-A	645	IdAAA	IdAAA	8,75%	5,00
DBTN 02	17 NOV 11	.7 Nov '11 5,94	Kelas-B	58	Unrated	Unrated		
DRTN 02	13 Des '12	6.25	Kelas-A	925	IdAAA	IdAAA	7,75%	5,00
DBTN 03	13 Des 12	6,35	Kelas-B	75	Unrated	Unrated		
			Kelas-A1	403	IdAAA	IdAAA	8,90%	3,00
DBTN 04	20 Des '13	5,58	Kelas-A2	525	IdAAA	IdAAA	9,50%	5,00
			Kelas B	72	Unrated	Unrated		

Beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangkan untuk melakukan investasi dalam Efek Beragun Aset (EBA) sebagai produk dari Sekuritisasi KPR, termasuk KIK-EBA antara lain:

- a. EBA KPR Kelas A memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo
- Fundamental yang kuat dan reputasi yang baik dari Kreditur Awal yang sangat berpengalaman di industri kredit perumahan
- c. Aset portofolio yang kuat & memenuhi kriteria KPR sehat SMF
 - KPR sebagai underlying EBA memenuhi 32 kriteria KPR sehat SMF
 - Rasio rata-rata tertimbang LTV yang relatif rendah, yaitu: kurang dari 70%
 - Tidak adanya KPR yang tertunggak pada saat Tanggal Cut-Off Final
- d. Struktur transaksi yang solid
 - Dukungan Kredit dalam bentuk dana cadangan yang diberikan oleh SMF

- EBA Kelas A memiliki subordinasi sebesar 8%
- Pokok EBA Kelas B tidak akan mendapatkan pelunasan apabila investor EBA
 Kelas A belum dibayarkan penuh haknya
- Dana Transisi Penyedia Jasa dicadangkan di muka

STRUKTUR TRANSAKSI EFEK BERAGUN ASET



Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

2) Surat Utang

Perseroan melakukan penggalangan dana dari pasar modal sebagai sumber dana untuk disalurkan ke sektor perumahan melalui lembaga penyalur KPR adalah dari hasil penerbitan surat utang termasuk Obligasi dan atau MTN (Medium Term Note) atau surat utang lainnya. Dengan cara demikian diharapkan penyalur KPR secara bertahap akan menggunakan dana jangka menengah/ panjang dari pasar modal sehingga dapat menawarkan KPR dengan bunga fixed untuk jangka panjang.

Surat Utang yang diterbitkan dikembangkan secara bertahap dimulai dari uncollateralized sebagai Corporate Bonds biasa hingga collateralized Bonds dengan underlying portfolio KPR, dengan mempertimbangkan aspek Legal dan Akuntansi Keuangannya

LAPORAN KEUANGAN

Ikhtisar Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (dalam juta Rupiah, kecuali rasio)

Tabel 4. Laporan Keuangan SMF

Votoronoon	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Keterangan	30-Jun-15										
ASET	8.883.516	9.533.867	7.477.641	6.178.648	4.816.830	2.571.117	1.927,471	1.268.212	1.188.150	1.123.148	1.029.802
Aset lancar	1.021.289	1.910.982	601.483	983.309	1.862.438	778.217	530.280	673.117	827.754	1,002.721	1.027.739
Penyaluran pinjaman	6.975.513	6.501.236	6.230.475	4.778.704	2.611.695	1.434.021	938.271	533.639	339.000	100.000	
Efek	836.600	996.970	543.063	331.158	265.435	282.092	402.085	47.197	12.175	12.164	ř.
Aset tetap dan lainnya	50.114	124.679	102.620	85.477	77.262	76.787	56.835	14.259	9.221	8.263	2.063
LIABILITAS	4.787.827	5.569.625	4.686.699	3.531.041	2.308.822	1.142.831	575.889	10.079	7.277	7.373	2.538
Liabilitas lancar	47.052	49.129	37.741	49.911	38.601	25.793	22.415	6.991	5.251	6.109	2.538
Surat utang	4.734.502	5.514.780	4.644.136	3.477.300	2.267,136	1.113.960	549.378				
Liabilitas lainnya	6.273	5.716	4.822	3.830	3.085	3.078	4,098	3.088	2.026	1.264	
EKUITAS	4.095.689	3.964.242	2.790.942	2.647.607	2.508.008	1.428.286	1.351.582	1.258.133	1.180.873	1.115.775	1.027.264
Modal disetor	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Laba-Telah Ditentukan Penggunaannya	380,000	380.000	310.000	240.000	200.000	162.000	116.000	76.000	44.000		
Laba-Belum Ditentukan Penggunaannya	715.689	584.242	480.942	407.607	308.008	266.286	235.582	182.133	136.873	115.775	27.264
		T	v		12	Ų.	- 2	-			
PENDAPATAN	424.279	675.085	537.666	435.989	257.603	218.320	156.960	117.738	103.297	135.825	38.213
Beban Dan Pajak	(292.832)	(501.786)	(392.927)	(295.584)	(177.104)	(140.682)	(63.511)	(40.478)	(38.199)	(47.314)	(10.949)
Laba Bersih	131.447	173.299	144,739	140.405	80.499	77.638	93.449	77.260	65.098	88.511	27.264
Rasio Keuangan	30-Jun-15	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Primary Market Financing to Capital (X)	7.27x	8,26 x	6,01 x	4,26 x	5,24 x	3,30 x	1,85 x	0,94 x	0,41 x	0,10 x	
Keuntungan	38,71%	32,85%	35,08%	41,14%	38,83%	43,53%	74,69%	80,49%	78,98%	87,19%	88,21%
воро	61,29%	67,15%	64,92%	58,86%	61,17%	56,47%	25,31%	19,51%	21,02%	12,81%	11,79%
Laba Terhadap Ekuitas (disetahunkan)	6,42%	5,84%	5,19%	5,30%	5,33%	5,44%	6,91%	6,14%	5,51%	7,93%	2,65%
Hutang Terhadap Ekuitas (X)	1.58x	1,84	2,32	1,74	1,13	1,11	0,55				
PEMBAYARAN PAJAK KE NEGARA	30-Jun-15	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Per tahun	18.710	54.505	51.366	41.746	21.534	22.293	26.507	21.715	11.090	26.554	7.725
Kumulatif	323.823	285.035	230.530	179.164	137.418	115.884	93.591	67.084	45.369	34.279	7.725

4.1. GAMBARAN UMUM HASIL SURVEI WILAYAH KAJIAN

4.1.1. WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA

A. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Pemda Daerah Istimewa Yogjakarta

Dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan bidang Pekerjaan Umum, urusan bidang Penataan Ruang, urusan bidang Perumahan dan urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (DPUP- ESDM DIY). Oleh karena itulah perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Renstra Dinas PUP-ESDM DIY disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas PUP-ESDM DIY untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2017.

Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD tidak bisa bisa lepas dari RPJM Nasional.

Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPJM Daerah sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi.

Maksud penyusunan Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2012-2017 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan dan bidang energi dan sumber daya mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga pelaksanaan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2012-2017 disusun dengan tujuan untuk

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala DinasPUP-ESDM DIY ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2012-2017;
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2012-2017.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renstra Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2013-2017 dan RPJM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten/Kota untuk urusan yang sama.

Tugas, Fungsi, Visi Dan Misi Dinas PU PERA Provinsi Yogyakarta



"Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, peningkatan jumlah rumah layak huni, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang ramah lingkungan"

- Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal dan memadai, merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman yang penjabarannya meliputi:
 - a. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
 - Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

- c. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
- d. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
- e. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,kenyamanan dan kemudahan;
- f. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
- g. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.
- 2) Makna dari ketersediaan jumlah rumah layak huni bagi pemenuhan visi Perumahan:
 - a. Pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
 - Fasilitasi dan dorongan bagi terciptanya iklim yang kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
 - c. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya pendukung seperti sumber daya alam, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusia bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
 - d. Fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
 - e. Fasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh terutama bagi masyarakat perkotaan di DIY.

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Makna pendayagunaan energi dan sumber daya mineral bagi pemenuhan visi ESDM:

- Peningkatan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan usaha energi dan mineral secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- b. Peningkatan nilai tambah energi dan mineral.

Misi:

Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar.

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas.
- b. Meningkatkan pengelolaan dan pembinan bangunan gedung dan rumah negara.
- c. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi.
- d. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan SDA.
- Mengurangi resiko daya rusak air.Mendukung peningkatan Jumlah rumah Layak Huni.
- f. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- g. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan sumberdaya mineral yang berkelanjutan
- h. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi dan sumberdaya mineral.
- i. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan konstruksi di daerah

- Mengembangkan dan mendayagunakan pelayanan Informasi, pengujian konstruksi dan lingkungan.
- k. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance

Isu strategis Bidang Perumahan

- 1) Keterbatasan penyediaan rumah, Sepanjang periode 2006–2010, pertambahan rumah tangga baru di DIY mencapai 6.325 unit. Hal ini tidak mampu diikuti dengan pembangunan rumah baru dan rumah dengan kondisi rusak berat yang tidak dapat dihuni, sehingga kekurangan rumah (backlog) diperkirakan meningkat dari 69.306 unit pada tahun 2005 menjadi 106.454 unit pada akhir tahun 2010.
- 2) Permukiman kumuh yang semakin meluas, Luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, dan tidak layak huni. Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luas.
- 3) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan belum didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. Kualitas suatu rumah juga diukur dengan tingkat aksesibilitas terhadap prasarana, sarana, dan utilititas
- 4) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan.
- 5) Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Sebagian besar masyarakat DIY di sektor informal dan tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga kesulitan untuk

- mengakses kredit perumahan yang disediakan oleh perbankan,karena hanya mengandalkan dana yang bersumber dari bank dan pemerintah.
- 6) Kesenjangan pelayanan untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan di bidang perumahan dan permukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah.

Tugas, Sasaran, Stategi Kebijakan Dan Program

Tabel 4.... Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program

Tujuan , Sasaran , Strategi, Kebijakan dan Program						
Misi Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target Th 2013	Target Th 2017	
1	2	3	4	5	6	
1. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar.	1.1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Pe-nataan Ruang Kws Strategis Provinsi yg mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah	Meningkat-nya kualitas pengaturan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah .pada kawasan Strategis Provinsi	Peningkatan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kws Strategis Provinsi	12 kawasan	19 kawasan	
	1.2. Meningkatk-an kualitas pemanfaatan ruang & pe-ngendalian pemanfaatan ruang	Meningkat-nya kualitas pemanfaatan ruang & pengendalian peman-faatan ruang , melalui dukungan SIPR & monitoring penataan ruang di daerah.	Peningkatan kualitas pe- manfaatan ruang & pengenda-lian peman-faatan ruang ,	50%	90%	
	1.3. Meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkat nya efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi,	Peningka-tanefektifi-tas pengen-dalian peman-faatan ruang	20%	100%	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target Th 2013	Target Th 2017
1	2	3	4	5	6
		Perijinan, pemberian insentif serta pengenaan sanksi			
		1.3.2. Meningkat- nya pengen- dalianpeman-faat ruang melalui pene-tapan per- turan tentang kawasan strategis yg mempunyai nilai budaya	Peningkatan pengendalian pemanfaat ruang me-lalui pene-tapan per-turan tentang kawasan strategis yang mem-punyai nilai budaya	20%	100%
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas	2.1. Meningkatkan fungsi pras-arana dan sa-rana pelayanan publik (air mi-num, air lim- bah, drainase,	.Meningkat-nya keterse-diaan infra-struktur (air minum, yang memadai baik kuan-titas dan kualitas	Peningkatan ketersediaan infrastruktur (air minum, yang mema-dai baik kuantitas dan kualitas	73,87%	87,85%
	persampahan, jalan lingkung-an, dan penataan bangunan dan lingkungan).	2.1.2 Meningkat-nya keter-sediaan infra struktur air limbah, yang mema-dai baik kuan-titas dan kualitas	Peningkatan ketersediaan infrastruk-tur air limbah, yang memadai	14. 400 SR	20. 000 SR
		2.1.3. Meningkat-nya keterse-diaan infra-struktur per-sampahan, yang mema-dai baik kuantitas dan kualitas	Peningkatanketersediaan infrastruktur persam-pahan	50%	70%
		2.1.4. Meningkat-nya keterse-diaan sarana dan pra- sarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan	57%	73%

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target Th 2013	Target Th 2017
1	2	3	4	5	6
		perkotaan			
		2.1.5. Meningkat-nya keter-sediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perdesaan	43%	59%
		2.1.6 Meningka-tnya keter-sediaan sa- rana dan prasarana dasar pen-dukung aks- esibilitas Ka- wasan Agro- politan, Mi- napolitan dan Desa Potensi	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi		
		2.1.7. Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta	Pengurangan jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan Yogyakarta	33,9 %	57%
	2.2. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kebudayaan penunjang pariwisata DIY	Meningkat-nya keterse-diaan kawa-san budaya	Peningkatan ketersediaan kawasan budaya	43,9%	66,3%
pengelolaan dan pembinan bangunan gedung dan rumah negara fungsi penge-lolaan fur Bang-unan Gedung dan Ling-kungan Ge		Meningkat-nya fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan sesuai peraturan	Peningkatan fungsi pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	80%	88%

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target Th 2013	Target Th 2017
1	2	3	4	5	6
		yang berlaku			
4. Meningkatkan aksesibilitas wi-layah	4.1. Meningkatkan Sistem jaringan	Meningkat nya penye-	Peningkatan penyelengga- raan jalan provinsi dalam	72.04 %	77,44 %
dalam mendukung pengembangan	infrastruktur jalan, sesuai dengan	lenggaraan jalan provinsi dalam	kondisi mantap	100%	100%
kawasan bu-daya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi	kapasitas, standard geometrik dan kelas jalan	kon-disi mantap		24,91 %	63,75%
5. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara optimal untuk meningkatkan	5.1. Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi dan rawa	Meningka-tnya layanan jaringan irigasi dan rawa,	Peningkatan layanan jaringan irigasi dan rawa,	76,5 %	82,5 %
kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan SDA.	5.2. meningkatkan ketahanan air yang dipenga-ruhi oleh keter-sediaan sum-ber daya air	Meningkat-nya keterse-diaan air baku	Peningkatan Ketersediaan air baku	700 lt/det	2.100 lt/det
6. Mengurangi resiko daya rusak air	6.1. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infra- struktur sumber daya air	Meningkat-nya kualitas pengendalian banjir	ngendalian banjir		120 titik
7. Mendukung peningkatan Jumlah rumah Layak Huni	7.1. Meningkatkan pengem-bangan sarana dan pra- sarana permukiman bagi terwujud-nya komunitas yang sehat,	Meningkat-nya kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh	29%	51%
		7.1.2. Meningkat nya pember-dayaan masyarakat pada ling-kungan per-mukiman ba-gi terwujud-nya komu-nitas yang sehat	Peningkat an pemberda- yaan masya-rakat pada lingkungan permukiman	44%	64%

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target Th 2013	Target Th 2017
1	2	3	4	5	6
8. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Meningkatkan kualitas Meningkatkan lingkungan kualitas perumahan		Peningkatan kualitas perumahan dan lingkung-an permukiman yang layak huni dan produkti	8%	6 %
9 .Meningkatkan pembinaan dan pengendalian kegiatan energi dan	9.1. Mempertahan-kan kelestarian dan ketersediaan air tanah	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan air tanah	Peningkat an upaya perlindungan, peles-tarian dan pengawetan air tanah	<20%	<20%
sumber-daya mineral yang berke-lanjutan	9.2. Mendorong pemanfaatan secara optimal hasil pertambangan	Terwujudnya Pengembangan kegiatan pengolahan dan pemurnian petambangan	Peningkatan pengelolaan usaha per-tambangan melalui upaya peningkatan nilai tambah bahan galian	9%	13%
	9.3. Mengimplemen- tasikan pelaksanaan konservasi energi	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan efisiensi pemanfaatan energi	Peningkatan upaya penyediaan energi daerah	3%	15%
10. Meningkatkan aksesib-ilitas masya- rakat terhadap energi dan sumberdaya mineral	10.1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi ketenagalistrik-an	Terwujudnya perluasan pembangunan infrastruktur energi ketenagalis-trikan	Peningkat-an akses ru-mah tangga DIY berlistrik	77,40 %	79,80%
	10.2. Meningkatkan ketersediaan energy	Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis listrik dan bahan bakar	Peningkat-an pemanfaat-an energi baru terba-rukan	107,79 SBM	130.10 SBM
	10.3. Meningkatkan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar	Terwujudnya penyediaan infrastruktur distribusi dan pasokan bahan bakar	Peningkat an upaya pengelolan bahan bakar	40%	80%

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Kinerja	Target Th 2013	Target Th 2017
1	2	3	4	5	6
11. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kons-truksi di daerah	11.1. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan konstruksi yang berkelan-jutan.	Meningkatnya pencapaian pelaku, proses, dan produk konstruksi yg berkuali-tas.	pelaku, proses, dan produk konstruksi duk ksi yg		87,5%
12. Mengembang-kan dan men- dayagunakan pelayanan Informasi, pengujian konstruksi danlingkungan.	12.1. Melaksanakan pengembangan dan pendaya-gunaan Infor-masi teknologi pembangunan bidang PUPESDM	Meningkat-nya arus in-formasi dan rujukan tek- nis teknologi pembangun-an bidang PUPESDM	Peningkat-an arus infor-masi dan ru-jukan teknis teknologi pembangun-an bidang PUPESDM	75%	85%
	12.2. Memberikan pelayanan jasa pengujian laborato- rium kualitas mutu lingkungan dan mutu konstruksi	Meningkat-nya penca-paian pero-lehan hasil uji/ Ser-tifikat hasil uji da-lam rangka pelayanan yang meme-nuhi standar.	Peningkatan pencapaian perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji	75%	100%
13 Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta	13.1. Melaksanakan pelayanan ad- ministrasi per- kantoran pada DPUP-ESDM	.Meningkat-nya pelaya-nan adminis-trasi perkan-toran	Peningkatan pela-yanan adminis-trasi per-kantoran	100%	100%
inovatif dengan menerapkan prinsip- prinsip good governance.	13.2. Melaksanakan penyediaan dan pemeliha-raan sarana dan arana aparatur	Meningkat-nya penyedi-aan dan pe-meliharaan sarana dan prasarana apa- ratur	Peningkatanpenyediaan dan peme-liharaan sa-rana dan pra-sarana apa-ratur	100%	100%
	12.3. Melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkat-nya hasil pe-laporan ca-paian kinerja dan keuang-an	Peningkatan hasil pela-poran ca-paian kinerja dan keuang- an	100%	100%

Rumusan kebijakan dan renstra pemerintahan daerah khususnya mengenai pendayagunaan sumber dana jangka panjang untuk perumahan bagi MBR sudah diimplementasikan sesuai arahan pusat. Dinas (yang membidangi perumahan), berperan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

dalam kebijakan yang menyangkut pembiayaan dalam penyediaan perumahan untuk MBR

Pada dasarnya pemerintah berperan dalam penyediaan dana dalam pembiayaan perumahan bagi MBR. Pemerintah memberikan kebijakan khusus untuk mendorong penyediaan perumahan, terutama yang berkaitan dengan pembiayaannya. Ketersediaan sumber daya (infrastruktur finansial) cukup baik dalam mendukung sistem pembiayaan dalam penyediaan perumahan bagi MBR. Pihak Dinas (yang membidangi perumahan) menilai efektivitas sistem pembiayaan dalam penyediaan perumahan selama ini belum optimal sehingga diperlukan koordinasi yang lebih baik.

Secara garis besar masalah di bidang perumahan

- Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengaki-batkan alih fungsi lahan tidak terbendung
- b. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan da-lam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
- c. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah masyarakat berpenghasilan rendah.

Tantangan pembangunan sub bidang Perumahan meliputi:

- a. Memenuhi back log perumahan sebesar 25.298 unit sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
- Adanya pembangunan lingkungan perumahan yang sering tidak tuntas dalam satu wilayah.
- c. Meningkatkan Iklim yang Kondusif dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman
- d. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Para Pelaku
 Pembangunan Perumahan dan Permukiman
- e. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta
- f. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman,

- Perumahan dan Permukiman Sumberdaya Meningkatkan Pendayagunaan melaluiPenerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi bahan bangunan lokal yang murah serta konstruksi bangunan tahan gempa
- h. Mendorong pengembangan sarana prasarana permukiman dan untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat;
- memobilisasi Mengembangkan dan sumber-sumber pembiayaan bagi pengembang-an perumahan dan permukiman;
- Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat;

Telaah Renstra pada Kementerian Perumahan rakyat

Renstra Kementerian Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 02/Permen/M/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014.

Kondisi Perumahan Rakyat

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat yang mempengaruhi kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya adalah :

- A. Keterbatasan penyediaan rumah. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri.
- B. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai.
- Regulasi dan k ebijakan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
- D. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

- mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan.
- E. Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.
- F. Pembiayaan perumahan yang berkelanjutan harus didukung oleh pasar primer dan sekunder yang sehat. Namun, saat ini kinerja pasar primer masih belum efisien karena masih ada k omponen biaya tinggi dalam pembangunan perumahan khususnya dalam perijinan.
- G. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya belum disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun/ memperbaiki rumah.

Tujuan

- Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
- b. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- c. Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur.
- d. Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
- e. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh.
- Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan.
- Meningkatkan sumber-sumber pendayagunaan pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- h. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan permukiman.
- Mendorong peran dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

 Menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman.

Sasaran Strategis

Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.

- a. Perlaksana penataan dan pe ngelolaan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- Terlaksana fasilitasi PSU Kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 700.000 unit.
- Terlaksana penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 655 Ha dengan jumlah penduduk terfasilitasi sebanyak 130.000 jiwa.
- d. Terlaksana pembangunan rumah susun sederhana berupa Rusunawa sebanyak
 36.480 unit.
- e. Terlaksana pembangunan Rumah Khusus sebanyak 5.000 unit termasuk rumah sederhana sewa dan rumah pasca bencana.
- f. Terlaksana fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya berupa pembangunan baru sebanyak 50.000 unit.
- g. Terlaksana fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya berupa peningkatan kualitas sebanyak 50.000 unit.
- h. Terlaksana fasilitasi penyediaan PSU Perumahan Swadaya berupa bantuan stimulan PSU Swadaya sebanyak 50.000 unit.
- Terlaksana fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi lahan dan bangunan rumah bagi MBR sebanyak 30.000 unit.
- j. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan kearifan lokal.
- k. Terlaksana penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 1.350.000 unit.
- Meningkatnya mobilisasi dan pemanfaatan sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan perumahan dan permukiman.

- Terselenggara fungsi pelayanan bidang perumahan dan permukiman di tingkat pusat dan daerah (33 Provinsi).
- Terlaksana DAK Perumahan dan Permukiman berupa fasilitasi PSU kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 320.000 unit.
- Terlaksana kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) bidang perumahan dan permukiman.
- p. Terselenggara tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat secara efektif dan efisien.

A. BANK BPD YOGYAKARTA

Visi dan Misi Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi: Menjadi Bank Terpercaya, Istimewa dan Pilihan Masyarakat

Misi:

- 1) Menyediakan solusi kebutuhan keuangan masyarakat dengan memberikan pengalaman perbankan yang berkesan.
- 2) Menjalankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan bisnis yang beretika untuk meningkatkan nilai perusahaan.
- 3) Mencapai SDM yang unggul, berintegritas dan profesional.
- 4) Mengembangkan keunggulan kompetitif dengan layanan prima dan produk yang inovatif berbasis budaya untuk menjadi Regional Champion yang berkelanjutan.
- Menjalankan fungsi Agen Pembangunan yang fokus mengembangkan sektor UMKM, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan menjaga lingkungan.

Bank BPD Yogyakarta merupakan salah satu bank Penyalur KPR Bersubsidi (KPR Sejahtera FLPP). KPR Bersubsidi atau lebih di kenal dengan nama KPR Sejahtera FLPP merupakan program perumahan dari pemerintah untuk membantu masyarakat menengah memiliki rumah sendiri. Guna mendukung progran KPR Sejahtera FLPP ini, pemerintah menunjuk sejumlah bank Penyalur KPR Bersubsidi / KPR Sejahtera FLPP.

Syarat KPR Sejahtera FLPP adalah KPR Bersubsidi program kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan dan tetap

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

sepanjang jangka waktu kredit, terdiri atas KPR Sejahtera Tapak untuk pembelian rumah Tapak dan KPR Sejahtera Susun untuk pembelian Rumah Susun.

Program pemerintah dalam memberikan bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau biasa juga di sebut program KPR Sejahtera FLPP merupakan salah satu jenis KPR Bersubsidi yang bisa di manfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang ingin mempunyai rumah yang layak huni. Untuk mengajukan KPR Sejahtera FLPP ini, terdapat beberapa persyaratan bagi nasabah atau debitur KPR Sejahtera FLPP yang harus di penuhi.

Syarat KPR Sejahtera FLPP (KPR Bersubsidi)

- 1) Penduduk yang berpenghasilan tetap dengan gaji pokok untuk Rumah Sejahtera Tapak paling besar Rp 3,5 juta dan Rusun Rp 5,5 juta.
- 2) Belum pernah mempunyai rumah
- 3) Belum pernah menerima subsidi perumahan dan FLPP
- 4) Mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 5) Menyerahkan fotokopi (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan pokok yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan pokok yang dipersyaratkan di poin 1.

BLU PPP Kemenpera dalam penyediaan dana FLPP selain berhubungan dengan MBR juga berkoordinasi dengan pengembang sebagai penyedia pasokan rumah, bank pelaksana sebagai lembaga keuangan penyaluran dana FLPP dan Pemda untuk memfasilitasi kemudahan perijinan, sertifikasi tanah dan fasilitasi penyediaan lahan. Jika ingin memperoleh program KPR FLPP Sejahtera, masyarakat dapat datang langsung ke pengembang guna menentukan lokasi rumah yang ingin dibeli. Kemudian calon nasabah membayar booking fee ke pengembang serta melengkapi dokumen persyaratan yang ditentukan bank pelaksana KPR Bersubsidi dalam hal ini sebagai pelaksana KPR Sejahtera FLPP. Selanjutnya pengembang akan meneruskan dokumen persyaratan nasabah ke pihak bank. Selain datang langsung ke pengembang perumahan, calon nasabah juga bisa mendapatkan informasi KPR Sejahtera FLPP dari pihak Bank pelaksana. Pihak bank akan memberikan informasi pengembang perumahan mana saja yang mengikuti program KPR

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Sejahtera FLPP. Setelah itu calon nasabah mendatangi pengembang yang dituju. Setelah nasabah membayar uang muka dan melengkapi dokumen, selanjutnya pihak bank melakukan akad kredit dengan nasabah.

Selain 5 persyaratan umum diatas, pihak Bank pelaksana program KPR FLPP Sejahtera (KPR Bersubsidi) juga bisa mengenakan beberapa syarat KPR Sejahtera FLPP tambahan pada calon nasabah. Syarat KPR Sejahtera FLPP (KPR Bersubsidi)

Produk dan Layanan Bank BPD DIY

Giro

- Digunakan sebagai alat transaksi non tunai
- · Kemudahan akses kliring nasional
- Fasilitas on-line di semua kantor pelayanan yang memberikan kelancaran dan kemudahan dalam berbisnis.
- Salinan rekening (Rekening Koran) lengkap berisi mutasi/transaksi dikirim ke pemegang rekening setiap bulan, sehingga dapat dengan mudah memantau posisi saldo giro

Deposito

- Deposito Berjangka dengan pilihan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan
- Minimal Rp 500.000,00
- Sistem perpanjangan ARO (Automatic Roll Over)
- Tingkat Suku bunga menarik

Kredit Mikro Makarya

- Kredit yang ditujukan kepada pedagang di pasar, baik untuk modal kerja, investasi, maupun pembelian kios/los pasar baru
- Sistem angsuran jemput bola, bisa harian, mingguan, bulanan, atau pasaran
- Bisa dengan sistem "sebrakan"
- Bonus Angsuran Tepat Waktu (BATW)
- Agunan kredit dapat dengan los pasar

Ikhtisar Keuangan BPD Yogyakarta

Perkembangan ikhtisar laporan keuangan dan kinerja keuangan bank Pembangunan daerah (BPD) Yogyakarta dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.... Ikhtisar Keuangan (dalam juta rupiah)

		2011	2012	2013	2014
1	Total Aset	4.807.602,00	5.610.521,00	6.523.243,00	7.821.133,00
2	Jumlah Pendapatan	514.279,00	568.222,00	651.704,00	786.969,00
3	Jumlah Biaya	392.766,00	429.085,00	477.406,00	575.896,00
4	Laba Sebelum Pajak	121.514,00	139.137,00	174.298,00	211.073,00
5	Laba Setelah Pajak	88.704,00	102.631,00	128.334,00	156.163,00
6	Pendapatan Operasional	513.509,00	567.098,00	649.041,00	786.172,00
7	Biaya Operasional	384.914,00	424.493,00	472.185,00	571.055,00
8	Kredit yang Diberikan	2.908.443,00	3.381.579,00	4.097.838,00	5.194.759,00
9	Kredit Bermasalah	34.570,00	28.115,00	36.857,00	64.096,00
10	Jumlah Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga)	3.694.972,00	4.682.290,00	5.477.784,00	6.368.034,00
11	Modal Inti	413.647,00	453.444,00	621.748,00	816.394,00
12	Modal Pelengkap	35.778,00	34.528,00	44.344,00	55.853,00
13	Jumlah Modal	449.425,00	487.972,00	666.092,00	872.247,00
14	Total Aset Produktif	3.993.453,00	4.339.881,00	6.165.205,00	7.369.674,00
15	Aset Produktif Bermasalah	34.570,00	28.260,00	36.857,00	64.096,00
16	Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	3.439.581,00	3.389.589,00	4.246.105,00	5.255.151,00

Sumber: BPD Yogyakarta

Tabel 4..
Perkembangan Ratio Keuangan BPD Yogyakarta

No.	Rasio Keuangan (dalam %)	2011	2012	2013	2014
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	13,07	14,40	15,69	16,60
2	Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif		0,65	0,60	0,87
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	0,69	0,59	0,50	0,78
4	Non Performing Loan (NPL)	1,19	0,84	0,90	1,23
5	Return On Asset (ROA)	2,69	2,56	2,71	2,88
6	Return On Equity (ROE)	21,30	22,90	25,36	22,59
7	Net Interenst Margin (NIM)	9,29	9,02	8,38	7,83
8	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	74,96	74,85	72,75	72,64
9	Loan to Deposit Ratio (LDR)	78,71	71,89	73,67	80,34

Sumber: BPD Yogyakarta

Bank BPD mempunyai bidang khusus yang menangani perumahan,Peran BPD dalam pembiayaan untuk penyediaan perumahan bagi MBR sudah cukup baik. Bank sudah mencantumkan pembiayaan KPR dalam rencana Bisnis Bank bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kementrian PU PERA melalui FLPP,namun dalam pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan. Pemerintah memberikan insentif/subsidi atau kebijakan khusus kepada BPD dalam hal pembiayaan untuk mendorong penyediaan perumahan bagi MBR. SMF sebagai lembaga sistem pembiayaan perumahan jangka panjang,dirasakan belum banyak dirasakan.

B. KOPERASI KARYAWAN HOTEL HYAT

Koperasi hotel Hyat dibentuk pada tahun 2000 atas dasar kebutuhan anggotanya dalam hal pemenuhan kebutuhan di bidang simpan pinjam dan unit toko. Koperasi ini berkembang cukup pesat karena pengurus membuat terobosan dalam pengeloaan koperasinya,salah satu hal yang menonjol adalah adanya kepemilikan saham bagi

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

anggotanya,sehingga koperasi dapat memupuk modal sendiri dan anggota memperoleh keuantungan dari peningkatan harga saham. Namun demikian kepemilikan dari saham tidak diikuti dengan pertambahan hak suara,sehingga masih memenuhi kriteria jati diri koperasi.

Hal yang menarik dari kegiatan koperasi ini adalah koperasi memperhatikan kebutuhan perumahan bagi anggotanya. Koperasi sudah mencantumkan pembiayaan KPR dalam rencana bisnis koperasi. Koperasi bekerja sama dengan pengembang untuk membangun 32 rumah untuk tahap pertama dari 250 karyawan yang diseleksi. Down Payment rumah sebesar 10 persen disubsidi oleh koperasi,dimana karyawan dapat mencicil selama 20 tahun dengan tingkat bunga 1%,hal ini dapat dilakukan koperasi mengingat koperasi sudah dapat memupuk modal sendiri sebesar 1.5 M sehingga dapat membantu menyediakan uang muka yang harus dibayarkan ke developer. Sistem seperti ini sangat membantu anggota.

Pelaksanaan selama ini berjalan lancar,kendala yang muncul adalah jika karyawan yang akan diberi fasilitas ini ternyata tidak lolos persyaratan kredit bank (misalnya terkendala oleh BI checking),sehingga koperasi sulit membantu, diupayakan di masa yad koperasi memiliki kemampuan modal sendiri yang lebih besar sehingga bagi yang tidak lolos persyaratan bank dapat dibiayai oleh koperasi.

C. HOUSING RESOURSES CENTRE (HRC)

Betiap rumah tangga membutuhkan rumah yang layak huni untuk dapat hidup sejahtera. Faktanya, sebagian besar masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan perumahannya secara swadaya, yaitu 57,87% di perkotaan dan 74,51% di perdesaan (BPS, 2004). Setiap tahun, kebutuhan rumah rata-rata adalah 800.000 unit, namun tidak diikuti dengan seimbang dalam penyediaannya. Ketimpangan ini paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kondisi ini diperparah dengan kurangnya akses MBR terhadap sumber daya perumahan. Baik keterbatasan secara finansial, kurangnya akses legal, keterbatasan instrumen atau mekanisme pendukung, maupun keterbatasan pengetahuan teknis.

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

HRC hadir untuk mempersempit kesenjangan ini. Dengan peran sebagai intermediasi integratif yang mensinergikan berbagai sumber daya perumahan dan perkotaan, HRC mencoba menjawab kebutuhan MBR dengan menjadi lembaga perumahan yang kompeten dan mendukung kepentingan berbagai pemangku kepentingan. HRC memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan perwujudan iklim sehat di bidang perumahan. Langkah ini diambil dengan membentuk intrepreneur perumahan yang handal.

HRC memiliki aktivitas yang luas namun fokus pada pengembangan pengetahuan (penelitian dasar dan terapan, peramalan, dan studi kebijakan). Juga memiliki perhatian besar pada pengembangan kapasitas atau capacity building sehingga HRC pun menyediakan diri untuk membangun organisasi dan individu. Dalam hal teknis, HRC mengakomodasi kebutuhan asistensi atau pendampingan, perencanaan dan perkiraan, serta transfer pengetahuan dan berbagi baik melalui komunitas maupun dengan diseminasi informasi.

HRC menyediakan diri untuk melayani kebutuhan masyarakat akan penataan perumahan dan perkotaan yang sehat, layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan

Visi dan Misi *Housing Resource Center* (HRC)

- 1) Lembaga perumahan yang kompeten dan mendukung berbagai stakeholders perumahan terutama dalam melaksanakan peran mediatif integratif
- 2) Mengembangkan iklim sehat di bidang perumahan dengan membentuk entrepreneur perumahan yang handal
- 3) Lembaga terdepan yang inovatif dalam bidang perumahan.

Housing Resource Center (HRC) digagas oleh para pakar perumahan perkotaan dari: UN-Habitat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Kementerian Perumahan Rakyat, pada pasca bencana gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006. Keluarnya MoU (Memorandum of Understanding) antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan Pemerintah DIY pada Oktober 2006 menjadi penanda kelahiran HRC.

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

HRC, sebagai sebuah lembaga intermediari integratif yang mensinergikan berbagai sumber daya perumahan dan perkotaan, hadir untuk memberikan solusi terhadap masalah perumahan, perkotaan, kebencanaan, dan lingkungan hidup bagi berbagai pemangku kepentingan. HRC melayani kebutuhan masyarakat akan penataan perumahan dan kawasan yang sehat, aman, nyaman, produktif dan lestari. HRC bekerja sama dengan pemerintah maupun non pemerintah (akademisi, praktisi, dan swasta) dalam implementasi dan pengembangan kebijakan (policy development), peningkatan kapasitas (capacity building), dan pengelolaan pengetahuan (knowledge management). Di tingkat provinsi program kerja yang dilakukan HRC:

- enyusunan cetak biru dan roadmap kebijakan
- Studi analisis kebijakan publik
- Penyusunan kebijakan publik
- Pengelolaan event informatif
- Pembentukan forum komunikasi
- Pembentukan kelompok kerja

Tingkat kota:

- Studi dan analisi kebijakan publik
- Penyusunan kebijakan publik
- Manajemen dan pendataan
- Perencanaan dan pengembangan kota tematik

Tingkat perumahan & kawasan permukiman:

- Perencanaan kawasan
- Pengembangan kawasan
- Penataan kawasan
- Pemprofilan kampung dan kawasan
- Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Slum upgrading

Tingkat rumah:

- Konsultasi desain rumah
- Akses pembiayaan
- Informasi rumah sehat

Tingkat kompetensi:

- Konsultasi desain rumah
- Akses pembiayaan
- Informasi rumah sehat

Penanganan kawasan kumuh merupakan upaya nyata untuk mendukung pewujudan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang lebih baik di Indonesia. Program dilakukan melalui pemberian bantuan teknis bagi masyarakat kawasan kumuh, berupa: edukasi rumah dan lingkungan sehat, konsultasi dan perancangan rumah sehat, penyusunan rencana bisnis usaha produktif lingkungan, dan mendekatkan akses pembiayaan rumah sehat. Hasilnya, kawasan kumuh dapat terintegrasi dengan sistem kota.

Pengguna Jasa:

Pemerintah lokal dan nasional, masyarakat, peneliti, LSM, pihak terkait yang memerlukan program penanganan kawasan kumuh.

Pengembangan kawasan merupakan upaya strategis untuk membangun daya saing kawasan (dusun/kampung atau desa/kelurahan) melalui penataan kawasan, dengan didasarkan pada potensi dan karakter lokal. Program dilakukan secara partisipatif dan inklusif, yaitu merangkul semua warga dapat berkontribusi dalam pengembangan kawasan. Hasil program berupa rencana penataan masa depan kawasan dan rencana investasi pembangunan jangka menengah.

Aktivitas terkait program pengembangan kawasan:

- Perencanaan kawasan
- Pengembangan kawasan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

- Penataan kawasan
- Pemprofilan kampung dan kawasan
- Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Slum upgrading

- Desain, program pengembangan kawasan
- Menghubungkan institusi terkait

Pengguna jasa:

Unit pemerintah lokal dan nasional yang berinisiatif untuk melakukan kegiatan pengembangan kawasan.

Masyarakat/ lembaga donor/pihak terkait yang memerlukan kegiatan pengembangan kawasan terhadap suatu rencana terkait pada bidang permukiman dan perkotaan.

Pengembangan kawasan merupakan upaya strategis untuk membangun daya saing kawasan (dusun/kampung atau desa/kelurahan) melalui penataan kawasan, dengan didasarkan pada potensi dan karakter lokal. Program dilakukan secara partisipatif dan inklusif, yaitu merangkul semua warga dapat berkontribusi dalam pengembangan kawasan. Hasil program berupa rencana penataan masa depan kawasan dan rencana investasi pembangunan jangka menengah.

Penelitian kebijakan perumahan dan perkotaan merupakan sebuah inisiatif dalam perumusan kebijakan perumahan dan perkotaan yang berbasis riset untuk menjawab isu dan tantangan lokal dan global. Program dilakukan secara independen maupun kerjasama penelitian dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan publik yang strategis dan implementatif.

Pengguna jasa:

Pemerintah pusat dan daerah (provinsi & kabupaten/ kota) yang berinisiatif untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan program (bagian dari kegiatan persiapan maupun monitoring evaluasi)

Swasta/LSM/NGO/lembaga lain yang memerlukan kegiatan penelitian terhadap suatu rencana terkait pada bidang permukiman dan perkotaan

Event Housing Resource Center (HRC)

1) Klinik Rumah Sehat (Home Design Consultation)

Memberikan layanan kepada masyarakat untuk konsultsi rumah layak dan sehat mulai dari desain hingga rencana pembiayaan. Pelayanan Klinik RUmah Sehat diselenggarakan di kantor HRC dan pusat-pusat kegiatan MBR (Klinik Rumah Sehat keliling). Masyarakat dapat menghubungi HRC untuk pelayanan ini supaya diselenggarakan di lingkungannya.

Aktivitas yang dilaksanakan:

Pendampingan desain perumahan dan konsultasi gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, HRC bersama dengan tim arsitek professional memberikan jasa konsultasi dan estimasi perkiraan biaya konstruksi.

Menyediakan informasi dalam peraturan pemerintah, izin membangun, subsidi keuangan, servis teknis dari pihak terkait yang fokus pada perumahan sehat dan perkembangan perkotaan

Bersama dengan lembaga keuangan makro dan bank menyediakan kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Pengguna jasa:

Masyarakat berpenghasilan rendah, produsen bahan bangunan, lembaga keuangan mikro.

2) Pelatihan, Lokakarya dan Kuliah Umum (Training, Workshop dan Kuliah Umum) Pelatihan, lokakarya dan kuliah umum yang dilakukan HRC menyajikan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan dan tren yang berkembang dan diminati oleh akademisi, praktisi, dan stakeholder pada bidang perumahan perkotaan.

Aktivitas yang dilaksanakan:

Penyelenggaraan pelatihan, lokakarya dan kuliah umum bidang perumahan dan perkotaan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Pengguna jasa:

Pemerintah pusat dan daerah (provinsi & kabupaten/ kota) yang berinisiatif untuk melakukan kegiatan pelatihan, lokakarya dan kuliah umum bidang perumahan dan perkotaan.

Swasta/LSM/NGO/lembaga lain yang memerlukan kegiatan pelatihan, lokakarya dan kuliah umum terkait pada bidang permukiman dan perkotaan

Masyarakat yang concern terhadap kegiatan pengembangan permukiman dan penataan kota

3) Kunjungan Pada Kawasan Pembelajaran (Best Practice & Fieldtrip)

Studi eksplorasi pada kawasan best practice merupakan sarana untuk meningkatkan referensi dalam membentuk masyarakat pembelajar. Best practice tidak terbatas di Indonesia tapi juga luar negeri yang merepresentasikan pengelolaan kawasan modern, seperti Singapura, Jepang, Hongkong, Belanda, Cina dan lain-lain.

Aktivitas yang diselenggarakan:

- Diskusi dengan expert di lokasi best practice
- Penyusunan rencana aplikasi di daerah asal

Pengamatan terhadap beberapa hal:

- Perencanaan pembangunan kota / wilayah
- Pembangunan kawasan ramah lingkungan
- Teknik pengelolaan air
- Pengelolaan alat transportasi
- Revitalisasi kawasan sungai
- Revitalisasi kawasan heritage
- Penerapan teknologi
- Pemberdayaan Masyarakat

Pengguna jasa:

- Pemerintah Daerah
- Masyarakat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
- Mahasiswa Kuliah Kerja lapangan (KKL)

- Mahasiswa Kuliah Kerja Praktek (KKP)
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- Akademisi
- Pemerhati permukiman

EDU Housing Resource Center (HRC)

Praktek Kerja Profesional (Internship)

HRC memberikan peluang pengalaman bagi peserta magang (mahasiswa & umum) sehingga di masa depan alumni dapat berperan banyak dalam memberikan masukan kebijakan perumahan perkotaan. Sejak awal 2007 hingga awal 2015, HRC telah meluluskan 45 angkatan dengan 253 profesi

2) Joint Center

Kegiatan penelitian dalam baik negeri maupun swasta serta pemerhati perumahan dan perkotaan yang berkelanjutan. HRC mengundang dalam kerjasama dalam mewujudkan perumahan dan perkotaan yang sehat, terjangkau, dan layak huni di Indonesia.

Aktivitas yang dilakukan:

- Penelitian terapan
- Studi kebijakan
- Aktivitas peningkatan kapasitas
- Komunikasi
- Diseminasi hasil penelitian

Pengguna Jasa:

Ahli perumahan dari LSM, akademisi, peneliti, praktisi dan pihak terkait lainnya.

Pamong Belajar Tata Kota

Pemerintah daerah khususnya kepala desa / lurah memiliki tanggung jawab yang besar atas pembangunan desa terlebih dengan adanya UU Desa yang memberikan tantangan tersendiri bagi perangkat desa. Bila dilebih makro hingga level Kabupaten / Kota, seorang bupati / walikota harus mampu menyiapkan program pembangunan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

wilayah yang berbasis kebutuhan lokal. Program ini dapat menjadi sebuah pembelajaran untuk menyusun dokumen perencanaan wilayah hingga aplikasinya.

Aktivitas yang dilakukan:

- Pemetaan permasalahan dan potensi wilayah
- Kompilasi, pengolahan dan penyajian data dan analisa
- Perumusan strategi kebijakan dan rekomendasi
- Monitoring dan evaluasi

Pengguna jasa:

Aparat pemerintahan di lingkup dusun, desa / kelurahan, kecamatan hingga Bupati / Walikota.

Pengurus lembaga keswadayaan masyarakat di tingkat pedesaan seperti UKM (usaha kecil menengah) dan kelompok kerajinan lokal.

4.2.3. WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

A. Bappeda Provinsi Jawa Timur

Tugas Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang perumahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- Penyiapan kebijakan dan strategi Pengembangan perumahan
- Pembinaan dan pengaturan bidang perumahan yang meliputi penyiapan produk dan sosialisasi peraturan serta pemberdayaan masyarakat
- Pelaksanaan program Pengembangan perumahan dan prasarana sarana lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan
- Pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa/Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAWA/RUSUNAMI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

Permasalahan bidang Perumahan

Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau

- Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan
- Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST & Kawasan permukiman perdesaan

6 Pengembangan perumahan

Sasaran Pengembangan Perumahan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 sampai dengan 2019, adalah:

- Menurunnya jumlah backlog perumahan
- Meningkatnya presentase masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki akses rumah layak huni
- Meningkatnya pembangunan Rusunawa
- Meningkatnya jumlah renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman Pembangunan PSU dan kawasan khusus
- Meningkatnya dukungan prasarana dan sarana dikawasan agropolitan
- Meningkatnya pelatihan dan sertifikasi bidang jasa konstruksi bagi masyarakat pekerja konstruksi
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan PNPM Perkotaan dan PPIP Perdesaan
- Meningkatnya pengembangan teknologi dan informasi bidang perumahan dan permukiman
- Meningkatnya penelitian dan pengujian bahan dan struktur bangunan perumahan dan permukiman

Strategi Pengembangan Perumahan

- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak khusunya bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah
- Pembangunan Sarana Utilitas (PSU)
- Pembangunan jalan usaha tani
- Pendidikan dan pelatihan kemasyarakatan produktif melalui jasa konstruksi
- Pendampingan dan evaluasi PNPM dan PPIP

- Pengembangan teknologi dan informasi serta pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman
- Renovasi gedung Negara
- Menyelengaarakan studi-studi inventarisasi potensi, permasalahan dan kebutuhan infrastruktur permukiman
- Meningkatnya kualitas gedung negara.
- Tersusunnya program kebutuhan infrastruktur terutama di bidang keciptakaryaan.

Kebijakan Pengembangan Perumahan

- Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
- Peningkatan pembangunan PSU di kawasan permukiman
- Peningkatan pembangunan jalan usaha tani di kawasan Agropolitan Jawa Timur
- Pendidikan dan pelatihan kemasyarakatan produktif melalui jasa konstruksi dalam menghadapi AFTA 2015
- Pendampingan dan evaluasi PNPM dan PPIP
- Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan
- Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan infrastruktur permukiman
- Renovasi gedung-gedung Negara

Program Dan Kegiatan Bappeda Prov Jatim Di Bidang Perumahan

Program Pengembangan Perumahan

Program ini bertujuan mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman, dan terjangkau, terutama bagi penduduk miskin dan berpendapatan rendah, melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, pengembangan Kasiba/Lisiba, serta Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

meningkatkan kualitas perumahan agar tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi dan berkemampuan mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dan berkelanjutan, antara lain meliputi:

- Penyediaan rumah sederhana sehat, dan prasarana lingkungan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penduduk miskin.
- Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di perkotaan untuk penduduk miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah
- Revitalisasi kawasan kumuh melalui perbaikan lingkungan permukiman
- Pemulihan perumahan yang rusak akibat bencana alam
- Pengembangan kawasan siap bangun dan/atau lingkungan siap bangun di kotakota metropolitan dan kota-kota besar
- Fasilitasi bantuan teknis dan pembiayaan perbaikan rumah keluarga miskin yang sangat tak layak huni
- Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh
- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat
- Fasilitasi kerja sama dengan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan perumahan yang layak, sehat, dengan harga yang terjangkau
- Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan mekanisme relokasi permukiman ke tempat yang layak, aman, dan sehat, serta mencegah penggusuran tanpa kompensasi yang adil dan layak.
- Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan
- Pengembangan teknologi tepat guna dan penelitian bidang perumahan dan sarana permukiman, untuk menghasilkan perumahan dan permukiman yang sehat, layak, dengan harga terjangkau.
- Indikator yang akan dicapai yaitu prosentase rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah, jumlah rusun terbangun, jumlah kawasan perumahan yang dibangun PSU nya, dan jumlah monev renovasi RTLH

Rencana Pendanaan, Indikator Kinerja Dan Sasaran

Untuk Program Pengembangan Perumahan alokasi yang dianggarkan selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 158.522.445.294

Tabel 4.... Target Kinerja Program Prioritas dan Pendanaan

NO	KODE	Program dan Kegiatan						Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2015	2016	2017	2018	2019	Rp
	1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	326,465,091	335,956,427	346,346,815	356,737,219	367,439,336	1,732,944,888
	1.03.07	rogram Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daera	236,433,724	243,307,574	250,832,538	258,357,514	266,108,239	1,255,039,589
	1.03.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,909,957,995	6,081,778,513	6,269,874,437	6,457,970,670	6,651,709,791	31,371,291,406
	1.03.11	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1,000,000,000
	1.04.15	Pengembangan Perumahan	41,692,720,069	15,087,992,076	38,610,191,284	18,291,210,412	44,840,331,453	158,522,445,294
1	1.04.15.012	Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap	1,331,549,000	1,000,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	6,831,549,000
<u> </u>		bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar	2,332,343,000	2,000,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	1,500,000,000	0,031,343,000
2	1.04.15.021	Pengembangan kawasan agropolitan, pembangunan/perbaikan sarana prasarana kawasan	500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000
3	1.04.15.022	Perbaikan jalan/saluran lingkungan permukiman	1,500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	6,500,000,000
4	1.04.15.046	Peningkatan sarana prasarana permukiman kawasan khusus	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	6,000,000,000
5	1.04.15.050	Pengembangan dan Pengelolaan Rusunawa	19,750,000,000	2,750,000,000	20,750,000,000	2,000,000,000	21,750,000,000	67,000,000,000
6	1.04.15.051	Dana Pendamping PNPM	1,450,000,000	1,200,000,000	1,900,000,000	1,200,000,000	2,340,331,000	8,090,331,000
7	1.04.15.056	Pembangunan/Rehabilitasi bangunan gedung pemerintah	2,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	2,000,000,000	4,000,000,000	12,000,000,000
Ľ	1.04.15.050	provinsi Jawa Timur	2,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	2,000,000,000	4,000,000,000	12,000,000,000
8	1.04.15.062	Pendampingan pembuatan laporan pelaksanaan renovasi RTLH di Jatim	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	7,500,000,000
9	1.04.15.075	Pengembangan teknologi tepat guna bidang perumahan dan permukiman	1,250,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,750,000,000	7,000,000,000
10	1.04.15.076	Pengembangan data/informasi bidang perumahan dan permukiman	1,250,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,750,000,000	7,000,000,000
11	1.04.15.078	Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pembinaan jasa konstruksi	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	5,000,000,000
12	1.04.15.082	DED Pengembangan kawasan baru	7,000,000,000					
13	1.04.15.083	Penyusunan perencanaan pengembangan Infrastruktur wilayah perbatasan	750,000,000	750,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	4,500,000,000
14	1.04.15.084	Penyusunan perencanaan Pengembangan Infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh	750,000,000	750,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	4,500,000,000
15	1.04.15.085	Identifikasi kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai antisipasi perkembangan kawasan pesisir	411,170,000	400,000,000	960,191,000	1,091,210,000	1,000,000,000	3,862,571,000
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	2,300,100,000	2,416,325,398	2,585,468,176	3,024,338,809	777,033,953	11,103,266,336
1	1.03.45.001	Penyediaan sarana air limbah	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	4,000,000,000
2	1.03.45.002	Pembangunan dan perbaikan saluran air/plengsengan/drainase	1,300,100,000	1,416,325,000	1,585,468,000	2,024,338,000	777,033,000	7,103,264,000
<u> </u>		Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum	6,207,179,931	6,641,682,526	5,078,340,540	7,305,850,779	5,586,174,594	30,819,228,370
-	1.03.46.001	Pembangunan Sarana Air Bersih di perdesaan	5,707,179,000	5,891,682,000	4,328,340,000	6,305,850,000	5,086,174,000	27,319,225,000
2	1.03.46.002	Pendataan dan pemetaan potensi kawasan Rawan Air	500,000,000	750,000,000	750,000,000	1,000,000,000	500,000,000	3,500,000,000
<u> </u>		Program Perencanaan Tata Ruang	4,100,000,000	4,510,000,000	4,961,000,000	5,457,100,000	6,002,810,000	25,030,910,000
_	1.05.15.010	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang Survey dan Pemetaan	350,000,000 1,200,000,000	385,000,000 1,320,000,000	423,500,000 1,452,000,000	465,850,000 1,597,200,000	512,435,000 1,756,920,000	2,136,785,000 7,326,120,000
3	1.05.15.018	Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kaw. Strategis Provinsi	550,000,000	605,000,000	665,500,000	732,050,000	805,225,000	3,357,775,000
4	1.05.15.031	Penyusunan Rencana Rinci Kaw. Strategis Provinsi	1,400,000,000	1,540,000,000	1,694,000,000	1,863,400,000	2,049,740,000	8,547,140,000
-	1.05.15.064	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Perdesaan	600,000,000	660,000,000	726,000,000	798,600,000	878,460,000	3,663,060,000
Ť		Program Pemanfaatan Ruang	2,100,000,000	2,310,000,000	2,541,000,000	2,795,100,000	3,074,610,000	12,820,710,000
1	1.05.16.002	Penyusunan norma, standar, dan kriteria Pemanfaatan Ruang	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266, 200, 000	292,820,000	1,221,020,000
-	1.05.16.003	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	400,000,000	440,000,000	484,000,000	532,400,000	585,640,000	2,442,040,000
3	1.05.16.007	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	100,000,000	110,000,000	121,000,000	133,100,000	146,410,000	610,510,000
4	1.05.16.008	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kab/kota	500,000,000	550,000,000	605,000,000	665,500,000	732,050,000	3,052,550,000
5	1.05.16.009	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	600,000,000	660,000,000	726,000,000	798,600,000	878,460,000	3,663,060,000
-	1.05.16.022	Pelatihan aparat dalam rangka pemanfaatan ruang	150,000,000	165,000,000	181,500,000	199,650,000	219,615,000	915,765,000
7	1.05.16.023	Sosialisasi kebijakan pemanfaatan ruang	150,000,000	165,000,000	181,500,000	199,650,000	219,615,000	915,765,000
		1.05.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		880,000,000	968,000,000	1,064,800,000	1,171,280,000	4,884,080,000
-	1.05.17.004	Pelatihan aparat dalam pengendalian peanfaatan ruang	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	292,820,000	1,221,020,000
	1.05.17.005 1.05.17.006	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	292,820,000	1,221,020,000
3	1.05.17.007	lintas kab/kota Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	292,820,000	1,221,020,000
Ě		Total						

Sumber: Bappeda Prov Jatim Di Bidang Perumahan

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka
Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Tabel 4... Target Rencana Program dan Kegiatan Program Pengembangan perumahan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN IND					IDANAAN INDIKA	(ATIF				
PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019			
			Target	Target	Target	Target	Target			
Program Pembangunan Perumahan										
Pengembangan dan pengelolaan	Perumahan	Presentase rumah layak huni untuk MBR	41.86%	44.92%	48.52%	51.87%	58%			
Rusunawa	retunional	Jumlah rusun yang terbangun (TB)	1 TB	-	1TB		1TB			
Pendampingan penyusunan laporan renovasi RTLH	Tata Bangunan	Jumlah RTLH yang direnovasi (unit)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota besar		Jumlah PSU yang dibangun(kawasan)	10	10	10	10	10			
Perbaikan jalan/saluran lingkungan permukiman										
Peningkatan sarana prasarana permukiman kawasan khusus (ponpes, daerah tertinggal, nelayan, dan perbatasan)	Perumahan	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun(m)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000			
Pengembangan kawasan agropolitan, pembangunan/perbaikan sarana prasarana kawasan agropolitan Jawa Timur		Jalan usaha tani yang dibangun (m)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000			
Pelatihan dan sertifikasi bagi masyarakat pekerja konstruksi di kab/kota di Jatim	UPT	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja konstruksi	1200	1200	1400	1600	1800			
Sosialisasi pelaksanaan PNPM, PPIP	Sungram/Sekretariat	Jumlah OMS dan BKM yang mengikuti kegiatan	36	36	36	36	36			
Pengembangan dan penyebaran informasi teknologi bidang perumahan dan permukiman yang berkelanjutan	UPT	Jumlah penyebaran informasi dan sosialisasi teknologi bidang perumahan dan permukiman	6 Dok	6 Dok	6 Dok	8 Dok	8 Dok			
Pengembangan penelitian teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan pengujian bahan dan struktur		Jumlah Penelitian Teknologi tepat guna dan pengujian bahan dan struktur bidang perumahan dan permukiman	6 Dok	6 Dok	6 Dok	8 Dok	8 Dok			
Pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung pemerintah Jatim	Tata Bangunan	Jumlah gedung negara yang dibangun/direnovasi	10	10	10	10	10			

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur

Program Pengembangan Perumahan 50,000,000,000 44,840,331,453 45,000,000,000 41,692,720,069 40,000,000,000 38,610,191,284 35,000,000,000 30,000,000,000 25,000,000,000 20,000,000,000 18,291,210,412 15,087,992,076 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 2015 2016 2017 2018 2019

Gambar 4...
Anggaran Program Pengembangan perumahan 2015-2019

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur

B. BPD JAWA TIMUR

Hasil survey pada BPD Jawa Timur diperoleh gambaran sebagai berikut:

- BPD Jawa Timur, melaksanaakan pembiayaan KPR berupa KPR umum yang mana penyalurannya sampai dengan bulan Agustus 2015 mencapai Rp 1,2 T.
 Sedangkan untuk KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hanya yang berasal dari FLPP.
- Mekanisme pembiayaan KPR bagi MBR yang bersumber dari FLPP, calon debitur mengajukan, kemudian diproses dan jika layak kredit maka akan direalisasikan.
 Jika sudah pencairan kepada debitur, maka Bank Jatim akan segera mengajukan reimburstment, dan selama ini proses reimburstment lancar tidak ada kendala sama sekali.
- Program pembiayaan perumahan yang disediakan pemerintah yang diterima oleh Bank Jatim adalah FLPP saja. Selama ini tidak ada hambatan dari masyarakat dalam memperoleh KPR, karena masih tersedia dana berasal dari FLPP yang belum terserap. Hal dikarenakan ketersediaan rumah tidak mencukupi. Ppengembang tidak dapat menyediakan perumahan khusus untuk MBR karena

ketersediaan tanah yang sangat terbatas dan harga yang semakin mahal, sehingga dirasakan bahwa membangun untuk MBR tidak menguntungkan.

- Sumber dana pembiayaan KPR umum berasal dari DPK.
- Terkait dengan PT 'SMF', Bank Jatim, belum memahami tentang aktivitas lemabaga penyedia pembiayaan perumahan jangka panjang ini, dan jika nanti sudah diarasakan perlu dana, maka akan mengakses lembaga ini.

C. Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur

Dinas Koperasi provinsi jawa Timur, membiana koperasi tingkat provinsi. Koperasi yang menyediakan pembiayaan perumahan bagi anggotanya hanya satu yaitu Pusat Koperasi karyawan Jawa Timur (PUSKOPKAR).

D. Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jawa Timur

Hasil survey pada Puskopkar Jawa Timur diperoleh gambaran sebagai berikut:

- Pusat Koperasi Karyawan Jawa timur adalah koperasi sekunder yang beranggotakan badan-badan hokum primer koperasi karywan se Jawa timur. Jumlah anggota sampai sekarang sebanyak 70 koperasi. Kegiatan utama Puskopkar Jatim ini adalah membangun perumahan yang disediakan bagi anggotanya maupun untuk umum.
- Puskopkar tidak menyediakan pembiayaan ,tetapi bertindak selaku pengembang, sedangkan untuk pembiayaannya , bekerjasama dengan Bank BTN dalam bentuk KPR.
- Diperoleh informasi bahwa , sebetulnya banyak kopkar di Jatim yang merupakan anggota Puskopkar, mempunyai lahan, tetapi di lokasi yang jauh dari kota ,dan kesulitan dana dalam pembangunannya, juga keterbatasan pemahaman teknis tentang pembangunan perumahan.
- Untuk dapat memanfaatkan KPR bagi MBR , Puskopkar kesulitan karena tidak mampu menyediakan harga rumah sebesar yang disyaratkan dari fasilitas FLPP. Hal ini dikarenakan harga tanah di lokasi sesuai dengan yang diinginkan anggota sudah sangat mahal sehingga tidak terjangkau.

- Sejak tahun 1993 sampai dengan 2015 sudah membangun rumah sebanyak
- 15000 unit yang disediakan untuk anggota dan non anggota, dan belum menyentuh kepada MBR.

4.2.4. PROVINSI KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM

a. Bappeda Kota Batam

Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2011–2016: "Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional"

Penjabaran Visi Pembangunan Kota Batam dirumuskan 5 (lima) pernyataan misi tahun 2012-2016sebagai berikut:

- Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional sebagai kawasan investasi dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan, kawasan industri besar, menengah kecil, koperasi, usaha rumah tangga, industri pariwisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, hiburan, pengelolaan sumberdaya kelautan melalui kerjasama dengan Pengelola Kawasan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.
- 2) Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai, sistem telekomunikasi dan teknologi informasi (ICT) modern dan prima, ekosistem hutan kota, penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, aman, nyaman dan lestari.
- 3) Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, fasilitasi keimanan dan ketaqwaan, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan.
- 4) Menumbuhsuburkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

5) Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan. Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Kota Batam selama tahun 2012-2016, yang merupakan penjabaran dari Misi yang telah ditetapkan:

Misi-3:

Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya, sarana ibadah, kepemudaan dan olahraga agar kualitas hidup manusia dan kecerdasan seluruh lapisan masyarakat meningkat serta pengentasan kemiskinan

Tujuan-3:

Meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan peningkatan kualitas lingkungan hunian serta pengentasan kemiskinan.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR
- 2) Mendorong dunia usaha menyediakan hunian bagi pekerjanya
- Menurunkan luasan daerah kumuh
- 4) Mendorong penyediaan rumah bagi PNS dan pemberi layanan di daerah terpencil
- 5) Percepatan penanggulangan kemiskinan daerah

Beberapa hal terkait perumahan di Kota batam sebagai berikut:

- 1) RPJM Pemerintah kota Batam tahun 2011-2016 belum mencantumkan pembiayaan jangka panjang untuk perumahan, diharapkan pada RPJM berikutnya (2016-2020) pemerintah kota Batam sudah mencatumkan rencana pembiayaan perumahan.
- 2) Masalah pengembangan perumahan di wilayah Kota Batam yaitu keterbatasan lahan.
- 3) Pembiayaan perumahan bagi MBR dilaksanakan melalui program CSR perusahaan (misal: program bedah rumah, fasilitas umum).

- Pemerintah kota Batam sedang membuat Peraturan Walikota tentang CSR.
- 5) Pembiayaan perumahan melalui Badan Layanan Umum Daearah (BLUD) belum dilakukan, sedangkan pengelollan Rusunawa ditangani melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah Dinas Tata Kota Batam.
- 6) Penyediaan perumahan bagi pekerja di wilayah Kota Batam:
 - PNS disediakan oleh Pemerintah Kota Batam melalui program Rusunawa
 - Pekerja swasta disediakan oleh perusahaan yang mempekerjakannya (misalnya: kawasan Industri Muka Kuning Batam)
- 7) Capaian kinerja Pembangunan Rusunawa di Kota Batam

Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
6 Twin Blok (TB)	0	1 TB	1 TB	2 TB

B. BPD Kepri Cabang Batam

Beberapa hal yang terkait dengan program perumhan di BPD Kepri Batam sebagai berikut:

- BPD Kepulauan Riau Cabang Kota Batam, melaksanaakan pembiayaan perumahan berupa KPR komersial yang sumber dana pembiayaan KPR komersial berasal dari DPK (pembiayaan jangka pendek).
- Program Fasilitas pembiayaan jangka panjang untuk perumahan di BPD Kepri Cabang Batam berasal dari BPD Kepri Kantor Pusat yang dananya berasal dari pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
- Penyediaan fasilitas perumahan BPD kepri menggunakan KPR yang dananya berasal dari bank yang bersangkutan melalui pendanaan nasabahnya (pasar primer)

4.2.5. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (BANJARMASIN)

A. Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan pada masa awal pemerintahan orde baru belum menampakkan suatu perencanaan yang mantap baik di pusat maupun di daerah, karena situasi dan kondisi pada masa itu memang belum memungkinkan sehingga hasil yang didapat belum mencapai hasil yang semestinya diharapkan. Meskipun demikian perencanaan pembangunan selalu menuju perbaikan, yang pada masa itu dimulai dengan adanya tindakan koordinatif yang dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dikenal dengan Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BAKOPDA) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964.

Dalam upaya memantapkan perencanaan pembangunan di daerah semakin dirasakan perlunya kehadiran lembaga yang dapat mengakomodasikan perencanaan pembangunan menyeluruh dan terintegrasi dengan segala kegiatan pembangunan di daerah. Maka untuk itu dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sesuai keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974, dilengkapi dengan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1974. Kemudian ditindak-lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor X-1-20/SK/1974 tanggal 1 Oktober 1974 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Untuk mendukung fungsi dan peran Bappeda, ditetapkan lagiKeputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat II dengan pedoman organisasi dan tata kerjanya. Dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1981 tanggal 6 Juni 1981, tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Pada tahun 2000 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

tanggal 24 Oktober 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya dikeluarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2001 tanggal 10 April 2001, kemudian Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0120 Tahun 2003 tanggal 29 April 2003 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Terakhir dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 tentang Penbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian diputuskan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 021 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Visi & Misi Bappeda Kalsel

Visi: Menjadi Perencana dan Pengendali Pembangunan Daerah yang Profesional untuk Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Selatan yang Tertib, Sejuk, Nyaman, Unggul, dan Maju " (TERSENYUM).

Misi

Menyusun rencana pembangunan daerah yang aspiratif, responsif, partisipatif, transparan, implementatif, integratif, komprehensif sesuai kondisi dan potensi daerah serta melaksanakan pengendalian pembangunan daerah secara efektif dan efesien.

BAPPEDA belum memiliki divisi khusus untuk menangani perumahan dan pembiayaan perumahan. Walaupun begitu lembaga ini punya pekerjaan yang harus dilakukan terkait dengan strategi yang sudah ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035. Dimana dalam rancangan tersebut diuraikan tentang strategi sebagai berikut:

Strategi pembangunan dan pengembangan wilayah Kalser erdiri atas:

- meningkatkan keterkaitan, peran dan fungsi kota-kota rawa sebagai pusat pertumbuhan kawasan rawa dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitarnya terutama pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
- mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan utara wilayah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang belum terlayani oleh infrastruktur perkotaan;
- mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan terutama pada koridor alur Sungai Barito, Sungai Negara dan Sungai Martapura;
- mengendalikan perkembangan kota yang langsung berhubungan dengan kawasan pesisir laut dan kawasan bantaran sungai ; dan
- mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana terdiri atas:

- meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, transportasi sungai termasuk anjir, transportasi laut, dan transportasi udara;
- mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi untuk seluruh wilayah hingga ke pelosok wilayah;
- meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik hingga ke pelosok wilayah;
- meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

Strategi peningkatan kawasan lindung sebagaimana erdiri atas :

 menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;

- menetapkan kawasan rawan bencana banjir dan longsor sesuai dengan tipologi dan zonanya;
- mewujudkan kawasan lindung dalam satu wilayah provinsi dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi kawasan lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya;
- melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan; dan
- mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya.

Strategi Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah meliputi:

- menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah;
- mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
- mengembangkan pusat-pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara serta sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
- membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
- mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
- mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; dan
- mengintensifkan promosi peluang investasi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan.

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi :

- menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyanggah yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan
- turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan/TNI.

Program yang terkait dengan perumahan dan permukiman yang direncanakan oleh Pemerintahan Kalimantan Selatan serta sumber pembiayaan dan yang membidanginya adalah sebagai berikut:

Tabel 4...
Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN	WILAYAH	SUMBER PEMBIAYAAN	PELAKSANA
a	Pembangunan perumahan dengan pola perumahan swadaya dan pembangunan rusunawa (rumah susun sederhana sewa);	Kab/kota se KalSel	APBN, APBD Prov. APBD Kab/Kota Swasta	- Dinas PU
b	Pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase	sda	sda	- Dinas PU
С	Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan;	sda	sda	- Dinas PU - PDAM
d	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap rumah sakit	sda	sda	- BLHD - Dinas PU
е	Rehabilitasi dan peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	sda	sda	- BLHD - Dinas PU

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

B. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalsel



Visi: Memperhatikan visi pembangunan Kalimantan Selatan tahun "KALSEL BERMUNAJAD", meruakan akronim dari Kalimantan Selatan Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Damai maka dalam kerangka mendukung pencapaian visi itu, Dinas Pekeraan Umum Kalimantan Selatan menetapkan visi : Tersedianya Infrastruktur yang mantap, handal dan berwawasan lingkungan, dengan pengertian makna sebagai berikut :

- Mantap: Kondisi dan prasarana pekeraan umum yang memiliki kekuatan atau berdaya tahan tinggi.
- Handal: Prasarana dan sarana mampu / Layak dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
- Berwawasan Lingkungan : Ramah lingkungan, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup.

Misi:

Untuk melaksanakan visi tersebut, maka Dinas Pekeraan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menjabarkannya kedalam misi sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam pengaturan, pelayanan, dan pembangunan dalam bidang ke-PU-an.
- Menyelenggarakan bidang ke-PU-an yang berwawasan lingkungan.
- Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan usaha/ penyedia jasa kontruksi untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian di bidang ke-PU-an.

Penyertaan visi dan misi tersebut, secara inplisit menunJukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berkeinginan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pembangunan infrastruktur / prasarana yang handal dan mantap, yang mengandung makna berdayaguna dan berhasilguna serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. kelanjutan memiliki arti konsisten dalam tujuan dan sasaran dan mampu menanggulangi hambatan bahkan mampu memberi nilai

tambah yang layak dalam mengelula lingkungan, yang pada gilirannya mengangkat harkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang maju dan unggul.

Program pembiayaan perumahan di dinas ini (Cipta Karya) belum ada. Selama ini dinas hanya berperan sebagai koordinator (koordinatif). Pada tahun 2015 program yang terkait dengan perumahan hanya program PSU dan Program rumah susun. Sumber pembiayaan yang digunakan masih terbatas pada APBN. Sumber dana dari CSR yang berasal dari perusahaan-perusahaan digunakan untuk membangun sarana pengelolaan air minum di wilayah sekitar perusahaan. Dalam hal ini cipta karya menyediaan menu-menu program yang ditawarkan pada perusahaan-perusahaan.

Dinas ini dalam melaksanakan pekerjaannya menyesuaikan dengan rencana struktur ruang wilayah daerah dimana rencana tersebut terdiri atas:

- sistem perkotaan;
- sistem jaringan trasportasi;
- sistem jaringan energi;
- sistem jaringan telekomunikasi;
- sistem jaringan sumber daya air; dan
- sistem jaringan persampahan.

C. BPD Kalimantan Selatan

BPD Kalsel telah melakukan pembiayaan perumahan untuk :

1) KPR FLPP

Kredit KPR dengan pembiayaan yang bersumber dari FLPP baru dilaksanakan mulai tahun 2014. Dalam kegiatan ini BPD Kalsel bekerjasama dengan PERUMNAS.

Kendala yang dihadapi BPD Kalsel dalam menyalurkan KPR dengan fasilitas FLPP adalah sebagai berikut :

- Lambatnya pendanaan sehingga menggunakan pola talangan
- MOU belum ada, PKO dan BLU
- Jenis tanah diwilayah Kalsel tanah gambut
- Adanya pesaing dari BTN yang sudah lama menangani FLPP

Peluang yang dimiliki BPD Kalsel dalam program KPR dengan FLPP adalah:

 Adanya komitmen dari Pemda atau MOU antara BPD dg Pihak Pemda sudah dilakukan.

Potensi wilayah masih besar seperti di Kota Baru dan Banjar Baru

KPR Komersial

BPD Kalsel dalam menyalurkan Kredit KPR Komersil ini bekerja sama dengan Developer, Kadin, Aversi Gapensi, REI dan Perumnas. Selain itu juga dengan individu dan Yayasan.

Sumber dana KPR yang digunakan BPD KALSEL berasal dari :

a. SMF

BPD memanfaatkan dana dari SMF mulai tahun 2014. Biaya dana saat ini 9 % sedangkan Price yang dibebankan pada konsumen 13 %. Jangka waktu dana selama ini 3 tahun.

b. Obligasi.

Sumber dana dari obligasi berasal dari pemerintah daerah dengan jangka waktu yang relatif panjang di atas 3 tahunan.

c. Dana Pihak Ketiga

Sumber dana pihak ketiga berasal dari giro, tabungan dan deposito. Sumber dana ini berbiaya rendah tetapi waktu pengendapannya relatif sulit diprediksi. Walaupun begitu BPD masih bisa memanfaatkan sumber ini untuk pembiayaan KPR komersilnya.

d. Antar Bank

Sumber antar bank ini sifatnya jangka pendek dalam bentuk call money atau bentuk pinjaman lainnya. Sumber dana ini tidak bisa diandalkan untuk kegiatan pembiayaan perumahan jangka panjang karena jangka waktunya singkat dan berbiaya tinggi sehingga tidak mungkin untuk pendanaan pembiayaan perumahan.

Pada BPD KALSEL ini, pengelolaan dana jangka pendek dilakukan oleh divisi jasa sedangkan Pengelolaan dana jangka panjang pada bank BPD Kalsel ini dilakukan oleh devisi Tresury.

Gambaran Kinerja BPD Kalsel

Tabel 4.. Kinerja BPD Kalsel

No.	Kinerja	Persentase
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (CAR)	17,92
2.	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif (Non performing earning assets and non earning assets to total earning assets and non earning assets)	1,34
3.	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif (Non performing earning assets and non earning assets)	1,52
4.	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif (Impairment provision on earning assets to total earning assets)	0,59
5.	NPL gross (Gross NPL)	1,80
6.	NPL net (Net NPL)	1,14
7.	Return on Asset (ROA) (ROA)	2,33
8.	Return on Equity (ROE) (ROE)	21,45
9.	Net Interest Margin (NIM) (NIM)	5,65
10.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (Operating Expenses to Operating Revenues)	76,00
11.	Loan to Deposit Ratio (LDR) (LDR)	85,38

Sumber: BPD Kalimantan Selatan Tahun 2015

Kinerja BPD Kalsel secara menyeluruh menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini tercapai karena semua rasio yang ditentukan oleh pihak penguasa terpenuhi pada ahir tahun 2013. Sedangkan dari aspek aset dan kewajiban dan entity nya bisa terlihat di bawah ini :

PT. BPD KALIMANTAN SELATAN

NERACA (BALANCE SHEETS)

Per Desember 2013 dan 2012 (As at December, 2013 and 2012)

(dalam jutaan rupiah/In Million IDR)

	(dalam jutaan rupian in	Ba	nk
	Pos-pos	Desember	Desember
		2013	2012
	ASET (ASSETS)		
1	Kas (Cash)	479.183	329.853
2	Penempatan pada Bank Indonesia (Placement to Bank Indonesia)	680.003	909.826
3	Penempatan pada bank lain (Interbank placement)	583.695	2.574.239
4	Tagihan spot dan derivatif (Spot and derivatives claims)	0	0
5	Surat berharga (Securities)	1.305.655	830.557
	 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi (Measured at fair value through profit and loss) 	0	0
	b. Tersedia untuk dijual (Available for sale)	548.418	468.985
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo (Hold to maturity)	757.237	361.572
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang (Loan and receivables)	0	0
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) (Securities sold under repurchase agreement (repo))	0	0
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual	o	0
	kembali (reverse repo) (Claims on securities bought under		
	(reverse repo))		
8	Tagihan akseptasi (Acceptance claims)	0	0
9	Kredit (Loans)	5.833.594	4.309.677
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0	0
	(Measured at fair value through profit and loss) b. Tersedia untuk dijual (Available for sale)	0	0
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo (Hold to maturity)	0	0
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang (Loan and	5.833.594	4.309.677
	receivables)		
10	Pembiayaan syariah 1) (Sharia financing 1))	406.055	340.281
11	Penyertaan (Equity investment)	3.465	3.315
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	48.002	27.718
	(Impairment on financial assets -/-) a. Surat berharga (Securities)	o	0
	b. Kredit (Loans)	47.362	26.372
	c. Lainnya (Others)	640	1.346
13	Aset tidak berwujud (Intangible assets)	4.082	5.243
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (Accumulated	1.812	2.680
	amortisation on intangible assets -/-)		
15	Aset tetap dan inventaris (Fixed assets and equipment)	184.492	168.728
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (Accumulated depreciation on fixed assets	84.278	76.816
	and equipment -/-)		
17	Aset non produktif (Non Productive Asset)	0	0
	a. Properti terbengkalai (Abandoned property) b. Aset yang diambil alih (Foreclosed assets)	0 0	0
	c. Rekening tunda (Suspense accounts)	Ö	0
	d. Aset antarkantor 2) (Interbranch assets)	o	0
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0	0
	(Conducting operational activities in Indonesia)		
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0	0
	(Conducting operational activities outside Indonesia)		
18	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -	0	0
10	/- (Imparment on Non Financial Assets -/-)		_
19	Sewa pembiayaan 3) (Leasing 3))	0	0

21	Aset pajak tangguhan (Deferred tax assets) Aset Lainnya (Other assets) TOTAL ASET (TOTAL ASSETS) LIABILITAS DAN EKUITAS (LIABILITIES AND EQUITIES) LIABILITAS (LIABILITIES)	20.582 106.465 9.473.179	14.100 89.700 9.468.305
1	Giro (Current account)	3.858.496	4.674.442
2	Tabungan (Saving account)	1.827.105	1.441.431
3	Simpanan berjangka (Time deposit)	1.254.514	1.922.252
4	Dana investasi revenue sharing 1) (Revenue sharing investment 1))	367.571	299.449
5	Pinjaman dari Bank Indonesia (Liabilities to Bank Indonesia)	0	59
6	Pinjaman dari bank lain (Interbank liabilities)	640.831	48.972
7	Liabilitas spot dan derivatif (Spot and derivatives liabilities)	0	0
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) (Liabilities on securities sold under repurchase agreement (repo))	0	0
9	Utang akseptasi (Acceptance liabilities)	0	0
10	Surat berharga yang diterbitkan (Issued securities)	Ö	o l
11	Pinjaman yang diterima (Loans received)	27	63
	 a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal (Loans calculated as capital) 	0	0
	b. Pinjaman yang diterima lainnya (Other loans received)	27	63
12	Setoran jaminan (Margin deposit)	1.252	901
13	Liabilitas antarkantor 2) (Interbranch liabilities 2)	0	0
	 Melakukan kegiatan operasional di Indonesia (Conducting operational activities in Indonesia) 	0	0
	 Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia (Conducting operational activities outside Indonesia) 	0	0
14	Liabilitas pajak tangguhan (Deferred tax liabilities)	0	0
15	Liabilitas lainnya (Other liabilities)	372.979	245.168
16	Dana investasi profit sharing 1) (Profit Sharing investment 1)) TOTAL LIABILITAS (TOTAL LIABILITIES)	0	U
1		8.322.775	8 632 737
	, ,	8.322.775	8.632.737
1	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital)	8.322.775 575.006	8.632.737 426.706
1	EKUITAS (EQUITIES)		
1	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital)	575.006	426.706
1	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury	575.006 1.000.000	426.706 1.000.000
1 2	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-)	575.006 1.000.000 424.994	426.706 1.000.000 573.294
	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-)	575.006 1.000.000 424.994 0	426.706 1.000.000 573.294 0
	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-)	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0
	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital)	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 0 652	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652
	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital) d. Dana setoran modal (Fund for paid up capital)	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 0 652 152.410	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652 72.801
2	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital) d. Dana setoran modal (Fund for paid up capital) e. Lainnya (Others)	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 0 652 152.410	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652 72.801
	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital) d. Dana setoran modal (Fund for paid up capital) e. Lainnya (Others) Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (Other	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 0 652 152.410	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652 72.801
2	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital) d. Dana setoran modal (Fund for paid up capital) e. Lainnya (Others)	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 0 652 152.410	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652 72.801
2	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital) d. Dana setoran modal (Fund for paid up capital) e. Lainnya (Others) Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (Other comprehensive gain (loss)) Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 0 652 152.410 0 (238)	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652 72.801 0 2.824
2	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital) d. Dana setoran modal (Fund for paid up capital) e. Lainnya (Others) Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (Other omprehensive gain (loss)) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Translation adjustment from foreign currency) b. Keuntungan(kerugian) dari perubahan nilai aset	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 0 652 152.410 0 (238)	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652 72.801 0 2.824
2	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital) d. Dana setoran modal (Fund for paid up capital) e. Lainnya (Others) Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (Other comprehensive gain (loss)) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Translation adjustment from foreign currency) b. Keuntungan(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (Gain	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 0 652 152.410 0 (238)	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652 72.801 0 2.824
2	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital) d. Dana setoran modal (Fund for paid up capital) e. Lainnya (Others) Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (Other omprehensive gain (loss)) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Translation adjustment from foreign currency) b. Keuntungan(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (Gain (loss)) on value changes of financial assets categorized as	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 0 652 152.410 0 (238)	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652 72.801 0 2.824
2	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital) d. Dana setoran modal (Fund for paid up capital) e. Lainnya (Others) Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (Other comprehensive gain (loss)) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Translation adjustment from foreign currency) b. Keuntungan(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (Gain (loss) on value changes of financial assets categorized as available for sale) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas (Effective portion of	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 0 652 152.410 0 (238)	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652 72.801 0 2.824
2	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital) d. Dana setoran modal (Fund for paid up capital) e. Lainnya (Others) Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (Other comprehensive gain (loss)) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Translation adjustment from foreign currency) b. Keuntungan(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (Gain (loss) on value changes of financial assets categorized as available for sale) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas (Effective portion of cash flow hedge) d. Selisih penilaian kembali aset tetap (Difference in fixed)	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 0 652 152.410 0 (238)	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652 72.801 0 2.824
2	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital) d. Dana setoran modal (Fund for paid up capital) e. Lainnya (Others) Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (Other mprehensive gain (loss)) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Translation adjustment from foreign currency) b. Keuntungan(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (Gain (loss) on value changes of financial assets categorized as available for sale) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas (Effective portion of cash flow hedge) d. Selisih penilaian kembali aset tetap (Difference in fixed asset revaluation)	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 652 152.410 0 (238) 0 (238)	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652 72.801 0 2.824 0
2	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital) d. Dana setoran modal (Fund for paid up capital) e. Lainnya (Others) Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (Other comprehensive gain (loss)) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Translation adjustment from foreign currency) b. Keuntungan(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (Gain (loss) on value changes of financial assets categorized as available for sale) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas (Effective portion of cash flow hedge) d. Selisih penilaian kembali aset tetap (Difference in fixed)	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 652 152.410 0 (238)	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652 72.801 0 2.824 0
2	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital) d. Dana setoran modal (Fund for paid up capital) e. Lainnya (Others) Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (Other pmprehensive gain (loss)) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Translation adjustment from foreign currency) b. Keuntungan(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (Gain (loss) on value changes of financial assets categorized as available for sale) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas (Effective portion of cash flow hedge) d. Selisih penilaian kembali aset tetap (Difference in fixed asset revaluation) e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi (Portion of other comprehensive income from associates)	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 652 152.410 0 (238) 0 (238)	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652 72.801 0 2.824 0
2	EKUITAS (EQUITIES) Modal disetor (Paid in capital) a. Modal dasar (Capital) b. Modal yang belum disetor -/- (Unpaid capital -/-) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (Treasury stock -/-) Tambahan modal disetor (Additional paid in capital) a. Agio (Agio) b. Disagio -/- (Disagio -/-) c. Modal sumbangan (Donated capital) d. Dana setoran modal (Fund for paid up capital) e. Lainnya (Others) Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya (Other "mprehensive gain (loss)) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Translation adjustment from foreign currency) b. Keuntungan(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (Gain (loss) on value changes of financial assets categorized as available for sale) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas (Effective portion of cash flow hedge) d. Selisih penilaian kembali aset tetap (Difference in fixed asset revaluation) e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi (Portion of other comprehensive income from	575.006 1.000.000 424.994 0 153.062 0 652 152.410 0 (238) 0 (238)	426.706 1.000.000 573.294 0 73.453 0 0 652 72.801 0 2.824 0

	19		1
	g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	0	0
	(Income tax of other comprehensive income)		
	h. Lainnya (Others)	0	0
4	Selisih kuasi reorganisasi 4) (Difference in quasi-reorganization	0	0
	4))		
5	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5) (Difference in	0	0
	restructuring under common control 5))		
6	Ekuitas Lainnya (Other Equity)	0	0
7	Cadangan (Reserves)	245.755	209.576
	a. Cadangan umum (General reserves)	162.089	125.910
	 b. Cadangan tujuan (Appropriated reserves) 	83.666	83.666
8	Laba/rugi (Gain/loss)	176.819	123.009
	a. Tahun-tahun lalu (Previous years)	0	(588)
	b. Tahun berjalan (Current year)	176.819	123.597
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA	1.150.404	835.568
	PEMILIK (TOTAL EQUITIES ATTRIBUTABLE TO OWNERS)		
9	Kepentingan non pengendali 6) (Minority interest 6))	0	0
	TOTAL EKUITAS (TOTAL EQUITIES)	1.150.404	835.568
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (TOTAL LIABILITIES AND	9.473.179	9.468.305
	EQUITIES)		

Sumber: PT. BPD Kalimantan Selatan

Aset BPD Kalsel sudah mencapai Rp 9,4 Triliun. Besarnya aset ini menggambarkan kedudukan bank tersebut cukup bonafid dan layak untuk diajak kerjasama oleh PUPRA dalam menjalankan program-program yang terkait pembiayaan perumahan.

PT. BPD KALIMANTAN SELATAN LAPORAN LABA-RUGI (INCOME STATEMENTS)

Per Desember 2013 dan 2012 (As at December, 2013 and 2012) (dalam jutaan rupiah/In Million IDR)

		Ba	nk
	Pos-pos	Desember 2013	Desember 2012
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL (OPERATIONAL INCOME AND EXPENSES)		
A.	Pendapatan dan Beban Bunga (Interest income and expenses)		
1.	Pendapatan Bunga (Interest income)	964.622	993.088
	a. Rupiah (Rupiah)	964.622	993.088
	b. Valuta Asing (Foreign currency)	0	0
2.	Beban Bunga (Interest expenses)	403.782	565.628
	a. Rupiah (Rupiah)	403.782	565.628
	b. Valuta Asing (Foreign currency)	0	0
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih (Net interest income	560.840	427.460
	(expenses))		
В.	Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga (Operational		
	Income and Expenses Other than Interest)		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga (Operational Income	43.514	49.468
	Other than Interest)		
	 Peningkatan nilai wajar aset keuangan (Positive mark to market on financial assets) 	142	378
	i. Surat berharga (Securities)	142	378

ii. Kredit (Loans) iii. Spot dan derivatif (Spot and derivatives) iv. Aset keuangan lainnya (Other financial assets) b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (Negative mark to market on financial liabilities) c. Keuntungan penjualan aset keuangan (Gain on sale of financial assets) i. Surat berharga (Securities) 0	0 0 0
iv. Aset keuangan lainnya (Other financial assets) b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (Negative mark to market on financial liabilities) c. Keuntungan penjualan aset keuangan (Gain on sale of financial assets) i. Surat berharga (Securities)	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (Negative mark to market on financial liabilities) c. Keuntungan penjualan aset keuangan (Gain on sale of financial assets) i. Surat berharga (Securities)	0
to market on financial liabilities) c. Keuntungan penjualan aset keuangan (Gain on sale of financial assets) i. Surat berharga (Securities)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan (Gain on sale of financial assets) i. Surat berharga (Securities)	
i. Surat berharga (Securities) 0	
	0
ii. Kredit (Loans)	0
iii. Aset keuangan lainnya (Other financial assets)	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) (Gain on spot and derivatives (realised))	0
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method (Gain 0 on investment under equity method)	0
f. Dividen (Dividend) 544	647
	6.732
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 19.402 1 (Comission/provision/fee and administration)	0.752
	2.766
(Recovery of asset impairment)	2.700
	8.945
	10.698
	10.098
than Interest)	20
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (Negative mark to	39
market on financial assets)	20
i. Surat berharga (Securities)	39
ii. Kredit (Loans)	0
iii. Spot dan derivatif (Spot and derivatives)	0
iv. Aset keuangan lainnya (Other financial assets)	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (Positive mark 0	0
to market on financial liabilities)	
c. Kerugian penjualan aset keuangan (Loss on sale of 0	0
financial assets)	
i. Surat berharga (Securities)	0
ii. Kredit (Loans)	0
iii. Aset keuangan lainnya (Other financial assets)	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) (Loss on 0	0
spot and derivatives (realised))	
	22.892
(Impairment of financial assets)	
i. Surat berharga (Securities)	0
	4.506
iii. Pembiayaan syariah (Sharia financing) 2.971	7.288
iv. Aset keuangan lainnya (Other financial assets)	1.098
f. Kerugian terkait risiko operasional *) (Losses on 295 operational risk *))	456
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method (Losses on 0	0
investment under equity method)	00
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 283	98
(Commission/provision/fee, and administration)	_
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 0	0
(Impairment of other assets (non financial assets))	
	2.664
	4.875
	19.674
	1.230)
Operational Income (Expenses) Other than Interest)	
	6.230
PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON OPERASIONAL (NON	
OPERATIONAL INCOME (EXPENSES))	
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	31
(Gain (loss) on sale of fixed assets and equipment)	0.0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 56	33

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka
Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

ı	(Cain (land) on faraign evaluation)	l	l I
3.	(Gain (loss) on foreign exchange translation) Pendapatan (beban) non operasional lainnya (Other non operational income (expenses))	6.118	4.057
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (NON OPERATIONAL PROFIT (LOSS))	6.617	4.121
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK (CURRENT YEAR PROFIT (LOSS))	242.142	170.351
4.	Pajak Penghasilan (Income taxes) a. Taksiran pajak tahun berjalan (Estimated current year tax)	65.323 71.758	46.754 50.479
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (Deferred tax income (expenses))	6.435	3.725
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH (NET PROFIT (LOSS))	176.819	123.597
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN (OTHER COMPREHENSIVE INCOME)	(4.083)	1.397
	 Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Translation adjustment from foreign currency) 	0	0
	 Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (Gain (loss) on value changes of financial assets categorized as available for sale) 	(4.083)	1.397
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas (Effective portion of cash flow hedge)	0	0
	 Keuntungan revaluasi aset tetap (Gain on fixed asset revaluation) 	0	0
	 Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi (Portion of other comprehensive income from associates) 	0	0
	 Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti (Gain (loss) on defined benefit actuarial program) 	0	0
	g. Penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain(-/-) (Income tax of other comprehensive income(-/-))	(1.021)	350
	h. Lainnya (Others) Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait (Other comprehensive income of the current year - net of applicable income tax)	(3.062)	0 1.047
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (CURRENT YEAR TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT) LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA (PROFIT ATTRIBUTABLE TO):	173.757	124.644
	a. PEMILIK (OWNER) b. KEPENTINGAN NON PENGENDALI (MINORITY INTEREST)	176.819 0	123.597 0
	TOTAL LABA TAHUN BERJALAN (CURRENT YEAR TOTAL PROFIT)	176.819	123.597
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA (TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT ATTRIBUTABLE TO):		
	a. PEMILIK (OWNER) b. KEPENTINGAN NON PENGENDALI (MINORITY INTEREST)	173.757	124.644
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (CURRENT YEAR TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT)	173.757	124.644
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) (TRANSFER OF PROFIT(LOSS) TO HEAD OFFICE)	0	0
	DIVIDEN (DIVIDEND) LABA BERSIH PER SAHAM ***) (NET EARNINGS (LOSS) PER SHARE ***))	0	0

Sumber: PT BPD Kalimanatan Selatan

Laba yang di peroleh BPD Kalsel mengalami surplus sehingga usaha bank cukup profitable dan akan mampu untuk menjalankan usaha di masa yang akan datang.

PT. BPD KALIMANTAN SELATAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) (CAPITAL ADEQUACY RATIO CALCULATION)

Per Desember 2013 dan 2012 (As at December, 2013 and 2012) (dalam jutaan rupiah/In Million IDR)

			Ва	nk
		Pos-pos	Desember 2013	Desember 2012
I.	комро	NEN MODAL (COMPONENTS)		
A.	Modal I	nti (Core Capital)	959.813	0
1.	Modal I	Disetor (Paid in Capital)	575.006	0
2.	Cadang	an Tambahan Modal (Disclosed reserves)	384.807	0
	2.1 F	aktor penambah *) (Additional factors)	487.227	0
	a	Agio (Agio)	0	0
	b.	Modal Sumbangan (Contributed capital)	652	0
	c.	Cadangan Umum (General reserves)	162.089	0
	d	Cadangan Tujuan (Spesific reserves)	83.666	o
	е.	Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) (Previous years profit which can be calculated into capital (100%))	0	0
	f.	- ' '	88.410	0
	g.		0	0
	h	·	152.410	0
	i.	0 0	0	0
	j.	(50%)) Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%) (Stock option issued related to compensation program)	0	0
	2.2 F	aktor Pengurang *) (Deduction factors)	102.420	0
	a	Disagio (Disagio)	0	0
	ъ	Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) (Previous years loss which can be calculated into capital (100%))	14.100	0
	с.	Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) (Current year loss which can be calculated into capital (100%))	0	0

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka
Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

	d	keuangan (Negative translation adjustment of	0	0
	e.	financial statement) Pendapatan komprehensif lain : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori Tersedia untuk Dijual (Other comprehensive income : losses from equity	238	0
	f.	investment for available for sale category (100%))	88.082	0
	g	non produktif yang wajib dihitung (Required	0	0
	h	regulatory provision on non productive assets) Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book (Negative differences on adjustment of fair value on financial instrument in the trading book)	0	0
3.	Modal I	novatif *) (Innovative Capital)	0	0
		urat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif) Subordinated securities (perpetual non cumulative))	0	0
		injaman Subordinasi (perpetual non kumulatif) Subordinated loans (perpetual non cumulative))	0	0
		nstrumen Modal Inovatif lainnya (Other innovative apital instruments)	0	0
4.		Pengurang Modal Inti *) (Deduction Factor of Tier 1	0	0
		oodwill (Goodwill)	0	0
	4.2 A	set tidak berwujud lainnya (Other intangible assets)	0	0
	4.3 P	enyertaan (50%) (Equity investment (50%))	0	0
	(5	ekurangan modal pada perusahaan anak asuransi 50%) (Shortfall on the capital of insurance subsidiary 50%))	0	0
5	,	ngan Non Pengendali (Minority Interest)	0	0
В.	Modal F	Pelengkap (Suplementary Capital)	59.499	0
1.	Level At	as (Upper Tier 2) *) (Upper Tier 2)	59.499	0
		aham preferen (perpetual kumulatif) (Preferred stock perpetual cumulative))	0	0
		urat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) Subordinated securities (perpetual cumulative))	0	0
		injaman Subordinasi (perpetual kumulatif) Subordinated loans (perpetual cumulative))	0	0
		Iandatory convertible bond (Mandatory convertible ond)	0	0
	1.5 M	Iodal Inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai Iodal inti (Innovative capital which is not calculated s core (tier 1) capital)	0	0
	1.6 Ir	nstrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) ninnya (Other instruments of upper tier 2 capital)	0	0
	1.7 R	evaluasi aset tetap (Fixed assets revaluation)	0	0

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka
Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

	 Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) (General provision of earning assets (maximum 1,25% of RWA)) 	59.499	0
	1.9 Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dlm kategori Tersedia untuk Dijual (45%) (Other comprehensive income : gain from equity investment for)	0	0
2.	Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti *) (Lower Tier 2 maximum 50% of Tier 1 Capital)	0	0
	 Redeemable preference shares (Redeemable preference shares) 	0	0
	2.2 Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan (Subordinated loans/bonds which can be calculated)	0	0
	2.3 Instrumen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) lainnya (Other instruments of lower tier 2 capital)	0	0
3.	Faktor Pengurang Modal Pelengkap *) (Deduction Factor of Tier 2 Capital)	0	0
	3.1 Penyertaan (50%) (Equity investment (50%))	0	0
	 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) (Shortfall on the capital of insurance subsidiary (50%)) 	0	0
C.	Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap (Deduction Factor for Tier 1 Capital and Tier 2 Capital)	0	0
	Eksposur Sekuritisasi (Exposure of Securitisation)	0	0
D.	Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) (Additional Supplementary Capital (Tier 3))	0	0
E.	Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko pasar (Additional Supplementary Capital which is allocated to anticipate Market Risk)	0	0
II.	TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B-C) (TOTAL TIER 1 CAPITAL AND TIER 2 CAPITAL (A + B - C))	1.019.312	0
ш.	TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UTK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B-C+E) (TOTAL TIER 1 CAPITAL, TIER 2 CAPITAL, AND TIER 3 CAPITAL ALLOCATED TO ANTICIPATE MARKET RISK (A + B - C + E))	1.019.312	0
IV.	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT (RISK WEIGHTED ASSET (RWA) FOR CREDIT RISK)	4.759.953	0
v.	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL (RISK WEIGHTED ASSET (RWA)	794.371	0
VI.	FOR OPERATIONAL RISK) ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR (RISK WEIGHTED ASSET (RWA) FOR MARKET RISK)	134.248	o
VII.	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II®IV+V)] (CAPITAL ADEQUACY RATIO FOR CREDIT RISK AND OPERATIONAL RISK (II®IV+V)])	18,35	
VIII.	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL, DAN RISIKO PASAR [III: (IV + V + VI)] (CAPITAL ADEQUACY RATIO FOR CREDIT RISK, OPERATIONAL RISK)	17,92	

Sumber: PT BPD Kalmantan Selatan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

KPMM BPD Kalsel sudah memenuhi ketentuan minimal yang ditetapkan oleh OJK sehingga bank tersebut akan mampu untuk mengatasai kebutuhan modalnya.

Kesimpulan Hasil Survei Provinsi Kalimantan Selatan

- Pembiayaan jangka panjang untuk perumahan, di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan masih terfokus pada program yang dilaksanakan oleh PUPERA.
- Pembiayaan dari program CSR perusahaan dimanfaatkan pada sarana-sarana kepentingan umum di sekitar perusahaan yang memberikan program CSR nya.
- Program pembiayaan untuk perumahan MBR dan pegawai negeri belum secara eksplisit di masukan baik dalam rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang dalam pembangunan wilayahnya.
- BPD Kalsel melaksanakan program Pembiayaan jangka panjang untuk perumahan bagi MBR dengan sumber dana yang berasal dari FLPP, Obligasi, DPK Dan sumber dana dari SMF.
- BPD Kalsel sangat berminat untuk melanjutkan program FLPP dari Kementrian PUPERA.

Rekomendasi Hasil Survei Provinsi Kalmantan Selatan

- Program pembiayaan perumahan harus dimasukkan kedalam rencana jangka pendek dan jangka panjang dari Pemerintahan Kalimantan Selatan secara eksplisit.
- Setiap lembaga yang terkait dalam penanganan perumahan di Kalsel harus melakukan koordinasi secara menyeluruh dengan lembaga lain yang menangani perumahan di Provinsi, Kota dan Kabupaten.
- Kementrian PUPERA harus selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan perumahan di wilayah provinsi, kota dan kabupaten Kalsel agar programprogram bisa terintegrasi.
- Komunikasi dengan BPD Kalsel harus lebih di intensifkan untuk membantu kelancaran program-program pembiayaan.

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

4.2.6. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Bappeda Provinsi NTT

Visi: Berdasarkan pada visi Provinsi Nusa Tenggara Timur diatas, visi BAPPEDA ditetapkan adalah: "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Transparan, Berkeadilan dan Berkelanjutan".

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas: artinya perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah memenuhi sejumlah kaidah, dilakukan secara partisipatif olehmasyarakat dan para perencana yang menguasai keseluruhan bagan alur perencanaan dan telah mempertimbangkan berbagai faktor keberhasilan dan ketidakpastian.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan: Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan: artinya merespons berbagai jenis kebutuhan instansional yang disesuaikan dengan potensi dan sumber pembiayaan di daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan:artinya perlu dilakukan evaluasi yang diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Misi

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahuidan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dirumuskan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Berbasis Desa/Kelurahan;
- Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan;
- Mendorong konsolidasi perencanaan tata ruang dalam pencapaian hasil pembangunan yang mendukung stabilisasi pembangunan.

Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) menyelenggarakan fungsi:
 - Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

B. Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Timur (NTT)

Visi:

Visi dinas PUPIT Tahun 2013-2018 yaitu, " tersedianya infrastruktur pekerjaan umum berbasis penataan ruang yang andal dalam mendukung pengembangan wilayah dan perumukiman, agar terwujud masyarakat NTT yang berkualitas, sejahtera dan demokratis."

Misi:

- Mewujudkan pengelolaan sumber daya air, dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku melalui konserasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air
- Mewujudkan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi
- Mengembangkan permukiman yang berkualitas dan produktif
- Melaksanakan pembinaan bangnan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan
- Meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni.
- Melaksanakan penataan ruang wilayah provisi yang aman, nyama, produktif dan berkelanjutan
- Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan bidang pekerjaan umum
- Menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif dan kompetitif
- Meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi yang professional dan memadai
- Mengoftimalkan peranan lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyedia jasa
- Melakukan penyusunan program,evaluasi dan pendendalian yang berorientasi pada prioritas dan keseimbangan wilayah
- Meningkatkan keandalan bangunan melalui uji mutu dengan memanfaatkan teknologi sesuai norma, standar,pedoman dan manual
- Meningkatkan pengelolaan peralatan dan perbengkelan
- Meningkatkan kemapuan dan keterampilan sumber daya manusia apaaratur

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Melakukan tindakan perbaikan infrastruktur dalam rangka tanggap darurat bencana

Dinas PU Provinsi NTT mempunyai tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan sebagaian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT sebagai salah satu SKPD menyusun Renstra dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut Renstra PU sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi NTT tahun 203-2018. Untuk melaksanakan tugas tersebut , Dinas PU menyelenggarakan beberapa fungsinya dalam:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan
- Penyelenggaraan urusan penataan ruang dan perumahan
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan.

Dinas yang membidangi Urusan pekerjaan umum, urusan penataan ruang dan urusan perumahan dibagi ke dalam tiga bidang utama yaitu :

- Urusan bidang pekerjaan umum
- Urusan bidang penataan ruang
- Urusan perumahan

Bidang Pekerjaan Umum mempunyai sub bidang Permukiman yang menangani :

- Kawasan siap bangun (kasiba) dan Lingkungan siap angun (lisba) yang berdiri sendiri
- Permukiman Kumuh/Nelayan
- Pembinaan kawasan

Bidang Perumahan mempunyai sub bidang pembiayaan yang menangani :

- a. Pembangunan baru yang meliputi :
 - Penetapan kebijakan, strategi dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan
 - Penyusunan NSPM provinsi bidang pembiayaan perumahan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

- Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengatran instrument pembiayaan dalam rangka penerapan system pembiayaan perumahan
- Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi
- Fasilitasi bantuan pemiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa
- Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan ditingkat provinsi

b. Perbaikan

Tantangan Yang Dihadapi Dinas PU Dalam Bidang Perumahan adalah ::

- Memenuhi backlog perumahan sebagai akibat masih rendahnya pendapatan masyarakat dengan persentase penduduk miskin sebesar 20 % lebih.
- Pembangunan rumah masih terkendala tanah ulayat yag mendominasi sebagian besar wilayah NTT sehingga berdampak pada kurangnya peran sector swasta dalam mendukung ketersediaan rumah.

Peluang Pengembangan yang dihadapi Dinas PU dalam Bidang Perumahan adalah:

- Kebijakan afirmatif nasional tentang percepatan pembangunan NTT bersama Provinsi Papua dan Papua Barat
- Kebijakan nasional bagi MBR berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas pu provinsi ntt di sub bidang cipta karya meliputi :

 Belum tercapainya cakupan layanan air minum karena keterbatasan anggaran,kepemilikan lahan dan sumber air, koordinasi antar wilayah

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

pemerintahan dan penyiapan kompensasi penggunaan lahan, kurangnya biaya pemeliharaan.

- Belum terlaksananya layanan rumah layak huni yang terjangkau disebabkan karena permasalaan lahan dan keterbatasan alokasi anggaran
- Belum tersedianya system jaringan drainase skala kawasan dan kota yang dikarenakan belum seluruh kabupaten/kota memiliki master plan drainase kurangnya alokasi anggaran.
- Belum tersedianya prasarana tempat pemrosesan akhir sampah dikarenaknnya permasalahan lahan dan keterbatasan anggaran
- Belum ditetapkannya RDTR karena belum terimplementasinya RTRWP/Kab./Kota. Lemahnya penegakan hokum serta minimnya sosialisasi.

Isu-isu strategis bidang PU dan penataan ruang serta perumahan khusus di Sub Bidang Perumahan adalah :

- Angka backlog perumahan sebesar 60 ribu unit sebagai akibat masih rendahnya pendapatan masyarakat dengan persentase penduduk miskin sebesar 20 % lebih
- Penataan permukiman di wilayah perbatasan

C. BPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bank BPD sebagai lembaga keuangan bank milik pemerintah daerah NTT mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam turut serta membangun wilayah NTT. Sebagai lembaga milik pemerintah daerah seharus lembaga ini dapat membantu program-program yang sudah ditetapkan oleh pemberintah daerah khususnya dalam memberikan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat NTT melalui produk-produk yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Tanpa mengabaikan dan melanggar aturan perbankan mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga perbankan yang tunduk pada aturan dan hukum perbankan.

Dalam mendukukung program pemerintah untuk ikut membantu membangun BPD menyediakan produk pembiayaan atau kredit kepemilikan rumah bagi masyarakat NTT. Dimana jenis kredit tersebut ditujukan untuk masyarakat yang mampu yaitu KPR komersil dan bagi MBR dengan KPR yang didanai melalu FLPP dari sumber dana APBN melalui program Kementrian PUPERA. Keseriusan BPD dalam membantu MBR tersebut ditunjukan melalui kerjasama dengan PUPERA dalam program yang sudah dan yang akan dilakukan pada periode-periode selanjutnya.

Kondisi kinerja BPD NTT dapat dilihat dari beberapa aspek keuangannya melalui laporan keuangan yang dipublikasikannya yaitu :

a. Kondisi Neraca

Dalam neraca ini dapat digambarkan posisi asset dan kewajiban serta modal yang dimilik selama periode tertentu

b. Laporan Rugi Laba

Dalam laporan rugi laba ini dapat digambarkan tentang keuntungan yang diraih selama kegiatan usahanya

c. Rasio-rasio keuangan yang dicapainya

Rasio keuangan tersebut menunjukkan tentang capaian kinerja selama melaksanakan kegiatan usahanya.

Di bawah ini diungkapkan kondisi keuangan dan kinerja BPD NTT sebagai berikut :

Neraca PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR

Desember 2014
(Calam Jutaan Rupiah)

Pos. pos	Bank
Pos-pos	Desember 2014
ASET	
1. Kas	249,806
2. Penempatan pada Bank Indonesia	683,694
3. Penempatan pada bank lain	1,045,519
4. Tagihan spot dan derivatif	0
5. Surat berharga	680,556

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	680,556
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8. Tagihan akseptasi	0
9. Kredit	5,499,784
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	5,499,784
10. Pembiayaan syariah	0
11. Penyertaan	0
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	54,954
a. Surat berharga	0
b. Kredit	54,929
c. Lainnya	25
13. Aset tidak berwujud	6,474
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,830
14. Aset tetap dan inventaris	180,098
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	91,839
15. Aset Non Produktif	2,247
a. Properti terbengkalai	2,247
b. Aset yang diambil alih	0
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor 2)	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	438
17. Sewa pembiayaan	0
18. Aset pajak tangguhan	17,177
19. Aset Lainnya	187,550

TOTAL ASET	8,401,844
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	2,540,831
2. Tabungan	2,343,336
3. Simpanan berjangka	1,388,349
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	195,388
7. Liabilitas spot dan derivatif	0
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9. Utang akseptasi	0
10. Surat berharga yang diterbitkan	362,064
11. Pinjaman yang diterima	4,194
12. Setoran jaminan	450
13. Liabilitas antar kantor 2)	1
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	1
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14. Liabilitas pajak tangguhan	0
15. Liabilitas lainnya	284,295
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	7,118,908
EKUITAS	
17. Modal disetor	727,448
a. Modal dasar	1,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	272,552
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18. Tambahan modal disetor	57,647
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	247
d. Dana setoran modal	57,400
e. Lainnya	0

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	0
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam	0
mata uang asing	
b. Selisih penilaian kembali aset tetap	0
c. Lainnya	0
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22. Modal pinjaman	0
23. Cadangan	226,459
a. Cadangan umum	113,811
b. Cadangan tujuan	112,648
24. Laba/rugi	271,382
a. Tahun-tahun lalu	0
b. Tahun berjalan	271,382
TOTAL EKUITAS	1,282,936
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8,401,844

Sumber: PTBPD Nusa Tenggara Timur

PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan

Desember 2014 **a**lam Jutaan Rupiah)

Pos-pos	Bank	
	Pos-pos	Desember 2014
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A.	Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	1,306,410
a.	Rupiah	1,306,410
b.	Valuta Asing	0
2.	Beban Bunga	500,946
a.	Rupiah	500,946
b.	Valuta Asing	0
Per	ndapatan (Beban) Bunga bersih	805,464
В.	Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	76,927

a. Peningkat	an nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat ber	harga	0
ii. Kredit		0
iii. Spot dan	derivatif	0
iv. Aset keua	angan lainnya	0
b. Penuruna	n nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntung	an penjualan aset keuangan	0
i. Surat ber	harga	0
ii. Kredit		0
iii. Aset keua	angan lainnya	0
d. Keuntung	an transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Keuntung	an dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen		0
g. Komisi/pr	ovisi/fee dan administrasi	13,955
h. Pemuliha	n atas cadangan kerugian penurunan nilai	40,133
i. Pendapata	n lainnya	22,839
2. Beban Op	erasional Selain Bunga	519,647
a. Penuruna	n nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat berh	arga	0
ii. Kredit		0
iii. Spot dan	derivatif	0
iv. Aset keu	angan lainnya	0
b. Peningka	an nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	0
c. Kerugian	penjualan aset keuangan	0
i. Surat berl	narga	0
ii. Kredit		0
iii. Aset keua	angan lainnya	0
d. Kerugian	transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Kerugian	penurunan nilai aset keuangan (impairment)	41,318
i. Surat ber	harga	0
ii. Kredit		41,318
iii. Pembiaya	aan syariah	0
iv. Aset keu	angan lainnya	0
f. Kerugian t	erkait risiko operasional	0
g. Kerugian	dari penyertaan dengan equity method	0

h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	378
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	300,581
k. Beban promosi	9,499
I. Beban lainnya	167,871
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(442,720)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	362,744
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(902)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(902)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	361,842
4. Pajak Penghasilan	90,460
a. Taksiran pajak tahun berjalan	90,460
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH	271,382
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0
	-

Sumber: PT BPD Nusa Tenggara Timur

PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR Laporan Publikasi Bulanan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Desember 2014 (dalam Jutaan Rupiah)

Pos-pos	Desember 2014
I. KOMPONEN MODAL	
A. Modal Inti	1,055,181
1. Modal Disetor	727,448
2. Cadangan Tambahan Modal	327,733
3. Modal Inovatif	0
4. Faktor Pengurang Modal Inti	0
5. Kepentingan Non Pengendali	0
B. Modal Pelengkap	59,426
1. Level Atas (Upper Tier 2)	59,426

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti	0
Faktor Pengurang Modal Pelengkap	0
C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap	0
Eksposur Sekuritisasi	0
D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3)	0
E. Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko pasar	0
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B-C)	1,114,607
III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UTK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B-C+E)	1,114,607
IV. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT	4,754,114
V. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL	1,193,751
VI. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR	0
VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)]	18.74
VIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL, DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)]	18.74

Sumber: PT BPD Nusa Tenggara Timur

Kesimpulan Hasil Survei Wilayah NTT:

Aset yang dimiliki BPD NTT sudah mencapai Rp 8,4 triliun. Dimana asset tersebut berasal dari sumber dana liabilities Rp 7,1 triliun dan dana ekuitas Rp 2,3 triliun. Rasio BPD NTT telah memenuhi ketentuan KPMM yang sudah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dengan capaian 18,74 %. Kondisi ini menggambarkan BPD NTT dengan modal yang dimilikinya akan mampu untuk menutupi jika ada kerugian-kerugian atau risiko yang dihadapi.

Rekomendasi Hasil Survei Wilayah NTT

BPD NTT harus lebih memperhatikan MBR dengan memberikan fasilitas kredit KPR yang terjangkau dan lembaga bank ini sangat layak untuk diikut sertakan dalam program FLPP dari Kementrian PUPERA.

4.2.6 PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan



Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Lima tahun kedepan (2013 - 2018) sebagai berikut; "Profesional, Terpercaya dan Kompetitif dalam Perencanaan "

Misi.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi yang jelas berdasarkan tugas pokok,fungsi dan rincian tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rumusan

Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan isu startegis perencanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan, maka dirumuskan misi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut;

- Mengkoordinasikan Mengembangkan, dan memfasilitasi perencanaan pembangunan wilayah yang menjamin sinergi antara pemerintah,swasta dan masyarakat.
- Mengikutsertakan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi.
- Mengembangkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana.

Tugas Bappeda

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembangunan berdasarkan asas desentralisasi, pembantuan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

b. Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintahan Daerah Kota Makasar

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

a. Tugas Pokok

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, mengendalikan dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang penyelenggaraan perumahan dan pembinaan teknis gedung Pemerintah Daerah.

b. Fungsi

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 28A ayat (1), menyelenggaran fungsi:

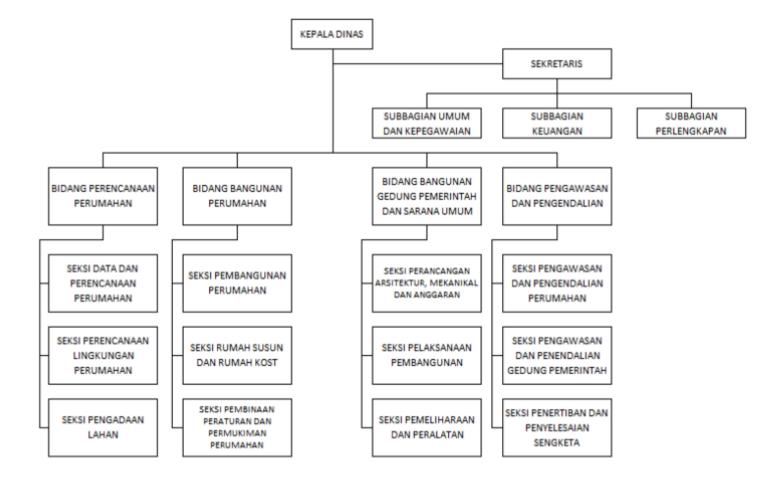
- Penyusunan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pemerintahan bidang perumahan dan pembinaan teknis pengelolaan gedung pemerintah daerah.
- Penyusunan rencana dan program penataan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan perumahan
- Penyusunan rencana dan program pelaksanaan penilaian dan bimbingan teknis pengelolaan perumahan
- Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi perizinan dan standarisasi di bidang perumahan
- Penyusunan rencana dan program pembinaan teknis, pengendalian dan pengawasan usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan
- Penyusunan rencana dan program perencanaan dan perancangan gedung pemerintah daerah

- Penyusunan rencana dan program pengewasan dan value engineering (ve) terhadap bangunan gedung pemerintah daerah termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum serta sarana penunjang lainnya
- Penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan gedung pemerintah daerah
- Penilaian teknis di bidang perumahan dan gedung pemerintah daerah
- Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
- Pelaksanaan kesekretariatan dinas
- Pembinaan unit pelaksana teknis

Dengan tugas dan fungsi yang diembang oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar maka struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 4...

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar



Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar

Visi: "Terpenuhinya Perumahan layak dan Bangunan Pemerintah yang andal berwawasan lingkungan menuju kota dunia baru"

Penjabaran visi:

- Perumahan adalahkumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- Bangunan Pemerintah adalahbangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.
- Andal adalah dapat dipercaya
- Layak (huni) adalahpantas untuk dihuni atau ditempati
- Berwawasan lingkungan adalahupaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun Misi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- Mengupayakan terwujudnya pemenuhan perencanaan perumahan dan pemukiman yang baik sesuai standar
- Mewujudkan Lingkungan Perumahan yang sehat dan nyaman
- Menata gedung kantor dan sarana umum
- Membina usaha pembangunan dan pengelolaan lingkungan perumahan dan sarana umum
- Melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan perumahan, pemukiman dan gedung pemerintah

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan RPJMD dan tupoksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar, maka program yang akan dilaksanakan meliputi:

- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Rumah Beton
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah Daerah
- Program lingkungan sehat perumahan
- Program Pengawasan Perumahan dan Gedung Pemerintah
- Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial.

Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- Penyediaan Bahan Bacaan;
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Lainnya;
- Pengelolaan Administrasi Perkantoran;
- Penyediaan Jasa Keamanan Internal Kantor.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- Pengadaan Mebeleur;
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor;

• Penyediaan Jasa Perizinan dan Sertifikat.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut: Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

- · Pendidikan dan Pelatihan formal;
- Workshop Tim Ahli Bangunan Gedung

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan RKA-SKPD;
- Penyusunan DKA-SKPD;
- Penyusunan RENJA SKPD;
- Penyusunan LAKIP;
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Serta Perhitungan Penyusunan Asset;
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Kota Makassar;
- Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Administrasi;
- Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Pengelolaan Keuangan SKPD

Program Rumah Beton, dengan kegiatan sebagai berikut: Pembangunan Model Rumah Kota (Knock down);

Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi MBR;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas;
- Pembangunan Perumahan dan Permukiman (Sisa DAK);
- Sosialisasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
- Pendataan MBR penerima akses kredit dan subsidi perumahan;
- Pendataan rumah tidak layak huni dan rumah dinas;
- Juknis fasilitasi MBR penerima akses kredit dan subsidi perumahan;
- Fasilitasi Pemberian Akses Kredit dan Subsidi Perumahan;

- Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
- Pembuatan sistem informasi (berbasis GIS) data perumahan, kawasan kumuh, kawasan rawan banjir, biring kanal dan sungai, gedung pemerintah dan sarana umum;
- Pendataan rumah susun dan rumah kost;
- Updating data pada sistem informasi perumahan;
- Perencanaan Kasiba dan Lisiba di bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
- Penyusunan Surat Izin Penghunian (SIP) dan bangunan milik pemerintah berbasis teknologi informasi;
- Revisi Perda Rumah Susun No. 10 Tahun 1994;
- perundang-undangan Sosialisasi peraturan perumahan dan kawasan pemukiman;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rumah kost dan rumah dinas;
- Penomoran Rumah

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan Gedung Kantor;
- Rehabilitasi sedang/berat bangunan milik pemerintah dan sarana umum;
- Rehabilitasi sedang/berat kantor lurah;
- Review desain gedung pemerintah mengacu konsep green building;
- Pembuatan Indeks Harga Satuan Bangunan Gedung (IHSBG);
- Taksasi Bangunan Gedung Pemerintah dan Sarana Umum;
- Pemantauan Bangunan Gedung Pemerintah;
- Penataan dan Perencanaan Kawasan Ex THR;
- Pemutakhiran Data Gedung Kantor Pemerintah.

Program lingkungan sehat perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan Prasarana Dan Sarana utilitas Lingkungan Kumuh;
- Penataan tampak bangunan dalam lorong;

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

- Pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana rusunawa;
- Pembangunan Prasarana Dan Sarana Utilitas Rusunawa Daya Makassar;
- Perencanaan DED Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas (BSPK) Permukiman Kumuh;
- Pembuatan profil kawasan kumuh;
- Perencanaan Kawasan Perumahan di sekitar kanal dan sungai;
- Pelaksanaan survey lahan/tanah;
- Pengadaan lahan/tanah perumahan;
- Pematangan dan pengamatan lahan/tanah

Program Pengawasan Perumahan dan Gedung Pemerintah, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengawasan dan Pengendalian rumah rumah dinas dan gedung pemerintah;
- Pengawasan dan Pengendalian Rumah Liar di sekitar kanal dan sungai;
- Pengawasan dan pengendalian rumah susun dan rumah kost;
- Pemberian Rekomendasi Layak huni dan layak fungsi pada Perumahan dan Bangunan Gedung;
- Penyelesaian Sengketa Perumahan dan gedung pemerintah;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan model rumah kota (knock down);
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan PSU Rusunawa;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan PSU Lingkungan Perumahan;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan Pembangunan PSU rusunawa;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan Pembangunan Gedung Kantor.

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Survey dan pendataan rumah korban kebakaran dan bencana alam lainnya;
- Pembangunan/Rehabilitasi rumah korban kebakaran dan bencana alam lainnya.

D. BPD SULSELBAR

BPD SULSELBAR mempunyai peran yang sangat penting bagi pemerintah daerah Sulawesi selatan dalam mendukung akitivitas pemerintahan dan pembangunan di wilayah provinsi tersebut. Sebagai lembaga keuangan perbankan BPD SULSELBAR diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi MBR di wilayah Sulselbar melalui produk KPR nya. BPD SULSELBAR saat ini sedang berperan aktif ikut serta dalam penyaluran KPR FLPP melalui program Kementrian PUPERA. Hal ini layak di lakukan BPD SULSELBAR karena kinerja lembaga ini dapat diandalkan. Hal ini digambarkan dalam laporan keuangannya sebagai berikut:

PT BPD SULAWESI SELATAN DAN BARAT - UUS Laporan Publikasi Bulanan Neraca

Desember 2014 (lalam Jutaan Rupiah)

Pos-pos	Bank		
Pos-pos	Desember 2014		
ASET			
1. Kas	505,986		
2. Penempatan pada Bank Indonesia	707,683		
3. Penempatan pada bank lain	600,508		
4. Tagihan spot dan derivatif	0		
5. Surat berharga	470,452		
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0		
b. Tersedia untuk dijual	0		
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	470,452		
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0		
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0		
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0		
8. Tagihan akseptasi	0		
9. Kredit	7,034,613		
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0		
b. Tersedia untuk dijual	0		

c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	7,034,613
10. Pembiayaan syariah	489,150
11. Penyertaan	82
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	73,275
a. Surat berharga	0
b. Kredit	71,075
c. Lainnya	2,200
13. Aset tidak berwujud	28,357
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	24,509
14. Aset tetap dan inventaris	231,366
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	131,609
15. Aset Non Produktif	636
a. Properti terbengkalai	0
b. Aset yang diambil alih	616
c. Rekening tunda	20
d. Aset antarkantor 2)	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	0
17. Sewa pembiayaan	0
18. Aset pajak tangguhan	19,194
19. Aset Lainnya	283,122
TOTAL ASET	10,141,756
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	2,619,004
2. Tabungan	1,721,122
3. Simpanan berjangka	2,230,399
4. Dana investasi revenue sharing	355,312
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	86
6. Pinjaman dari bank lain	468,500
7. Liabilitas spot dan derivatif	0
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0

O. Utang aksantasi	0
9. Utang akseptasi	0
10. Surat berharga yang diterbitkan	449,287
11. Pinjaman yang diterima	100,000
12. Setoran jaminan	4,371
13. Liabilitas antar kantor 2)	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14. Liabilitas pajak tangguhan	0
15. Liabilitas lainnya	452,775
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	8,400,856
EKUITAS	
17. Modal disetor	606,033
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	1,393,967
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18. Tambahan modal disetor	55,136
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	55,136
e. Lainnya	0
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	0
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Selisih penilaian kembali aset tetap	0
c. Lainnya	0
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22. Modal pinjaman	0
23. Cadangan	658,497
a. Cadangan umum	368,521
b. Cadangan tujuan	289,976
24. Laba/rugi	421,234
a. Tahun-tahun lalu	0

b. Tahun berjalan	421,234
TOTAL EKUITAS	1,740,900
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10,141,756

Sumber: PT BPD SULSELBAR

PT BPD SULAWESI SELATAN DAN BARAT - UUS Laporan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan

Desember 2014 (dalam Jutaan Rupiah)

	Bank
Pos-pos	Desember 2014
2 ENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,434,874
a. Rupiah	1,434,874
b. Valuta Asing	0
2. Beban Bunga	395,026
a. Rupiah	395,026
b. Valuta Asing	0
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,039,848
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
 Pendapatan Operasional Selain Bunga 	73,272
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	0

e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	4
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	14,089
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	14,095
i. Pendapatan lainnya	45,084
2. Beban Operasional Selain Bunga	543,099
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	15,669
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	14,535
iii. Pembiayaan syariah	834
iv. Aset keuangan lainnya	300
f. Kerugian terkait risiko operasional	2,967
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	10
 Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 	0
j. Beban tenaga kerja	288,360
k. Beban promosi	10,777
I. Beban lainnya	225,316
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(469,827)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	570,021

1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan	(1)
inventaris	
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(8,461)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(8,462)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	561,559
4. Pajak Penghasilan	140,325
a. Taksiran pajak tahun berjalan	140,325
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH	421,234
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Sumber: BPD SULSELBAR



DAFTAR ISI BAB 5

- 1. TINJAUAN YURIDIS PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG UNTUK PEMBIAYAAN PERUMAHAN
- 2. POTENSI DANA JANGKA PANJANG UNTUK PEMBIAYAAN PERUMAHAN
- 3. SIMULASI PENGELOLAAN DANA JANGKA PANJANG, SERTA KAJIAN HAMBATAN YANG TERKAIT DENGAN DANA JANGKA PANJANG.
- 4. MATERI TEKNIS PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA JANGKA PANJANG UNTUK PEMBIAYAAN PERUMAHAN

5.1. TINJAUAN YURIDIS PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG UNTUK PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Dasar hukum yang digunakan dalam pembiayaan jangka panjang untuk pembiayaan perumahan adalah sbb :

- 1) Undang Undang Dasar 1945
 - Pasal. 28H, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan".
- Undang Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Sosial And Cultural Rights
 - Pasal. 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, "Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus".
- Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - Pasal. 5 ayat (1), "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah".

Pasal 121 mengamanatkan Pemerintah mengembangkan sistem pembiayaan perumahan berupa :

- Pembentukan atau pengembangan lembaga pembiayaan
- Pengerahan dan pemupukan dana
- Pemanfaatan sumber biaya

Kemudahan atau bantuan pembiayaan

- 4) Undang Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun Passl. 5 ayat (1), "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah".
- 5) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN
 - Pada RPJMN 3 (2015-2019); pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang

- Pada RPJMN 4 (2020-2025); terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien dan akuntabel
- 6) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 94 mengamanatkan Pemerintah mengembangkan sistem pembiayaan perumahan untuk rumah susun berupa :
 - Pembentukan atau pengembangan lembaga pembiayaan
 - Pengerahan dan pemupukan dana
 - Pemanfaatan sumber biaya
 - Kemudahan atau bantuan pembiayaan
- 7) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Tugas pemerintah pusat dalam pembagian urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Pemukiman adalah pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR
- 8) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda

 Tugas pemerintah pusat dalam pembagian urusan pemerintahan bidang Perkim

 adalah pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
 Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2),
 Peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa: Dana Jaminan Sosial Hari Tua adalah dana amanat milik peserta jaminan hari tua yang merupakan himpunan juran jaminan hari tua beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan hari tua.

Ayat (5a) menyatakan: Dana Jaminan Sosial Pensiun adalah dana amanat milik peserta jaminan pensiun yang merupakan himpunan iuran jaminan pensiun beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk kepada manfaat pembayaran peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan pensiun.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan: Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk Investasi yang dikembangkan melalui penempatan pada instrumen investasi dalam negeri.

Kemudian ayat (2). Instrumen investasi dalam negeri meliputi:

- a. deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank;
- b. surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;
- surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;
- d. surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;
- e. saham yang tercatat dalam Bursa Efek;
- reksadana:
- g. efek beragun aset;
- h. dana investasi real estat;
- repurchase agreement;

- j. penyertaan langsung;
- k. tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan; dan/atau
- obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek.

Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan berupa investasi tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase." (Pasal 29 ayat 2)

Kemudian dalam "Pasal 28 (1) menyebutkan: Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek paling sedikit harus memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

Ketentuan ayat (2) menyebutkan: Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa reksadana merupakan produk reksadana yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ketentuan ayat (3) menyebutkan: Pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Investasi berupa efek beragun aset dan dana investasi real estat harus memenuhi ketentuan:

- a. telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan
- c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

Selanjutnya pada Pasal 29 (1) menyebitkan: instrumen investasi dibatasi dengan ketentuan:

a. Investasi berupa deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable

- certificate deposit) pada Bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk setiap Bank;
- b. Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- c. Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- d. Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15%
 (lima belas persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50%
 (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- e. Investasi berupa efek beragun aset antuk setiap manajer investasi atau penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi;
- f. Investasi berupa dana investasi real estat, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi;
- g. Investasi berupa repurchase agreement, untuk setiap counterpart paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen);
- Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi;
- Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi; dan
- j. Investasi berupa obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Pasal 35A, menyebutkan: "Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dalam bentuk deposito yang dipergunakan untuk mendukung program perumahan peserta ditempatkan pada bank pemerintah dengan tingkat imbal hasil paling sedikit setara dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia."

Pasal 36 ayat (1), menyebutkan: Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam bentuk Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d paling sedikit memiliki peringkat Aatau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

Kemudian pada ayat (2), menyebutkan: Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam bentuk Investasi berupa reksadana merupakan produk reksadana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ayat (3) meyebutkan: Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam bentuk Investasi berupa efek *beragun aset* dan dana investasi real estat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- paling sedikit memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan
- c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal

Selanjutnya Pasal 37 ayat (1), menyebutkan: Instrumen investasi dibatasi dengan ketentuan:

a. Investasi berupa deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank: 1) paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)

- dari jumlah Investasi untuk setiap Bank Pemerintah; dan 2 paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi untuk setiap Bank selain Bank Pemerintah;
- b. Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- c. Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- d. Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi;
- e. Investasi berupa efek beragun aset untuk setiap manajer investasi atau penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi;
- f. Investasi berupa dana investasi real estat, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Investasi;
- Investasi berupa repurchase agreement untuk setiap counterpart paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi;
- h. Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi; dan
- Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Investasi; dan
- Investasi berupa obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap

emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah Investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Investasi.

Kemudiaan ayat (2) dan (3) menyatakan: Jumlah Investasi merupakan jumlah investasi masing-masing Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun. Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Dana Jaminan Sosial Pensiun dalam bentuk Investasi tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

Pasal 37A, menyebutkan: "Pengembangan Dana Jaminan Sosial Hari Tua pada instrumen investasi dapat digunakan untuk mendukung program penyediaan perumahan bagi peserta paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total Dana Jaminan Sosial Hari Tua."

Kemudian Pasal 38 ayat (1) menyebutkan: Instrumen investasi dalam negeriantuk Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan Dana Jaminan Sosial kematian meliputi:

- a. deposito berjangka termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank;
- b. surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia;
- surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia;
- d. surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek;
- e. saham yang tercatat dalam Bursa Efek;
- reksadana;
- repurchase agreement;
- h. efek beragun aset; dan/atau
- obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek.

12) RPJMN 2015-2019

Target penanganan backlog tahun 2015-2019 sebanyak 2,2 juta unit rumah yang akan ditangani melalui:

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

- Pembangunan baru (pemilikan dan atau sewa);
- Pembangunan swadaya;
- Rusunawa dan peningkatan kualitas.
- Program Nawacita

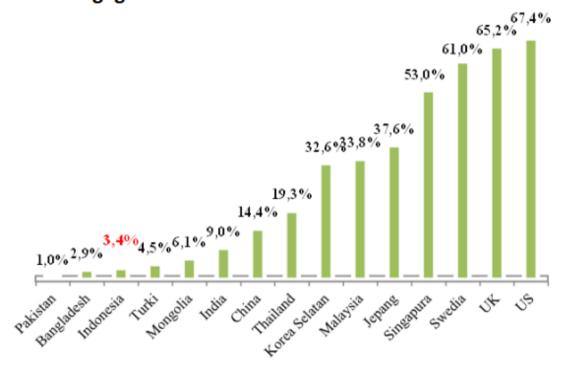
Program Rumah Susun Murah yang disubsidi; perlu pendayagunaan, pemberdayaan dan rekayasa skema dan mekanisme pembiayaan baik yang bersumber dari dana APBN maupun sumber dana lainnya

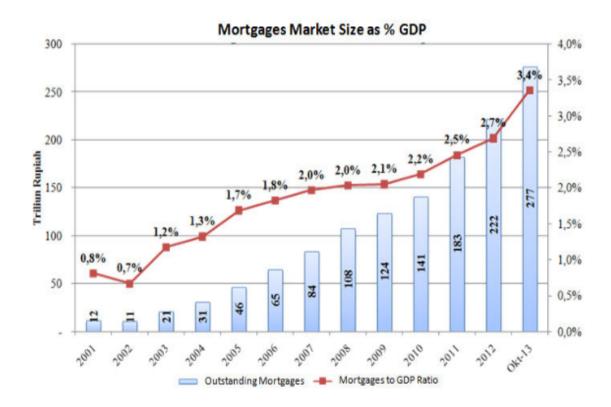
- 13) Peraturan Presiden tentang RPJMN tahun 2015-2019
- 14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pemumahan Rakyat tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019
- 15) Rencana Strategis Dirjen Pembiayaan Perumahan tahun 2015-2019
- 16) Quick Win Pemerintah
 - Penempatan 10 % Dana Jangka Panjang BPJS, Tab. Haji, Dana Pensiun untuk pembiayaan pembangunan perumahan
 - Pembentukan Lembaga Investasi Perumahan Jangka Panjang

5.2. POTENSI DANA JANGKA PANJANG UNTUK PEMBIAYAAN PERUMAHAN

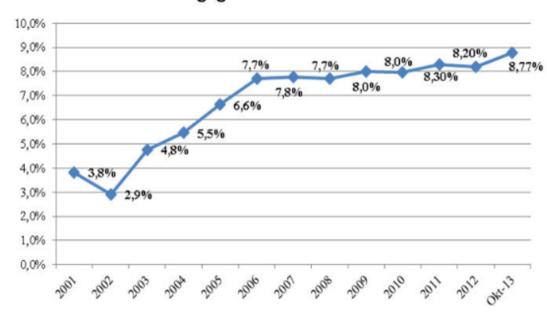
Pasar KPR Di Indonesia

Mortgages to PDB Ratios in Some Selected Countries





Mortgages to Total Credit Ratio



- Indonesia's mortgage market size as % GDP is considered low compared to its neighboring countries
- The size is kept increasing over the years reflecting Indonesia's GDP increases
- The same trend of increased in mortgage is also founded with respect to the total credit issued in the country

SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN

PERI	ODE	JENIS KPR	SUMBER PEMBIA		EMBIAYAAN				
PELITA	TAHUN	BERSUBSIDI	РМР	BANK DUNIA	KLBI	RDI	BANK PELAKSANA	APBN	SMF
II/III	1976-	Perumnas & Non	4		4		4		
III/IV/	1986- 91	PहिHMRब्रेड & Non Perumnas	, √	4	4		V 7G	UNA	
V/VI	1991-	RS/RSS			K	RED!	TTICL		
TA 1999/	1999- 2000	RS/RSS			4	4	√		
TA 2000	2000 2001	RS/RSS				4	4		
TA ⊋ <u>Q</u> 01	2002	RS/RSS					4	1	
TA 2003	2003 2010	RSH/RUSUN					V	4	4
TA 2010		RSH/RUSU					1	4	4

5.3. SIMULASI PENGELOLAAN DANA JANGKA PANJANG, SERTA KAJIAN HAMBATAN YANG TERKAIT DENGAN DANA JANGKA PANJANG

ASPEK KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2014(dalam jutaan

(daiguri

rupian)							
JAMINAN				INVESTASI			KPD
SOSIAL	IURAN	MANFAAT	INVESTASI	BRUTO	ASET NETO	ASET	PESERTA
JKK	3.019.420	651.069	11.539.708	1.568.954	2.955.355	11.697.130	1.307.218
JKM	1.375.176	455.223	3895777	466.842	1.226.074	3.950.698	440.610
JHT	24.326.752	12.894.360	163.871.751	20.401.303	29.167.267	166.041.511	165.481.498
TOTAL							
DJS	28.720.349	14.000.652	179.307.336	22.437.099	33.348.696	181.689.339	167.229.326
	DENDADATAN	DIAVA	DANIA	DENDADATAN	FIZITAC	DELANIA	TOTAL
	PENDAPATAN	BIAYA	DANA	PENDAPATAN	EKUITAS	BELANJA	ASET
	OPERASIONAL	OPERASIONAL	INVESTASI	INVESTASI BRUTO		MODAL	
BPJS	2.436.592	2.512.301	7.655.927	850.764	8.352.599	312.162	11.415.792
			186.963.263				

HASIL INVESTASI NETO (dalam jutaan rupiah)				
JAMINAN KECELAKAAN				
KERJA (JKK)	1.333.205			
JAMINAN KEMATIAN				
(JKM)	404.421			
JAMINAN HARI TUA (JHT)	19.788.020			
BPJS	741.286			
	22.266.932			

HASIL PENGEMBANGAN	
JAMINAN KECELAKAAN KERJA	
(JKK)	0.1155319
JAMINAN KEMATIAN (JKM)	0.1038101
JAMINAN HARI TUA (JHT)	0.1207530
BPJS	0.0968251
TOTAL	0.1190979

PENYISIHAN 10% UNTUK DANA PERUMAHAN (dalam jutaan rupiah)						
JKK	11.539.708	1.153.970				
JKM	3.895.777	389.577				
JHT	163.871.751	16.387.175				
TOTAL DJS	179.307.336	17.930.733				
	DANA					
	INVESTASI					

BPJS	7.655.927	765.592
	186.963.263	18.696.326

HASIL INVESTASI BPJS (dalam jutaan rupiah)

The same of the sa									
	DANA INVESTASI	HASIL INVESTASI	HASIL/DANA	PENYISIHAN DANA					
			INVESTASI	PERUMAHAN					
				(10%)					
JKK	11.539.708	1.333.205	0.1155319	1.153.970					
JKM	3895777	404.421	0.1038101	389.577					
JHT	163.871.751	19.788.020	0.1207530	16.387.175					
BPJS	7.655.927	741.286	0.0968251	765.592					
	186.963.263	22.266.932	0.1190979	18.696.326					

TAKSIRAN RISIKO BPJS DI PASAR SEKUNDER (Asumsi historis return dan tingkat inflasi)

Comment of the second of						
KONDISI				Ri –		Pi. (Ri-
EKONOMI	PROBABILITAS	RETURN	Pi.Ri	E(R)	$(Ri-ER)^2$	$ER)^2$
Resesi	0.1	-0.05	-0.005	-0.094	0.008836	0.000884
Normal	0.7	0.05	0.035	0.006	3.6E-05	2.52E-05
Boom	0.2	0.07	0.014	0.026	0.000676	0.000135
			0.044			
						0.001044
					Standar	
					Deviasi	0.032311

Taksiran risiko adalah 3.23%

TAKSIRAN HASIL INVESTASI PENYISIHAN DANA PERUMAHAN BPJS (dalam jutaan rupiah)

				PENYISIHAN	TAKSIRAN
	EXPECTED		%HASIL	DANA	HASIL
	RETURN	%HASIL	TOTAL	PERUMAHAN	INVESTASI
JKK	0.044	0.115532	0.159532	1.153.970,8	184.095,2152
JKM	0.044	0.10381	0.14781	389.577,7	57.583,5188
JHT	0.044	0.120753	0.164753	16.387.175,1	2.699.837,704
BPJS	0.044	0.096825	0.140825	765.592,7	107.814,6788

TAKSIRAN RETURN BPJS PADA PASAR SEKUNDER(dalam jutaan rupiah)

	TAKSIRAN	DEVIASI			
	HASIL	STANDAR		MINIMAL	MAXIMAL
	INVESTASI	D	RISIKO	RETURN	RETURN
			5.946,27		
JKK	184.095,215	0.0323	5	178.148,9397	190.041,4907
JKM	57.583,5188	0.0323	1859,948	55.723,57114	59.443,46646
JHT	2.699.837,7	0.0323	87204,76	2.612.632,947	2.787.042,46

					2
BPJS	107.814,679	0.0323	3482,414	104.332,2647	111.297,0929

TAKSIRAN RISIKO PADA PASAR PRIMER (Asumsi tingkat bunga KPR komersil)

Dalam jutaan rupiah

KONDISI	PROB	RETUR				
		N	Pi.Ri	Ri - ER	(Ri-ER)2	Pi.(Ri-ER)2
LOW	0.1	0.1025	0.01025	-0.01525	0.000232563	2.32563E-05
AVERAG						
E	0.7	0.115	0.0805	-0.00275	7.5625E-06	5.29375E-06
HIGH	0.2	0.135	0.027	0.01725	0.000297563	8.85434E-08
			0.11775			2.86385E-05
					Deviasi	
					Standar	0.00535

TAKSIRAN HASIL INVESTASI BPJS (dalam jutaan rupiah)

THISTICE THISTE IT VESTION BY US (Union Junior Tupina)								
			PENYISIHAN	TAKSIRAN				
		EXPECTED	DANA	HASIL				
		RETURN	PERUMAHAN					
	JKK	0.11775	1.153.970,8	135.880,0617				
	JKM	0.11775	389.577,7	45.872,77418				
	JHT	0.11775	16.387.175,1	1.929.589,868				
	BPS	0.11775	765.592,7	90.148,54043				

TAKSIRAN RETURN BPJS (dalam jutaan rupiah)

	TAKSIRAN		• ′		
				3 673 773 6 4 7	
	HASIL	DEVIASI		MINIMAL	MAXIMAL
	INVESTASI	STANDARD	RISIKO	RETURN	RETURN
JKK	135.880,0617	0.00535	726,9583301	135.153,1034	136.607,02
JKM	45.872,77418	0.00535	245,4193418	45.627,35483	11.258.066,05
JHT	1.929.589,868	0.00535	10.323,30579	1.919.266,562	1.919.266,56
BPJS	90.148,54043	0.00535	482,2946913	89.666,24573	90.630,83512

ASPEK KEUANGAN PT TASPEN PT TASPEN (DALAM JUTAAN RUPIAH)

	DANA INVESTASI	HASIL INVESTASI	HASIL/DANA INVESTASI	PENYISIHAN DANA PERUMAHAN (10%)
2012	98.305.821	7.766.098	0.078999371	9.830.582,1
2013	100.716.922	8.331.580	0.082722742	10.071.692,2
2014	124.288.429	11.222.602	0.090294825	12.428.842,9

TAKSIRAN RISIKO PT TASPEN (dalam jutaan rupiah)

|| LAPORAN AKHIR

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

					Pi. (Ri-
Prob.	RETURN	Pi.Ri	Ri – ER	$(Ri-ER)^2$	$ER)^2$
0.1	-0.05	-0.005	-0.094	0.008836	0.0008836
0.7	0.05	0.035	0.006	3.6E-05	0.0000252
0.2	0.07	0.014	0.026	0.000676	0.0001352
		0.044			
					0.001044
					0.0323109
				STANDAR	
				DEVIASI	0.0323

Upiah)

TAKSIRAN HASIL INVESTASI PT TASPEN (dalam jutaan rupiah)

111110111111	THE LOTE IT TEST	TITOTI I TITOTI	· (contain Jamain	i i apian)	
				PENYISIHAN	TAKSIRAN
	EXPECTED		%HASIL	DANA	HASIL
	RETURN	%HASIL	TOTAL	PERUMAHAN	INVESTASI
2012	0.044	0.078999371	0.122999371	9.830.582,1	1.209.155,412
2013	0.044	0.082722742	0.126722742	10.071.692,2	1.276.312,457
2014	0.044	0.090294825	0.134294825	12.428.842,9	1.669.129,288

TAKSIRAN RETURN PT.TASPEN (dalam jutaan rupiah)

	TAKSIRAN				
	HASIL	DEVIASI		MINIMAL	MAXIMAL
	INVESTASI	STANDARD	RISIKO	RETURN	RETURN
2012	1.209.155,412	0.0323	39.055,71982	1.170.099,693	1.248.211,132
2013	1.276.312,457	0.0323	41.224,89235	1.235.087,564	1.317.537.349
2014	1.669.129,288	0.0323	53.912,87599	1.615.216,412	1.723.042,164

TAKSIRAN RISIKO PT TASPEN PADA PASAR PRIMER (Asumsi tingkat bunga KPR komersil)

Dalam jutaan rupiah

KONDISI	PROB.	RETURN	Pi.Ri	Ri - ER	(Ri-ER)2	Pi.(Ri-EI
						2.32563
Low	0.1	0.1025	0.01025	-0.01525	0.000232563	05
						5.29375
Normal	0.7	0.115	0.0805	-0.00275	7.5625E-06	06
						8.85434
High	0.2	0.135	0.027	0.01725	0.000297563	08
_						2.86385
			0.11775			05
					Standar Deviasi	0.0053:

TAKSIRAN HASIL INVESTASI PT TASPEN (dalam jutaan rupiah)

	EXPE	CTED	%HAS	SIL	%НА	SIL		YISIHAN	TA	KSIRAN
2012 2013 2014	RETU	RN 0.1177 0.1177 0.1177	75		TOTA	AL	DAN PER	NA UMAHAN 983058 1007169 1242884	2.1 1 2.2 1	ASIL INVEST 157551.042 185941.757 463496.251
TAKSIRA	N RET	URN PA	SAR PRIM	IER (PT	TASPE	N)				
		HASI	SIRAN L STASI	DEVIA STANI		RISI	ко	MINIMA RETURN		MAXIMAL RETURN
	2012		7.551,042		0.00535		2,898076		358,144	
	2013		5.941,757		0.00535		1,788398			1.192.286,54
	2014	1.463	3.496,251	(0.00535	7829	0.704945	1.455.6	066,547	1.471.325,95
ASPEK K			APERTAR DALAM J		RUPIA	H)				
	DANA	. 1	HASIL	HAS	SIL/DAN	A I	PENYISI DANA PERUMA			
	INVES	TASI	INVESTA	SI INV	ESTASI		(10%)			
	59	86352	2654	10	0.004	51	59	38635.2		
		45122		51				94512.2		
	DETII	ONI	p: p:		D: Ee		(D: ED)2			
0.1	KETUI	-0.05	Pi.Ri	-0.005		094	(Ri-ER)2	.008836	0.00088	836
0.7		0.05						3.6E-05	0.00002	
0.2		0.07		0.014	0.	026	0	.000676	0.00013	352
				0.044					0.0010	044
									0.0323	109
							STANDA DEVIAS		0.03	323
EXPECT	ED %	HASIL	%HASIL	PENY	ISIHAN		AKSIRA IASIL	N		
RETURN	1		TOTAL	DANA	N MAHAN	Π	NVESTA	SI		
			0.04851 0.048416		588635	.2 2	8554.693 8783.902			

				MINIMAL	MAXIMAL
	TAKSIRAN	DEVIASI	RISIKO	RETURN	RETURN
	28554.69	0.0323	922.3166017	27632.37695	29477.01
2012	28783.9	0.0323	929.7200564	27854.18262	29713.62

PROB.	RETURN	Pi.Ri	Ri - ER	(Ri-ER)2	Pi.(Ri-ER)2
					2.32563E-
0.1	0.1025	0.01025	-0.01525	0.000232563	05
					5.29375E-
0.7	0.115	0.0805	-0.00275	7.5625E-06	06
					8.85434E-
0.2	0.135	0.027	0.01725	0.000297563	08
					2.86385E-
		0.11775			05

EXPECTE	%HASI			TAKSIRA
D	L	%HASIL	PENYISIHAN	N
			DANA	
RETURN		TOTAL	PERUMAHAN	HASIL INVESTASI
0.11775			588635.2	69311.79
0.11775			594512.2	70003.81

TAKSIRAN RETURN PASAR PRIMER (PT BAPERTARUM)

TAKSIRAN HASIL	DEVIASI	RISIKO	MINIMAL RETURN	MAXIMAL RETURN
INVESTASI	STANDAR	D		
69311.79	0.00535	370.8181022	68940.9767	69682.61
70003.81	0.00535	374.5203918	69629.29116	70378.33

ASPEK KEUANGAN DANA PENSIUN

DANA	HASIL	HASIL/DANA	PENYISIHAN DANA
------	-------	------------	--------------------

	INVESTAS I	INVESTAS I	INVESTASI	PERUMAHAN (10%)
				0
Jan-15	183509	4187	0.02281632	18350.9
FEB	185103	4805	0.02595852	18510.3
MARET	187565	5258	0.028052541	18756.5
APRIL	187434	5414	0.028884834	18743.4
MEI	188685	64273	0.340636511	18868.5
JUNI	190586	7304	0.038323906	19058.6
JULI	189889	9107	0.047959597	18988.9
AGUSTUS	187457	10076	0.053750994	18745.7
SEPTEMBE R	185283	11031	0.059535953	18528.3

	RETURN	Pi.Ri	Ri - E®		(Ri-ER)2	Pi.(Ri- ER) ²
0.1	0.04	0.004		-0.01	0.0001	0.00001
0.8	0.05	0.04		0	0	0
0.1	0.06	0.006		0.054	0.002916	0.000292
		0.05				0.000302
					standar deviasi	0.0173

EXPECTED RETURN	%HASIL	%HASIL TOTAL	PENYISIHAN DANA PERUMAHAN	TAKSIRAN HASIL INVESTASI
0.05	0.022816	0.072816	18350.9	1336.245
0.05	0.025959	0.075959	18510.3	1406.015
0.05	0.028053	0.078053	18756.5	1463.992488
0.05	0.028885	0.078885	18743.4	1478.57
0.05	0.340637	0.390637	18868.5	7370.725
0.05	0.038324	0.088324	19058.6	1683.33
0.05	0.04796	0.09796	18988.9	1860.145
0.05	0.053751	0.103751	18745.7	1944.885
0.05	0.059536	0.109536	18528.3	2029.515

TAKSIRAN HASIL INVESTASI			MINIMAL RETURN	MAXIMAL RETURN
1336.245	0.0173	23.1170385	1313.127962	1359.362
1406.015	0.0173	24.3240595	1381.690941	1430.339
1463.992	0.0173	25.32707005	1438.665418	1489.32

1478.57	0.0173	25.579261	1452.990739	1504.149
7370.725	0.0173	127.5135425	7243.211458	7498.239
1683.33	0.0173	29.121609	1654.208391	1712.452
1860.145	0.0173	32.1805085	1827.964492	1892.326
1944.885	0.0173	33.6465105	1911.23849	1978.532
2029.515	0.0173	35.1106095	1994.404391	2064.626

DANA PENSIUN PRIMER

	RETURN	Pi.Ri	Ri - E®	(Ri-ER)2	Pi.(Ri- ER)2
0.1	0.1025	0.01025	0.01325	0.0001756	1.75563E- 05
0.8	0.115	0.092	0.00075	5.625E-07	4.5E-07
0.1	0.135	0.0135	0.01925	0.0003706	3.70563E- 05
		0.11575			5.50625E- 05

Standar Deviasi

0.0074

Expected	Penyisihan Dana	Taksiran Ha	asil	
return	Perumahan	Investasi		
0.11575	18350.9	212	4.117	
0.11575	18510.3	214	2.567	
0.11575	18756.5	217	1.065	
0.11575	18743.4	216	9.549	
0.11575	18868.5	218	4.029	
0.11575	19058.6	220	6.033	
0.11575	18988.9	219	7.965	
0.11575	18745.7	216	9.815	
0.11575	18528.3	214	4.651	
TAKSIRA	N DEVIASI	RISIKO	MINIMAL RETURN	MAXIMAL RETURN
HASIL INVESTA	STANDA	SD O		
2124.1	0.0074	15.718463	2108.398212	2139.835
2142.5	0.0074	15.854997	2126.712228	2158.422
2171.0	0.0074	16.06588	2154.998995	2187.131
2169.5	0.0074	16.054659	2153.493891	2185.603

2184.029	0.0074	16.161814	2167.867061	2200.191
2206.033	0.0074	16.324644	2189.708306	2222.358
2197.965	0.0074	16.264942	2181.700233	2214.23
2169.815	0.0074	16.056629	2153.758146	2185.871
2144.651	0.0074	15.870415	2128.78031	2160.521

Asuransi umum

asuransi umum

	DANA	H_{λ}	ASIL	HASIL/DANA	PENYISI DANA	HAN
	INVESTA	SI IN	VESTASI	INVESTASI	PERUMA (10%)	AHAN
					0	
15-Jan	613	26	304	0.004957	6132.6	
FEB	616	17	674	0.010939	6161.7	
MARET	638	885	918	0.01437	6388.5	
APRIL	624	46	1275	0.020418	6244.6	
MEI	630	002	1576	0.025015	6300.2	
JUNI	631	62	2009	0.031807	6316.2	
JULI	641	96	2261	0.03522	6419.6	
AGUSTUS	646	808	2681	0.041496	6460.8	
RF	ETURN P	i.Ri	Ri - E®	(Ri-ER)	2	Pi.(Ri- ER)2
0.1	0.04	0.004		-0.01	0.0001	0.00001
0.8	0.05	0.04		0	0	0
0.1	0.06	0.006		0.054	0.002916	0.000292
		0.05				0.000302

standar deviasi 0.0173

EXPECTED	%HASIL	%HASIL	PENYISIHAN	TAKSIRAN HASIL
RETURN		TOTAL	DANA PERUMAHAN	INVESTASI
0.05	0.004957	0.054957	6132.6	337.03
0.05	0.010939	0.060939	6161.7	375.485
0.05	0.01437	0.06437	6388.5	411.225
0.05	0.020418	0.070418	6244.6	439.73
0.05	0.025015	0.075015	6300.2	472.61
0.05	0.031807	0.081807	6316.2	516.71
0.05	0.03522	0.08522	6419.6	547.08
0.05	0.041496	0.091496	6460.8	591.14

TAKSIRAN	DEVIASI	RISIKO	MINIMAL RETURN	MAXIMAL RETURN
HASIL INVESTASI	STANDAR	AD.		
337.03	0.0173	5.830619	331.1994	342.8606
375.485	0.0173	6.495891	368.9891	381.9809
411.225	0.0173	7.114193	404.1108	418.3392
439.73	0.0173	7.607329	432.1227	447.3373
472.61	0.0173	8.176153	464.4338	480.7862
516.71	0.0173	8.939083	507.7709	525.6491
547.08	0.0173	9.464484	537.6155	556.5445
591.14	0.0173	10.22672	580.9133	601.3667

Asuransi umum primer

DANA PENSIUN **PRIMER**

	RETURN	Pi.Ri	Ri - E®	(Ri-ER)2	Pi.(Ri-ER)2
0.1	0.1025	0.01025	0.01325	0.000176	1.76E-05
0.8	0.115	0.092	0.00075	5.63E-07	4.5E-07
0.1	0.135	0.0135	0.01925	0.000371	3.71E-05
		0.11575			5.51E-05
				Standar De	eviasi
					0.0074

Expected	Penyisihan	Taksiran F	Iasil
	Dana		
return	Perumahan	Investasi	
0.11575	6132.6	709.8485	
0.11575	6161.7	713.2168	
0.11575	6388.5	739.4689	
0.11575	6244.6	722.8125	
0.11575	6300.2	729.2482	
0.11575	6316.2	731.1002	
0.11575	6419.6	743.0687	
0.11575	6460.8	747.8376	
0.11575	18528.3	2144.651	

TAKSIRAN	DEVIASI	RISIKO	MINIMAL RETURN	MAXIMAL RETURN
HASIL INVESTASI	STANDARD			
709.8485	0.0074	5.252879	704.5956	715.1013
713.2168	0.0074	5.277804	707.939	1421.156
739.4689	0.0074	5.47207	733.9968	1473.466
722.8125	0.0074	5.348812	717.4636	728.1613
729.2482	0.0074	5.396436	723.8517	734.6446
731.1002	0.0074	5.410141	725.69	736.5103
743.0687	0.0074	5.498708	737.57	748.5674
747.8376	0.0074	5.533998	742.3036	753.3716
2144.651	0.0074	15.87042	2128.78	2160.521

5.3. MATERI TEKNIS PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA JANGKA PANJANG UNTUK PEMBIAYAAN PERUMAHAN

5.1. TINJAUAN YURIDIS PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG UNTUK PEMBIAYAAN PERUMAHAN

5.2. PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Pemenuhan kebutuhan rumah masih menghadapi berbagai kendala kebutuhan rumah karena pertumbuhan penduduknya juga masih tinggi. Backlog perumahan saat ini telah mencapai 13,5 juta unit dan akan bertambah 800.000 unit setiap tahunnya sehingga berpotensi menyebabkan gejolak sosial jika tidak ditangani dengan baik. Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber dana jangka panjang untuk pembiayaan

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

pembangunan perumahan menyebabkan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan

masyarakat yang membutuhkan perumahan belum dapat terealisasi secara ideal.

Pemerintah melalui Kabinet kerja 2015 berusaha melakukan penempatan 10% dana

jangka panjang BPJS, Tabungan Haji, Dana Pensiun, PT SMF untuk pembangunan

perumahan dan permukiman, agar MBR dapat memiliki rumah yang layak huni, aman,

sehat serta terjangkau.

Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk merealisasikan kebutuhan

perumahan masyarakan melalui berbagai program Dalam rangka meningkatkan peran

Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam mempercepat

ketersediaan perumahan untuk masyarakat, khususnya MBR, melalui pendayagunaan

sumber dana jangka panjang, maka diusahakan untuk:

a. Menggali potensi sumber-sumber pendanaan jangka panjang untuk pembiayaan

perumahan;

b. Mendorong lembaga-lembaga terkait untuk ikut mendayagunakan sumber-sumber

dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan;

c. Menggali permasalahan, kendala, serta potensi permasalahan yang dihadapi oleh

LKB/LKBB terkait dalam pendayagunaan dana jangka panjang untuk pembiayaan

perumahan.

Bersama ini digambarkan peran pemerintah untuk sector perumahan

Tabel 5.1.

Intervensi Pemerintah untuk Sektor Perumahan

BAB 5 - 14



Sumber: PUPERA (2015)

5.2.1. PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 21 Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 54

Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, Pemerintah dan/atau pemerintah daerahwajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui programperencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahanpembangunan dan perolehan rumah berupa:

a. subsidi perolehan rumah

- b. stimulan rumah swadaya
- c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- d. perizinan
- e. asuransi dan penjaminan
- f. penyediaan tanah;g.sertifikasi tanah; dan/atauh.prasarana, sarana, dan utilitas umum

Pasal 126

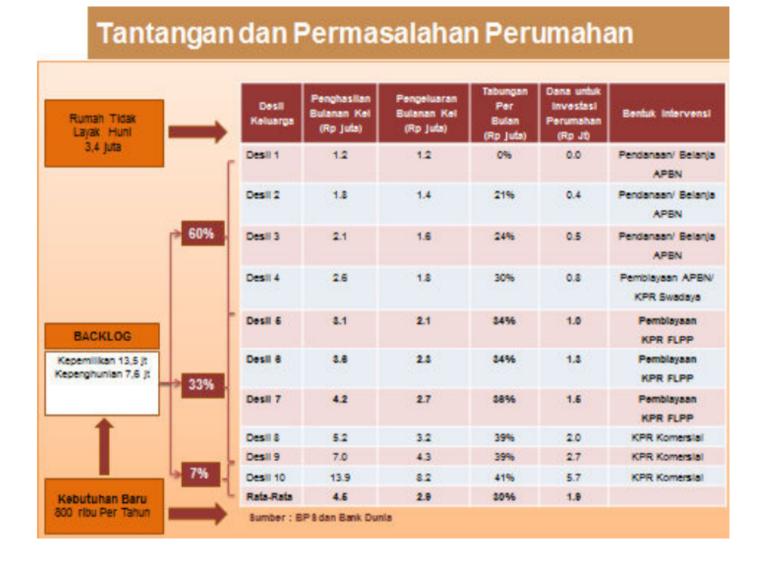
Memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan danperolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR Masyarakat

5.2.2. ISU DAN PERMASALAHAN TERKAIT PERAN PELAKU PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA

- Keterbatasan Kemenpera dalam pembangunan perumahan swadaya,khususnya dalam verifikasi lokasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan (jumlah SDM yang terbatas)
- Peran Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan Kemenpera didaerah masih belum optimal (dalam beberapa kasus, pelaksanaan kegiatandi Kabupaten/Kota tanpa sepengetahuan Pemerintah Provinsi).
- Lemahnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunanperumahan swadaya yang dilaksnakan oleh berbagai pemangku kepentingan.4.Peran para pemangku kepentingan lainnya masih belum terpetakan denganjelas (Swasta, LSM, dan lain-lain)

Tabel 5.2.

Tantangan dan Permasalahan Perumahan



Angka backlog yang menunjukkan kecenderungan makin tingginya selisih antara pertumbuhan permintaan dan penawaran rumah kepada MBR merupakan masalah yang mendasar Hal ini terjadi karena sejumlah hambatan belum dituntaskan.

Bemua bentuk hambatan dalam kebijakan perumahan untuk rakyat di Indonesia saat ini, memenuhi kriteria macam-macam hambatan antara lain sbb:

Pertama, masih adanya hambatan fisik berupa keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan, selain karena harganya yang cenderung mahal dan juga prosedur pembebasan yang belum kondusif untuk pengembangan perumahan bagi MBR.

Kedua, masih ada hambatan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bisa ditunjuk pada belum leluasanya pengurusan sertifikasi hak milik rumah MBR dan juga ketidakkonsistenan UU Nomor 1 tahun 2011 dan Peraturan terkait.

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Ketiga, masih ada hambatan organisasi, dimana manajemen kebijakan pengembangan perumahan cenderung berorientasi pada pembangunan rumah komersial yang dapat mengeliminasi hak MBR.

Keempat, masih ada hambatan politik berupa masih kurangnya komitmen Pemda dalam merumuskan kebijakan pengembangan perumahan untuk MBR.

Kelima, masih ada hambatan distributif, dimana akses MBR terhadap pasar perumahan masih sangat terbatas akibat kecenderungan harga naik dan daya beli mereka tetap rendah bahkan tidak berdaya sama sekali.

Keenam, hambatan dana. Berbagai skema pembiayaan perumahan yang diluncurkan melalui kebijakan selama ini belum efektif menyentuh persoalan dalam usaha membuka akses MBR untuk memiliki rumah.

Ketujuh, hambatan SDM, dimana pemegang kebijakan perumahan rakyat belum menjiwai roh dari perumahan untuk rakyat, khususnya perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tantangan:

- a. Kecukupan Daya Beli MBR
- Tantangan Pembiayaan Perumahan Bagi MBR
- c. Harga Jual Rumah yang Trjangkau MBR

Berdasarkan hal tersebut diperlukan ketersediaan dana murah jangka panjang,hal ini dimungkinkan mengingat adanya peluang pembiayaan Perumahan bagi MBR sbb:

- a. Permintaan masih sangat besar
- b. Kebijakan dan Program Pembangunan Perusahaan
- c. Meningkatnya Partisipasi Perbankan dalam Pembiayaan Perumahan bagi MBR
- d. Perekonomian semakin kondusif



Tabel 5.3. Target Sejuta Rumah 2015

Program sejuta rumah untuk rakyat ditujukan untuk menjawab keterbatasan supply dan kepemilikan rumah. Berdasarkan sensus 2010,13,6 juta kepala keluarga menyewa dan menumpang hidup tanpa sewa,dimana kepala keluarga menumpang 7,2 juta (12%),kepala keluarga menyewa 6,4 juta (10%) dan kepala keluarga memiliki rumah 48 juta (78%)

Program 1 juta rumah ditujukan untuk menjawab kebutuhan perumahan,karena:

- Tingkat kepemilikan rumah di Indonesia (75%) di bawah benchmark China ,
 Singapura (90%) dan India 87%
- Sebagian besar yang belum memiliki rumah di Jawa dan Sumatra

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

• Tantangan terbesar suply rumah adalah kelangkaan lahan,infrastruktur,perijinan,harha material,upah minimum,kapasitas pembangunan rumah dan akses terhadap rumah dan akses terhadap pembiayaan murah MBR

Untuk mengatasi hal tersebut perlu membuat agar krisis perumahan rakyat dapat diatasi. Adapun yang harus segera dilakukan untuk menghilangkan tujuh hambatan tersebut adalah:

Pertama, membuat program land bank atau bank tanah khusus untuk perumahan MBR oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota melalui lembaga milik pemerintah.

Kedua, mengevaluasi kembali peraturan dan perundang-undangan terkait perumahan rakyat, termasuk membuat peraturan atau perundang-undangan tentang bank tanah, tabungan perumahan rakyat, perizinan yang transparan, perbankan, dan pertanahan.

Ketiga, melakukan reformasi organisasi terkait perumahan rakyat kearah pemenuhan penyediaan perumahan untuk rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu, seperti Kementerian Perumahan Rakyat, Perumnas, BUMN bidang perumahan lainnya, BUMD yang bergerak di bidang perumahan, temasuk pembentukan Badan Pelaksana Perumahan atau BPJS Perumahan.

Keempat, mensosialisasikan atau mensyaratkan kepada kepala daerah atau calon kepala daerah untuk berkomitmen mengembangkan perumahan untuk MBR sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah.

Kelima, membuka, mempermudah dan menyediakan akses untuk mendapatkan perumahan bagi MBR dan masyarakat yang tidak mampu sesuai cluster atau kelompok kemampuan masyrakat termasuk moeningkatkan kemampuannya/penghasilannya.d

Keenam, membuat skema pembiayaan yang tepat sasaran serta memperbesar anggaran perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakt yang tidak mampu sampai mencapai 5% dari APBN/APBD serta mengombinsikannya dengan dana dari tabungan perumahan rakyat.

Ketujuh, melakukan revolusi mental terhadap SDM yang menangani perumahan rakyat, baik SDM dari pemerintah, BUMN, Pengembang maupun masyarakat luas.

5.3. SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN

5.3.1. Ketersediaan Sumber Daya Pembiayaan

Pada dasarnya dalam menentukan dan menilai sistem pembiayaan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, diantaranya yaitu ketersediaan sumber daya pembiayaan yang terkait dengan infrastruktur finansial yang mencakup:

- Sumber pembiayaan perumahan jangka panjang
- Ketersediaan bank penyalur kredit
- Kebijakan/regulasi mengenai pembiayaan perumahan.

Ketiga hal ini mutlak harus dipertimbangkan, mengingat pelaksanaan sistem pembiayaan sangat tergantung dari ketiga hal di atas. Selain itu yang perlu diperhatikan yaitu yang berhubungan dengan aspek keterjangkauan dalam pembiayaan penyediaan perumahan yaitu:

- Pendapatan masyarakat yang berkaitan dengan kemampuan membayar
- Harga yang harus dibayar untuk pengadaan perumahan Variabel yang diungkapkan oleh Turner inilah yang nantinya berkaitan langsung dengan sistem pembiayaan perumahan yang diterapkan.

Sistem pembiayaan yang dinilai efektif digunakan yaitu sumber pembiayaan jangka panjang, yang memerlukan seperangkat aturan atau mekanisme untuk menentukan bagaimana jika keadaan peminjam dan pemberi pinjaman berubah selama kontrak . Hal ini dinilai lebih aman untuk masa mendatang karena jika pinjaman tidak terbayar, rumah dapat dituntut kembali, sehingga kehilangan yang ditanggung relatif kecil. Yang kedua yaitu mengenai pengembalian yang nyata pada sektor perumahan.

5.3.2. Mekanisme Pembiayaan Perumahan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Terdapat perbedaan sistem pembiayaan antara negara berkembang dengan negara maju Pada negara maju, sistem pembiayaan perumahan terkait dengan pasar modal. Sedangkan pada negara berkembang, seperti Indonesia sistem pembiayaan perumahan belum sepenuhnya terkait dengan pasar modal dan dihadapkan pada keterbatasan instrumen finansial. Pemerintah juga memiliki peranan dalam kelembagaan finansial . Untuk membantu sistem pembiayaan perumahan, diperlukan stategi untuk menjaga keberlanjutan sistem pembiayaan perumahan. Peluang strategis untuk meningkatkan sistem pembiayaan perumahan salah satunya yaitu dengan memanfaatkan dana pensiun sebagai sumber pembiayaan perumahan jangka panjang. Pemanfaatan dana pensiun akan memacu tumbuhnya investasi jangka panjang yang dapat mengurangi resiko dalam sistem pembiayaan perumahan

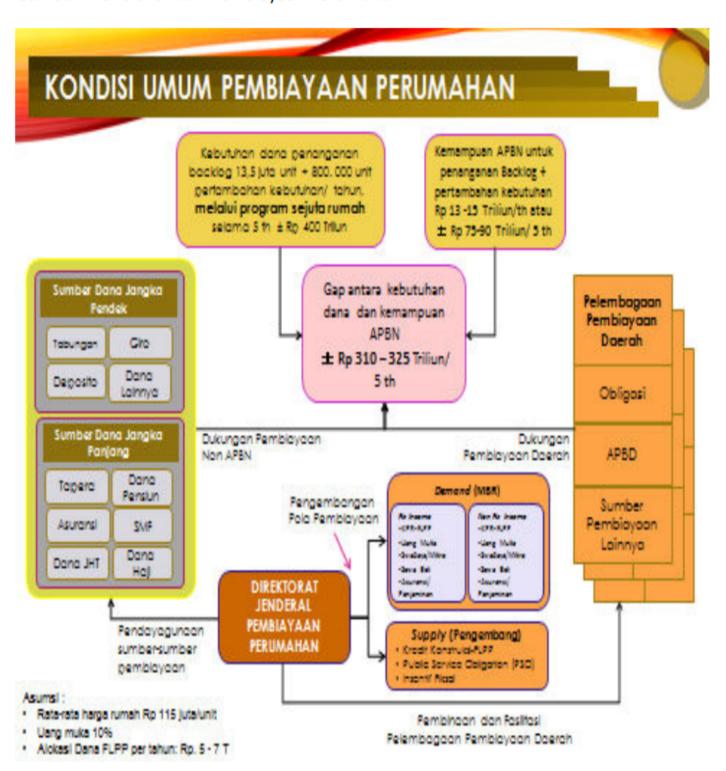
Pada sistem pembiayaan perumahan tersebut, telah dilibatkan SMF sebagai lembaga sistem pembiayaan perumahan jangka panjang. Sistem pembiayaan perumahan ini juga telah terintegrasi dengan pasar modal. Sistem pembiayaan ini akan meningkatkan sekuritas kredit perumahan karena pasar perumahan utama dana dana nya brasal dari :

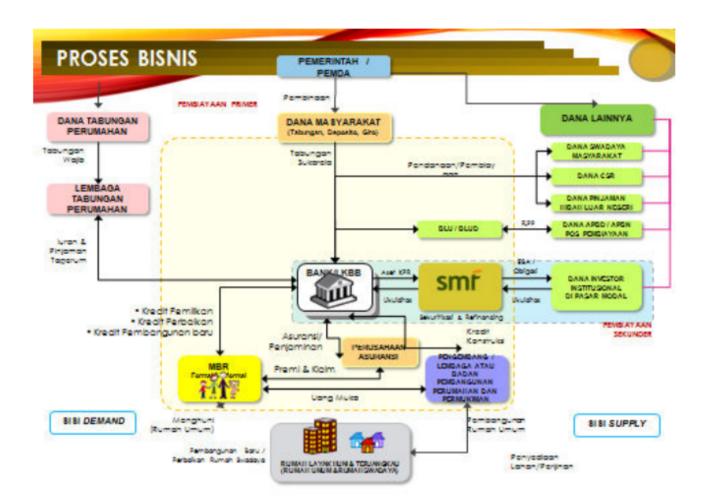
- Departemen Keuangan
- BI Institusi pembiayaan dunia (bank dunia) SMF Pasar modal
- Investor individu
- Investor lain Investasi
- Dana pensiun
- Asuransi Dana perumahan sosial Pasar primer
- Deposito bank
- Perusahaan keuangan Masyarakat berpenghasilan rendah

Sedangkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah terdapat bantuan dalam pengadaan perumahan berupa subsidi yang terpisah daru pasar perumahan utama. Hal ini berbeda dengan kenyataan sistem pembiayaan di Indonesia. Lembaga SMF sebagai lembaga yang mendukung sistem pembiayaan jangka panjang belum optimal, sehingga

dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kesenjangan antara sumber dana yang kebanyakan berupa dana jangka pendek dengan penyaluran KPR yang berupa kredit jangka panjang.

Gambar . Kondisi Umum Pembiayaan Perumahan





5.3.3. Stategi Pembiayaan Perumahan

Solusi yang ideal untuk menunjang percepatan pembangunan perumahan rakyat yang berkelanjutan antara lain dengan mengoptimalkan peranan dari beberapa pihak yaitu Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah (selaku regulator), Pengembang (setaku pelaksana pembangunan perumahan) dan Institusi terkait, seperti Lembaga keuangan khususnya perbankan dalam mendukung aspek pembiayaannya dan institusi lainnya sebagai pendukung pembangunan perumahan.

Daerah perkotaan di Indonesia yang laju urbanisasinya mencapai 4,4 % pertahun membuat kebutuhan perumahan di perkotaan meningkat pesat sedangkan ketersediaan lahan menjadi semakin langka dan mahal, sehingga pemerintah kota dituntut untuk dapat memanfaatkan lahan secara efisien dengan meningkatkan intensitas penggunaannya.

Retersediaan fasilitas KPR sangatlah diperlukan, hal ini mengingat bahwa kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli/memiliki rumah termasuk rumah susun secara kontan "cash" masih rendah. KPR adalah jenis kredit yang sifatnya jangka panjang, untuk itu bank pemberi KPR harus mempunyai dana yang sifatnya jangka panjang dan Stabil.

Kondisi ini merupakan permasalahan tersendiri bagi bank pemberi KPR yang secara teknis perbankan disebut maturity mismatch dan harus dicarikan solusinya, karena di pasar belum tersedia dana yang sama panjang jangka waktunya dengan jangka waktu KPR yang diberikan.

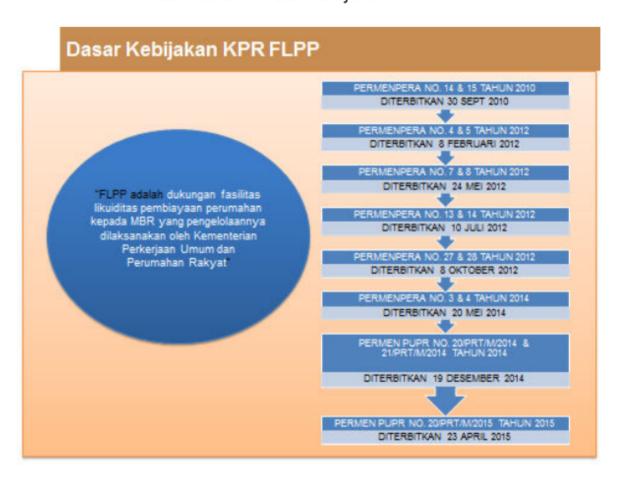
Gambar 5.3. StrategiPembiayaan Perumahan

STRATEGI PEMBIAYAAN PERUMAHAN							
PROGRAM SEJUTA RUMAH							
Kebutuhan Dana	Potensi Pembiayaan Program Sejuta Rumah						
Uang Muka	NO	LEMBAGA/INSTANSI	POTENSI PEMBIAYAAN	PERUNTUKAN			
Paling Banyak Rp 1,85 T	1	BPIS KETENAGAKERJAAN	Rp. 48,5 T	Anggota BPJS Ketenagakerjaan			
Dana Penyertaan Bank	2	BAPERTARUM-PNS	Rp. 3,1 T	PNS			
Paling Banyak	3	PT. TASPEN	Rp. 2,0 T	PNS			
Rp 6,2 T	4	PERUM PERUMNAS	Rp. 1,0 T	Umum			
FLPP	5	FLPP	Rp. 5,1 T ²⁾	Umum			
Paling Banyak	6	APBN KEMEN PUPR	Rp. 8,1 T	Umum			
Rp 56 T		GRAND TOTAL	Rp. 67,8 T				
Catatan:							

- o Kementerian PUPR telah mengajukan tambahan dana FLPP untuk tahun 2015 sebear 5 T ke Kementerian Keuangan melalui surat No.KU.01.05-Mn/08 Tanggal 07 Januari 2015 namun tidak terakomodir dalam APBN-P 2015;
- Potensi pembiayaan lainnya adalah pinjaman langsung sebesar US.\$ 1,5 Milyar dari World Bank, IFC dan ADB ke Bank BTN. Untuk Itu diperlukan negosiasi antara Bank BTN dengan World Bank, IFC dan ADB serta pemberian penjaminan dari Pemerintah Ri;
- o Ketersediaan dana uang muka TA 2015 sebesar Rp. 220 Milyar ;
- o Kebutuhan pembiayaan tersebut telah memperhitungkan penurunan suku bunga KPR FLPP dari 7,25% menjadi 5%, dan penurunan uang muka menjadi 1%.

5.4. SKEMA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN

FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) merupakan kebijakan pengganti subsidi bunga cicilan perumahan yang selama ini kita kenal. Kebijakan ini antara lain bertujuan agar terus tersedianya dana murah jangka panjang untuk membangun perumahan rakyat.



Gambar 5.2.. Dasar Kebijakan KPR FLPP

Becara kuantitatif FLPP akan memfasilitasi penerbitan 24.000 unit KPR sejahtera tapak (RSH) dan 1500 unit KPR sejahtera susun. Selain itu menurut beberapa informasi, dilakasanakannya FLPP ini akan dapat menyediakan sumber dana perumahan yang murah dan jangka panjang (suku bunga single digit) bagi masyarakat. Berkaitan dengan uang muka maka FLPP akan mematok minimal 10 % dari total harga rumah sejahtera tapak senilai 50 juta dan 144 juta untuk Rusunami. Dengan demikian FLPP ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan membantu masyarakat berpendapat rendah dan menengah untuk mendapatkan rumah murah.

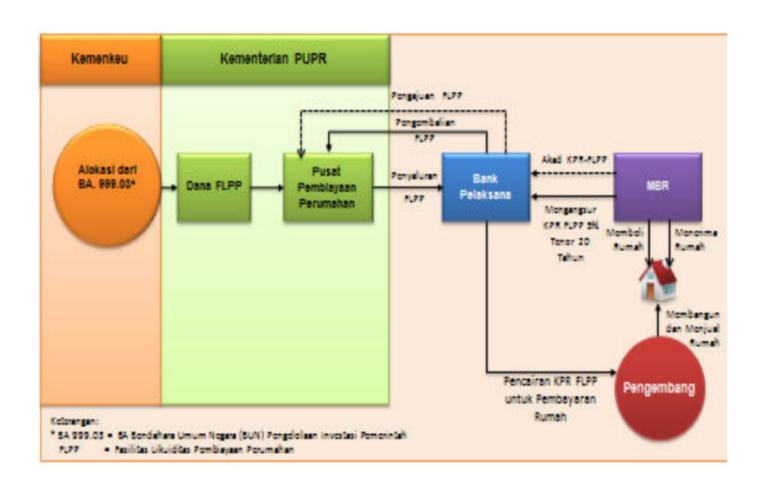
ana ini dikelola Pusat Pembiayaan Perumahan dengan menggunakan metode blended financing dimana dana dari APBN dicampur dengan sumber dana perbankan dan sumber lain. Hasil pencampuran dana ini akhirnya menghasilkan dan dengan bunga rendah.

Dibanding pola subsidi lama FLPP memiliki beberapa kelebihan. Selain akan tersedia dana murah jangka panjang uang pemerintah juga tidak hilang karena dana APBN yang dikeluarkan tetap dikembalikan melalui cicilan yang dilakukan masyarakat. Adanya dana

FLPP ini maka masyarakat yang membeli RSH akan mencicil dengan bungan rendah, berkisar 8-9 persen saja. Bunga cicilan rendah ini akan berlaku tetap hingga pembeli rumah melunasinya. keterjangkauan angsuran KPR bersubsidi diberikan secara terbatas selama masa subsidi yaitu 4 tahun hingga 10 tahun, optimalisasi pemanfaatan dana APBN sejalan dengan keuangan negara. Alasan lain yakni memerangi suku bunga tinggi melalui penyediaan dana murah jangka panjang sampai dengan melembaganya Tabungan Perumahan Nasional (TPN) serta daya tarik bagi sumber daya lain untuk berperan dalam pembiayaan perumahan.

Gambar 5.5. Skema Pembiayaan KPR FLPP

Skema Pembiayaan KPR FLPP



Dalam melakukan kebijakan ini kemenpera telah bekerjasama dengan beberapa bank swasta nasional serta Asosiasi Bank Pembangunan Daerah serta beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk melaksanakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

(FLPP). Kementerian PUPER luga telah menandatangani perjanjian kerjasama operasional (PKO) dalam rangka pengadaan perumahan dengan kredit kepemilikan rumah (KPR) melalui FLPP pada 4 bank nasional yakni Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, Bank Bukopin dan Bank Negara Indonesia (BNI). Pembiayaan rumah bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diperkirakan tidak akan bisa berjalan optimal pada tahun ini, akibat minimnya daya dukung APBN. Pembiayaan rumah bersubsidi dengan skema FLPP akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah, karena skema tersebut akan mampu menurunkan suku bunga perbankan sampai pada kisaran 8,15%-9,95% dengan tenor kredit selama 15 tahun. Namun, posisi kas BLU-PPP sampai saat ini hanya terisi Rp2,I triliun yang berasal dari pos FLPP pada tahun lalu sebesar Rp2,6 triliun, di mana Rp500 miliar dari jumlah itu sudah diserap perbankan.

Permasalahan belum optimalnya system pembiayaan perumahan nasional yang ada di Indonesia pada saat ini tergolong sebagai sistem pembiayaan perumahan yang pelum lengkap dan belum terintegrasi, karena masih belum dijumpai keberadaan komponen-komponen tertentu, khususnya lembaga keuangan perumahan khusus untuk segmen menengah ke bawah dan lembaga sekunder perumahan yang duperlukan untuk membentuk mata rantai tersebut. Oleh karena itu integrasi yang memungkinkan sinergi pembiayaan perumahan anatara swasta dan pemerintah belum terjadi. Hal ini menyebabkan pembangunan perumahan mempunyai kapasitas yang terbatas, cenderung informal dengan konsekuensi lingkungan perumahan yang cenderung sub-standart, dan kurang dapat menjangkau golongan pendapatan menengah ke bawah. Ditambah dengan tidak stabilnya kelembagaan pemerintah untuk sektor perumahan dalam pergantian kabinet, memperkuat kelemahan sistem pembiayaan perumahan nasional.

RPR Sejahtera FLPP adalah kredit pemilikan rumah program kerjasama dengan Kementerian PUPERA dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit, terdiri atas KPR Sejahtera Tapak untuk pembelian rumah Tapak dan KPR Sejahtera Susun untuk pembelian Rumah Susun.

Keunggulan

- Suku bunga 7,25 % fixed sepanjang jangka waktu kredit
- Proses cepat dan mudah

- · Uang muka dan biaya proses sangat ringan
- Cicilan sangat ringan
- Jangka waktu sangat flexible s.d. 15 tahun
- Perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran
- Memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan developer di seluruh wilayah indonesia

Tabel 5.5.. Persyaratan FLPP 2015

Uraian	Permen PUPR No. 20 Tahun 2015
Kelompok Sasaran	 MBR dengan penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan untuk rumah tapak dan Rp. 7 juta rupiah per bulan untuk rumah susun; Tidak memiliki rumah; Belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan.
Suku Bunga	Maksimum 5% per tahun tetap sepanjang masa pinjaman (max 20 Th)
Harga Jual Maksimum Rumah Tapak	 Antara Rp 110,5 juta (di Jawa dan Sumatera) – Rp 174 juta (Papua dan Papua Barat); Harga jual sesuai PMK 113/PMK.03/2014; Harga jual bebas PPN 10% diatur tersendiri melalui PMK 113/PMK.03/2014.
Harga Jual Maksimum Rumah Susun	 Antara Rp 248 juta atau Rp 6,9 juta/m2 (Sulawesi Tengah) – Rp 565,2 juta atau Rp. 15,7 juta/m2 (Papua); Harga jual tersebut belum bebas PPN 10%; Harga jual bebas PPN 10% masih menggunakan PP No. 31 Tahun 2007 sebesar Rp. 144 juta.
Ketentuan Lain	 Memanfaatkan untuk tempat tinggal atau hunian Tidak disewakan atau dialihkan kepemilikannya selama 5 tahun (rumah tapak) dan 20 tahun (rumah susun)

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Tabel 5.6.Realiasasi FLPP

Realisasi FLPP Per Pekerjaan Tahun 2010 - 2014 (unit)

Status: 30 Desember 2014

	Status : 50 Desember 2014							
	2010	2011	2012	2013	2014	Total	%	Target 2015
Pekerjaan	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	70	Unit
PNS	875	12,063	9,801	12,725	8,967	44,431	12.3%	29,000
TNI/POLRI	579	5,024	3,486	4,255	2,186	15,530	4.3%	10,136
Swasta	6,074	86,479	45,082	75,257	57,058	269,950	74.8%	176,198
Wiraswasta	430	6,027	4,969	8,190	6,445	26,061	7.2%	17,010
Lainnya			1,447	2,287	1,407	5,141	1.4%	3,356
Jumlah	7,958	109,593	64,785	102,714	76,063	361,113		235,700

Realisasi FLPP Per Pekerjaan Tahun 2010 - 2014 (Rp)

Status: 30 Desember 2014

	2010	2011	2012	2013	2014	Total	
Pekerjaan	FLPP (Rp)	FLPP (Rp)	FLPP (Rp)	FLPP (Rp)	FLPP (Rp)	FLPP (Rp)	%
PNS	27,270,331,510	406,860,816,288	382,130,669,142	649,745,646,420	533,864,276,900	1,999,871,740,260	12.1%
TNI/POLRI	17,539,470,703	162,791,365,686	131,327,853,525	219,738,015,460	132,867,046,650	664,263,752,024	4.0%
Swasta	184,811,336,432	2,921,344,273,565	1,832,811,450,009	3,962,883,884,660	3,523,887,346,954	12,425,738,291,621	75.1%
Wiraswasta	13,006,077,570	197,306,414,841	191,217,116,259	423,953,362,900	383,371,981,300	1,208,854,952,870	7.3%
Lainnya			49,769,449,792	106,840,359,710	82,147,658,020	238,757,467,522	1.4%
Jumlah	242,627,216,215	3,688,302,870,380	2,587,256,538,728	5,363,161,269,150	4,656,138,309,824	16,537,486,204,297	

5.5. ALTERNATIF PEMBIYAAN PERUMAHAN

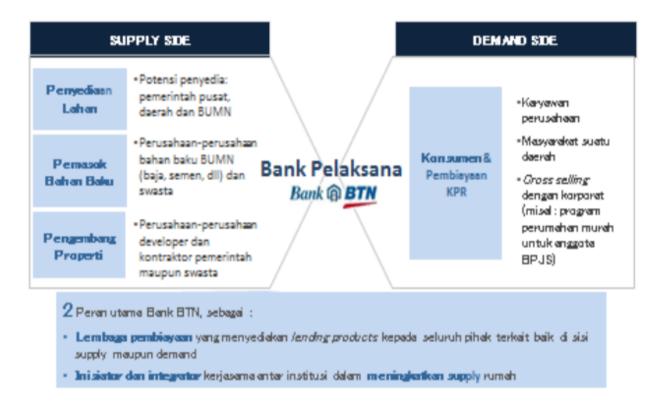
5.5.1. BANK TABUNGAN NEGARA

Bank BTN memiliki visi bahwa Bank BTN ingin Menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan. Bank BTN berusaha untuk merealisasikan program sejuta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI. Sejumlah aksi telah dilakukan oleh Bank BTN perusahaan serius untuk bagaimana dapat mempercepat realisasi dari program tersebut. . Kegiatan ini merupakan rangkaian dari strategis korporasi dalam menjaring masyarakat yang ingin membeli rumah dengan skim KPR sekaligus dalam rangka pemenuhan program sejuta rumah.

Gambar 5.3 . Peran BTN dalam penyediaan umah



Dalam Menyediakan Perumahan Bank BTN Berperan Sentral Menjadi Integrator Stakeholders Strategis



Dalam membawa arah kebijakan perusahaan, Bank BTN memiliki visi dan misi yang membangun kinerja perusahaan untuk menuju masa depan kearah yang lebih demi masyarakat Indonesia, visi dan misi tersebut adalah:

Visi

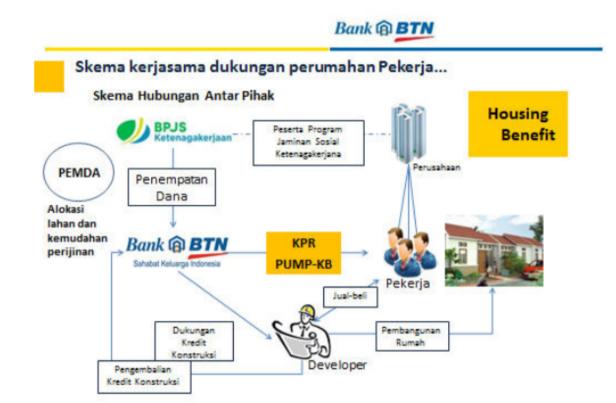
Menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan

Misi

- Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang fokus pada pembiayaan perumahan dan tabungan
- Mengembangkan human capital yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi, serta penerapan Good Corporate Governance dan Compliance.

- Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui Teknologi Informasi terkini
- Memedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya

Gambar 5.4. : Skema kerjasama dukungan perumahan pekerja



Bank @ BTN

KPR Sejahtera FLPP

Kredit dengan peruntukan pembelian rumah sederhana sehat, yang dibeli dari pengembang dan khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berpenghasilan tetap maupun tidak tetap.





Keunggulan KPR Sejahtera FLPP:

- Suku bunga 5% fixed sepanjang jangka waktu kredi
- Uang muka mulai 1%
- Jangka waktu flexible sampai dengan 20 tahun
- Proses cepat dan murah
- Uang muka dan biaya proses murah
- Perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kebakarakan
- Memiliki jaringan yang luas
- Biaya provisi 0,5% dari kredit yang diberikan
- Bebas biaya administrasintuan
- Biaya notaris tergantung ketentuan

Tabel 5.7 Persyaratan Dokumen



KPR Sejahtera FLPP: Persyaratan Dokumen

No	Dokumen	Pegawai	Wiraswasta
1.	Form Aplikasi Kredit dilengkapi dengan Pasfoto terbaru Pemohon dan Pasangan	٧	٧
2.	Fotocopy KTP Pemohon dan Pasangan, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Nikah/Cerai	٧	٧
3.	SI i p Gaji Terakhir/Surat Keterangan Penghasilan, Fotocopy SK Pengangkatan Pegawai Tetap/Surat Keterangan Kerja	٧	
4.	SIUP, TDP & Surat Keterangan Domisili serta Laporan Keuangan 3 bulan terakhir		٧
5.	Fotocopy NPWP	٧	٧
6.	Fotocopy Rekening Koran/Tabungan 3 bulan terakhir	٧	٧
7.	Surat Pernyataan belum memiliki rumah dari pemohon dan pasangan	٧	٧
8.	Surat Pernyataan belum pernah menerima subsidi rumah dari pemerintah yang dibuat pemohon dan pasangan	٧	٧

Tabel 5.8. Batasan Harga Jual Rumah

Batasan Harga jual Rumah

No	Zona	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jawa (kecuali Jabodetabek)	Rp105,000,000	Rp110,500,000	Rp116,500,000	Rp123,000,000	Rp130,000,000	
	Sumatera (kecuali Riau dan Bangka Belitung)	Rp105,000,000	Rp110,500,000	Rp116,500,000	Rp123,000,000	Rp130,000,000	
3	Kalimantan	Rp115,000,000	Rp121,000,000	Rp128,000,000	Rp135,000,000	Rp142,000,000	
4	Sulawesi	Rp110,000,000	Rp116,000,000	Rp122,500,000	Rp129,000,000	Rp136,000,000	
	Maluku & Maluku Utara	Rp120,000,000	Rp126,500,000	Rp133,500,000	Rp141,000,000	Rp148,500,000	
6	Bali & Nusa Tenggara	Rp120,000,000	Rp126,500,000	Rp133,500,000	Rp141,000,000	Rp148,500,000	
	Papua & Papua Barat	Rp165,000,000	Rp174,000,000	Rp183,500,000	Rp193,500,000	Rp205,000,000	
	Kep. Riau & Bangka Belitung	Rp110,000,000	Rp116,000,000	Rp122,500,000	Rp129,000,000	Rp136,000,000	
9	Jabodetabe k	Rp120,000,000	Rp126,500,000	Rp133,500,000	Rp141,000,000	Rp148,500,000	

5.5.2. BRI SYARIAH

Pembiayaan KPR BRI syariah di peruntukan bagi warga negara Indonesia yang ingin memiliki rumah idaman dengan cara di cicil bulanan melalui Bank BRI Syariah iB. KPR BRI Syariah memakai prinsip jual beli atau akad Murabahah, dengan begitu nasabah akan di tetapkan harga rumah dari awal dengan besar cicilan tetap perbulannya.

Bank BRI Syariah mengeluarkan produk pembiayaan KPR BRI Syariah untuk masyarakat umum, untuk mendukung perumahan masyarakat. Selain itu, BRI Syariah juga termasuk dalam Bank pelaksana KPR Bersubsidi sejahtera FLPP yang di beri nama KPR Sejahtera BRI Syariah iB. Hadirnya KPR Sejahtera BRI Syariah iB ini memberikan pilihan bagi masyarakat muslim untuk mendapatkan KPR bersubsidi Sejahtera FLPP dengan cara yang syar'i.

Terdapat 2 jenis KPR Bersubsidi Sejathera BRI Syariah iB:

Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

- 1. KPR Sejahtera BRI Syariah iB Tapak untuk pembiayaan rumah Sejahtera Tapak
- KPR Sejahtera BRI Syariah iB Susun untuk pembiayaan Rumah Sejahtera Susun
 Syarat KPR Bersubsidi Sejahtera BRI Syariah iB
- 1. Hanya berlaku untuk pembelian rumah sederhana (Susun/Tapak).
- Maksimal untuk harga rumah tapak adalah Rp 145 Juta.
- Maksimal untuk harga rumah susun adalah Rp 216 Juta.
- 4. Uang muka (DP) minimal 10% dari harga rumah (Susun/Tapak)
- 5. Cicilan TETAP hanya Rp 9ribuan/bulan dari setiap kelipatan Rp 1 Juta selama 15 tahun. Contoh bila harga rumah Rp 145 Juta dan DP 10%, maka cicilan = Harga rumah (Rp 145jt) DP (Rp 14,5jt) = Rp 130,5juta. Cicilan = 130,5 x 9rb = Rp 1,1745 juta/bulan.
- 6. Nasabah dengan penghasilan tetap dengan maksimal gaji pokok sebesar Rp 3,5 Juta/bulan untuk pembelian rumah Tapak dan gaji pokok sebesar Rp 5,5 juta/bulan untuk pembelian rumah susun.
- 7. Nasabah belum pernah memiliki rumah.
- 8. Nasabah belum pernah meneriman Subsidi Uang Muka/Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Kementrian Perumahan Rakyat.

Biaya biaya KPR Bersubsidi Sejahtera BRI Syariah iB

- 1. Bebas biaya Asuransi jiwa dan kebakaran
- 2. Biaya administrasi sebesar Rp 250.000 dari setiap pembiayan yang disetujui dan dibayar 1x dimuka.
- 3. Biaya pelayanan Bank 0,5% dari plafond pembiayaan yang disetujui dan dibayar 1x dimuka.
- Biaya Notaris sesuai ketentuan. Perbedaan BRIS dengan Bank Konvensional untuk

 FLPP

Akad pembiayaan

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka
Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Apabila nasabah sudah melakukan akad dan hasil pengujian adalah ditolak oleh kemenpera maka nasabah harus hadir kembali menandatangani akad ulang dengan pricing KPR komersial, maka untuk itu bank melakukan :blokir pencairan

Peruntukan KPR Sejahtera BRI Syariah iB

KPR Sejahtera BRI Syariah iB merupakan pembiayaan kepemilikan rumah KPR bersubsidi sejahtera dengan prinsip syariah dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP Kementrian Perumahan Rakyat yang di peruntukan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

- 1) Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia,namun sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat ini masih merasakan kesulitan untuk memperoleh kemudahan di dalam mendapatkan hunian yang layak,permasalahan perumahan menjadi salah satu permasalahan yang krusial yang terjadi diperkotaan khususnya di kota-kota besar. Permasalahan pembangunan perumahan di perkotaan menjadi lebih kompleks dengan adanya kendala semakin terbatasnya lahan, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, kegiatan ekonomi yang beragam dan kebutuhan ketersediaan sarana dan prasarana,sehingga para pengembang kurang berminat membangun rumah sederhana.
- Pemerintah bertugas dan berkewajiban untuk dapat menyediakan rumah yang layak dan terjangkau untuk setiap penduduk
- 3) Penyediaan rumah bagi masyarakat perlu memperhatikan tingkat keterjangkauan agar bantuan subsidi pembiayaan perumahan dapat teralokasi dengan baik dan tepat sasaran.
- 4) Pada dasarnya pemerintah berperan dalam penyediaan dana dalam pembiayaan perumahan bagi MBR. Pemerintah memberikan kebijakan khusus untuk mendorong penyediaan perumahan, terutama yang berkaitan dengan pembiayaannya. Ketersediaan sumber daya (infrastruktur finansial) cukup baik dalam mendukung sistem pembiayaan dalam penyediaan perumahan bagi MBR. Namuni efektivitas sistem pembiayaan dalam penyediaan perumahan selama ini belum optimal sehingga diperlukan koordinasi yang lebih baik
- 5) Pemerintah memberikan insentif/subsidi atau kebijakan khusus kepada Bank Pembangunan Daerah dalam hal pembiayaan untuk mendorong penyediaan perumahan bagi MBR. Bank Pembangunan Daerah sebagai salah satu lembaga keuangan bank yang memfasilitasi pembiyaan KPR untuk MBR sudah sudah menyediakan fasilitas pembiayaan tetapi tidak dapat diakses oleh masayarakat secara optimal karena tidak tersedia rumah yang sesuai dengan daya beli dan lokasi yang diinginkan masyarakat, yaitu dekat

dengan lokasi kerja,sementara SMF sebagai lembaga sistem pembiayaan perumahan jangka panjang,dirasakan belum optimal.

- 6) Rumusan kebijakan dan renstra pemerintahan daerah khususnya mengenai pendayagunaan sumber dana jangka panjang untuk perumahan bagi MBR sudah diimplementasikan sesuai arahan pusat namun perlu penyesuaian
- 7) Lembaga keuangan non bank termasuk koperasi sudah ada yang berperan dalam pengadaan perumahan dan menjembatani antara anggota yang membutuhkan rumah dengan lembaga pembiayaan yaitu Bank, namun di lain pihak koperasi atau lembaga pembiayaan non bank mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah untuk pembiayaan perumahan bagi anggotanya
- 8) Potensi dana yang diharapkan dapat ditarik adalah sebesar Rp 52.429.566.200.000 terdiri dari dana investasi jangka panjang yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan Rp 18.696.326.000.000, PT Taspen Rp 32.331.117.000.000 , Bapertarum Rp 1.183.147 , Dana Pensiun Rp 168.441.000.000 dan dari Dana Asuransi Rp 50.424.000.000

6.2. REKOMENDASI

Perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia, sehingga urusan perumahan merupakan pemenuhan dari hak asasi manusia dan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia berhak memiliki rumah. Berdasarkan hasil kajian masih banyak permasalahan di lapangan seperti masih rendahnya daya beli masyarakat karena harga jual rumah dan biaya penyediaan infrastruktur yang masih relatif tinggi, serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait belum optimal,kesulitan Pemerintah Kota dalam memberikan fasilitas berupa penyediaan lahan untuk pembangunan rumah .Maka berdasarkan kajian sementara maka dapat direkomendasikan sebagai berikut;

- Perlunya kebijakan pemerintah pusat,melalui regulasi dan fasilitasi, agar dapat menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat secara layak dan terjangkau,meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman,mendorong pengembangan wilayah, terutama di pinggiran kota.
- 2) Berdasarkan gambaran kondisi perumahan di Indonesia,dimana karateristik perkotaan menggambarkan harga tanah menjadi komponen yang mahal sehingga sulitnya ketersediaan

lahan,maka diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang mengacu pada percepatan program rumah murah yakni diharapkan Pemerintah Kota dapat menyediakan lahan karena untuk program-program tersebut tanah menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota dan Kementrian PUPERA diharapkan dapat membantu memberikan jaminan untuk menjaga kestabilan harga tanah,karena seringkali di lapangan menunjukan bahwa harga tanah pada suatu daerah umumnya sering mengalami lonjakan setelah direncanakan akan dibangun perumahan atau proyek pemerintah.

- Sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai rumah sederhana diperlukan dalam mendorong program pemerintah dalam penyedian rumah bagi masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- 4) Perlu adanya koordinasi yang lebih baik agar program pemerintah sejalan dengan program daerah yang mempunyai kharateristik yang berbeda beda
- 5) Mekanisme pembiayaan perumahan melalui PT.SMF diharapkan lebih sederhana dan lebih murah
- 6) Penyaluran FLPP agar dapat dipertimbangkan dapat melalui lembaga keuangan non bank
- 7) Perlu diberikan insentif bagi pengembang agar tertarik untuk membangun rumah untuk MBR, seperti , biaya perijinan membangun perumahan untuk MBR harus dibedakan menjadi lebih murah dibanding dengan membangun rumah real estate
- 8) Program pembiayaan jangka panjang untuk perumahan diharapkan selalu tercantum dalam RPJMD
- 9) Perlu adanya kebijakan pemerintah berupa peraturan Menteri PU-PERA agar dapat mengawal potensi dana ini sesuai tujuannya untuk digunakan dalam rangka pembiayaan perumahan bagi MBR
- 10) Perlu adanya kajian lanjutan untuk pendayagunaan sumber pendanaan jangka panjang secara efektif dan efisien,agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan bagi MBR